



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN
2019



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara substansi LkjIP Pemerintah Kabupaten Rembang ini merupakan pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap LKjIP ini mampu memberikan gambaran keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan peningkatan kepercayaan publik.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua jajaran aparat pemerintah daerah dan dukungan instansi lain serta masyarakat yang telah bekerja keras dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Harapan kami agar di tahun yang akan datang hasil evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Rembang oleh Kementerian PAN dan RB bisa mencapai target dengan predikat B.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya untuk mewujudkan Rembang yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, Maret 2020



BUPATI REMBANG

[Handwritten Signature]
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang.....	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 2
C. Visi, Misi, dan Sasaran.....	I - 3
D. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	I - 5
E. Aparatur Pemerintah Daerah	I - 9
F. Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah.....	I - 10
G. Sistematika Penyusunan	I - 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang	III - 3
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis.....	III - 9
C. Akuntabilitas Keuangan.....	III - 111
D. Capaian Atas Prestasi Yang Diraih.....	III - 137
E. Inovasi Pemerintah Kabupaten Rembang.....	III - 140
BAB IV PENUTUP	IV - 1
Lampiran	
Laporan Hasil Reiviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2019	
Laporan tindaklanjut atas reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2019	
Perjanjian Kinerja Kabupaten Rembang Tahun 2019	
Sandingan Program RPJMD lama dengan RPJMD Baru	
Piagam-piagam Penghargaan Kabupaten Rembang	

Daftar Tabel

Tabel I

Tabel I.1	Visi, Misi, dan Sasaran	I - 3
Tabel I.2	Urusan Pemerintahan.....	I - 6

Tabel II

Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019.....	II - 1
Tabel II.2	Program dan Anggaran Tahun 2019.....	II - 6

Tabel III

Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	III - 3
Tabel III.2	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019.....	III - 3
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya <i>Good Governance</i> Tahun 2019.....	III - 9
Tabel III.4	Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan BPK Tahun 2017-2021.....	III - 12
Tabel III.5	Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Terwujudnya <i>Good Governance</i> Tahun 2019	III - 14
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi Tahun 2019	III - 17
Tabel III.7	Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi Tahun 2019	III - 19
Tabel III.8	Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima Tahun 2019	III - 21
Tabel III.9	Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima Tahun 2019	III - 22
Tabel III.10	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian Tahun 2019	III - 24
Tabel III.11	Data Curah Hujan Rata-rata Kabupaten Rembang MT 2016/2017, MT 2017/2018, MT 2018/2019.....	III - 26
Tabel III.12	Pelaku Usaha Sektor Pertanian Tahun 2017-2019.....	III - 28
Tabel III.13	Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian.....	III - 29
Tabel III.14	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Indikator Indek Produksi Padi.....	III - 29
Tabel III.15	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2019	III - 31
Tabel III.16	Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan	III - 33
Tabel III.17	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	III - 34
Tabel III.18	Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Pengangguran Tahun 2019.....	III - 36
Tabel III.19	Program Pendukung Sasaran Menurunkan Angka Pengangguran Tahun 2019	III - 38
Tabel III.20	Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan Tahun 2019	III - 40
Tabel III.21	Program Pendukung Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan.....	III - 43
Tabel III.22	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja menurunkan Angka Kemiskinan	III - 45

Tabel III.23	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019	III - 48
Tabel III.24	Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rembang Tahun 2019 dengan Nasional Tahun 2018	III - 50
Tabel III.25	Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III - 51
Tabel III.26	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III - 52
Tabel III.27	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2019	III - 53
Tabel III.28	Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Rembang dengan Nasional Tahun 2019	III - 54
Tabel III.29	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	III - 54
Tabel III.30	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Tahun 2019	III - 56
Tabel III.31	Rasio Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2019	III - 56
Tabel III.32	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Dengan Capaian Standar nasional.....	III - 57
Tabel III.33	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif.....	III - 58
Tabel III.34	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif.....	III - 58
Tabel III.35	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2019.....	III - 59
Tabel III.36	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2019	III - 60
Tabel III.37	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah.....	III - 61
Tabel III.38	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah.....	III - 61
Tabel III.39	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2019	III - 62
Tabel III.40	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas pembangunan Jalan dan Jembatan.....	III - 64
Tabel III.41	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	III - 66
Tabel III.42	Jumlah RTLH yang Direhabilitasi/Ditangani dari 2016-2019	III - 66
Tabel III.43	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni.....	III - 67
Tabel III.44	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Baku.....	III - 68
Tabel III.45	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Air Baku Di Kabupaten Rembang Terhadap Capaian Standar Nasional.....	III - 69
Tabel III.46	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Baku.....	III - 70
Tabel III.47	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	III - 70

Tabel III.48	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Pusat Pertumbuhan Baru dengan Dukungan Infrastruktur Memadai	III - 71
Tabel III.49	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Pusat Pertumbuhan Baru dengan Dukungan Infrastruktur Memadai	III - 72
Tabel III.50	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019	III - 74
Tabel III.51	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019	III - 77
Tabel III.52	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019	III - 79
Tabel III.53	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	III - 81
Tabel III.54	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga Tahun 2019	III - 82
Tabel III.55	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga	III - 84
Tabel III.56	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kasus Gangguan terhadap keamanan dan Ketertiban Masyarakat	III - 85
Tabel III.57	Program Pendukung Capaian Sasaran Menurunnya Kasus Gangguan terhadap keamanan dan Ketertiban Masyarakat	III - 86
Tabel III.58	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS Tahun 2019	III - 87
Tabel III.59	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS	III - 88
Tabel III.60	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberdayaan masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	III - 91
Tabel III.61	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	III - 92
Tabel III.62	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni budaya Lokal	III - 95
Tabel III.63	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni budaya Lokal	III - 96
Tabel III.64	Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	III - 98
Tabel III.65	Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Rembang Dengan Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Nasional	III - 99
Tabel III.66	Program Pendukung Capaian Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	III - 100
Tabel III.67	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Dalam ketahanan Pangan Daerah Tahun 2019	III - 101
Tabel III.68	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Dalam ketahanan Pangan Tahun 2019	III - 103
Tabel III.69	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Pada Ekonomi Rumah Tangga Tahun 2019	III - 104
Tabel III.70	Perkembangan Jumlah Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah dan Mangga Tahun 2017-2019	III - 105
Tabel III.71	Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Air Payau dan Air Tawar Kabupaten Rembang Tahun 2017-2019	III - 107

Tabel III.72	Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatkan Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Pada Ekonomi Rumah Tangga Tahun 2019	III - 108
Tabel III.73	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019	III - 111
Tabel III.74	Realisasi Anggaran Pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 <i>Unaudited</i>	III - 124
Tabel III.75	Realisasi Anggaran Pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019	III - 126
Tabel III.76	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 <i>Unaudited</i>	III - 130
Tabel III.77	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019	III - 132
Tabel III.78	Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 <i>Unaudited</i>	III - 133
Tabel III.79	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 <i>Unaudited</i>	III - 133
Tabel III.80	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019	III - 135



Daftar Grafik

Grafik I

Grafik I.1	Strata Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019	I - 9
Grafik I.2	Jumlah PNS per Golongan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019	I - 9
Grafik I.3	Pejabat Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019	I - 10

Grafik III

Grafik III.1	Target dan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2017-2021	III - 10
Grafik III.2	Target dan realisasi nilai SAKIP Tahun 2017-2021	III - 13
Grafik III.3	Usulan dan Realisasi Usulan Masyarakat Tahun 2017-2021	III - 18
Grafik III.4	Target Dan Realisasi Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan pelayanan Publik Tahun 2017-2021	III - 21
Grafik III.5	Target dan Realisasi Indeks Produksi Padi Tahun 2017-2019	III - 25
Grafik III.6	Perkembangan Luas Tanam dan Produksi padi Tahun 2016-2019	III - 26
Grafik III.7	Data Curah Hujan Rata-rata Kabupaten Rembang MT 2016/2017, MT 2017/2018, MT 2018/2019	III - 27
Grafik III.8	Perkembangan Pelaku Usaha Sektor Pertanian Di kabupaten Rembang Tahun 2017-2019 (orang)	III - 28
Grafik III.9	Target dan realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%) Tahun 2017-2019	III - 32
Grafik III.10	Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%) Tahun 2017-2019	III - 33
Grafik III.11	Target dan Realisasi Tingkat pengangguran Terbuka (%) Tahun 2017-2019	III - 37
Grafik III.12	Tingkat pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Rembang	III - 37
Grafik III.13	Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019	III - 41
Grafik III.14	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang	III - 42
Grafik III.15	Target dan Realisasi IKLH Tahun 2017-2019	III - 49
Grafik III.16	Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017-2021	III - 53
Grafik III.17	Target dan Realisasi Rasio Jumlah UMKM Terhadap Jumlah penduduk Tahun 2017-2021	III - 57
Grafik III.18	Target dan Realisasi kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2017-2021	III - 60
Grafik III.19	Target dan Realisasi Persentase Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021	III - 63
Grafik III.20	Target dan Realisasi Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021	III - 63
Grafik III.21	Target dan Realisasi Persentase RTLH yang direhabilitasi/ditangani Tahun 2017-2021	III - 67
Grafik III.22	Target dan Realisasi Ketersediaan Air Baku Tahun 2017-2021	III - 69

Grafik III.23 Target dan Realisasi Jumlah Pusat Pertumbuhan Baru dengan Infrastruktur Memadai Tahun 2017-2021.....	III - 72
Grafik III.24 Target dan Realisasi AKI (Angka Kematian Ibu) Tahun 2017-2021	III - 75
Grafik III.25 Target dan Realisasi AKB (Angka Kematian Bayi) Tahun 2017-2021	III - 76
Grafik III.26 Target dan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah (Tahun 2017-2021)	III - 79
Grafik III.27 Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021	III - 80
Grafik III.28 Target dan Realisasi Jumlah Medali Yang Diperoleh Dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	III - 83
Grafik III.29 Cakupan Penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah Di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	III - 86
Grafik III.30 Persentase PMKS Yang ditangani Di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.....	III - 88
Grafik III.31 Cakupan Pemenuhan Hak Anak Di kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.....	III - 91
Grafik III.32 Cakupan Desa Ramah Anak Di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	III - 92
Grafik III.33 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	III - 95
Grafik III.34 Persentase Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	III - 98
Grafik III.35 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	III - 99
Grafik III.36 Target dan Realisasi Skor PPH Tahun 2017-2021.....	III - 102
Grafik III.37 Target dan Realisasi Indeks Produksi Pertanian Tahun 2017-2019	III - 106
Grafik III.38 Pertumbuhan Produksi Budidaya Air Payau dan Air Tawar Kabupaten Rembang Tahun 2017-2019.....	III - 108
Grafik III.39 Proporsi Realisasi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019	III - 125
Grafik III.40 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019	III - 126
Grafik III.41 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019	III - 128
Grafik III.42 Perkembangan Persentase Proporsi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019	III - 129
Grafik III.43 Proporsi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019	III - 131
Grafik III.44 Proporsi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019	III - 131

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun ketiga dari RPJMD periode 2016- 2021. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel; dan

Wujud pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2019 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun Anggaran 2019 yang merupakan tahun ketiga RPJMD periode 2016-2021;

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang di tahun 2019 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya; dan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. VISI, MISI DAN SASARAN

Tabel I.1
Visi, Misi dan Sasaran

VISI	MISI	SASARAN
<p>Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan</p>	<p>Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.</p>	<p>Terwujudnya Good Governance</p>
		<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi</p>
		<p>Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima</p>
		<p>Meningkatnya kinerja sektor pertanian</p>
		<p>Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan</p>
		<p>Menurunnya angka pengangguran</p>
		<p>Menurunnya angka kemiskinan</p>
		<p>Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup</p>
		<p>Meningkatnya Nilai Investasi</p>
	<p>Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif</p>

VISI	MISI	SASARAN
		Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan Jembatan
	Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni
	dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan	Meningkatnya ketersediaan air baku
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan	Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai
	Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
		Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga
		Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat
		Meningkatnya kualitas

VISI	MISI	SASARAN
	administrasi kependudukan	penanganan pada masyarakat PMKS
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak
		Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal
	Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan	Terkendalinya pertumbuhan penduduk
		Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah
Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga		

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Rembang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Rembang

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi di Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan urusan wajib dan pilihan, yaitu



Tabel I.2

		URUSAN WAJIB	
A	I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
		1.	Pendidikan
		2.	Kesehatan
		3.	Pekerjaan Umum
		4.	Penataan Ruang
		5.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		6.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		7.	Sosial
	II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
		1.	Ketenagakerjaan
		2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3.	Pangan
		4.	Pertanahan
		5.	Lingkungan Hidup
		6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

	9	Perhubungan
	10.	Komunikasi dan Informatika
	11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	12.	Penanaman Modal
	13.	Kepemudaan dan Olah Raga
	14.	Statistik
	15.	Persandian
	16.	Kebudayaan
	17.	Perpustakaan dan
	18.	Kearsipan.
B	KABUPATEN REMBANG URUSAN PILIHAN	
	1.	Kelautan dan Perikanan
	2.	Pariwisata
	3.	Pertanian
	4.	Perdagangan
	5.	Perindustrian
	6.	Transmigrasi

3. Kelembagaan Perangkat Daerah

Bersandar pada prinsip - prinsip otonomi daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mendukung tugas - tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas - tugas pembantuan lainnya maka sebagai implementasinya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 dan juga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari :

a) Sekretariat Daerah;

b) Sekretariat DPRD;

c) Inspektorat;

d) Dinas Daerah, terdiri atas :

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah;
- 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dinas Kesehatan;
- 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup;
- 15) Dinas Pertanian dan Pangan;
- 16) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

e) Badan Daerah, terdiri atas :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah;
- 3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

f) Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno

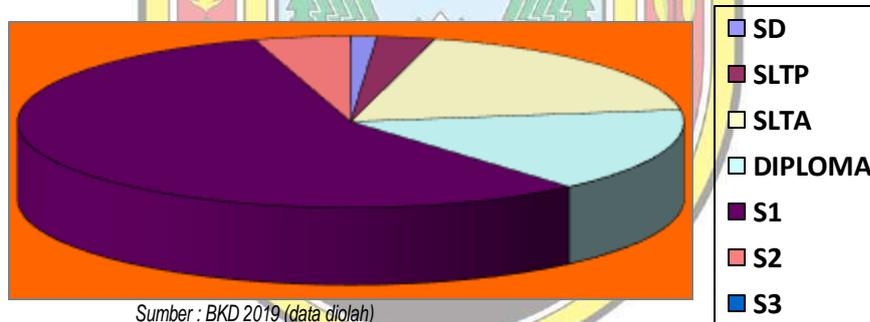
g) Kecamatan.

E. APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari dukungan personil aparat pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Rembang memiliki 6.545 Pegawai Negeri Sipil yang siap mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun kualifikasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang per Desember 2019 adalah sebagai berikut :

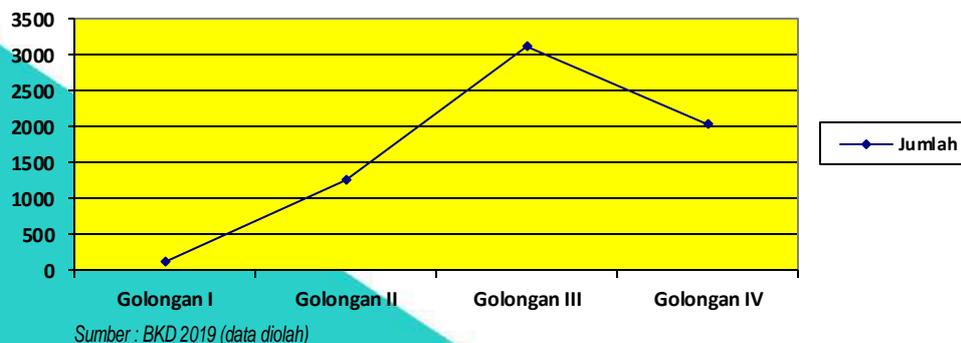
Grafik I.1

Strata Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019



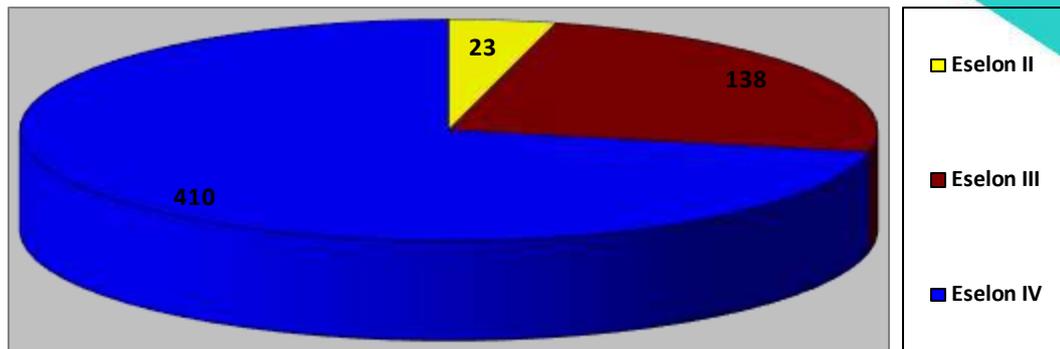
Grafik I.2

Jumlah PNS Per Golongan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019



Adapun untuk pejabat yang ada di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut :

Grafik I.3
Pejabat Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun 2019



Sumber : BKD 2019 (data diolah)

F. PERMASALAHAN / ISU PEMBANGUNAN DAERAH

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Berikut ini adalah isu strategis pembangunan jangka menengah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Rembang dengan brand “**REMBANG BANGKIT**” :

- Kualitas Pendidikan
- Harapan Hidup Masyarakat dan Permasalahan Stunting
- Infrastruktur Kewilayahan dan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Pengarusutamaan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- Ketahanan Pangan Masyarakat
- Kualitas Lingkungan Hidup
- Keberdayaan Masyarakat

- Kualitas Penataan Lingkungan dan Perumahan
- Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- Kemiskinan dan PMKS
- Pengangguran
- Ketersediaan *Baseline Data*
- Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
- Pertumbuhan Ekonomi
- Kebijakan dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Visi Misi dan Sasaran Daerah, Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu Pembangunan Daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019. Analisis capaian kinerja tahun 2018 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dengan analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan

permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2019 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019, yang merupakan bagian dan rincian tahunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi sebagai upaya pencapaian visi, misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapainya dalam Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun 2019

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3
Misi I “Mewujudkan Pemerintahan yang Cepat Tanggap, Transparan, Partisipatif dan Berkeadilan sesuai Prinsip Pemerintahan yang Amanah”		
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan		
a. Terwujudnya <i>Good Governance</i>	1) Tingkat maturitas SPIP	3
	2) Opini Laporan Keuangan BPK	WTP

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3
	3) Nilai SAKIP	64
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan		
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	4) Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	65%
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan dan Partisipatif		
a. Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	5) Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	78
Misi II “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sumberdaya Daerah, maupun Pemberdayaan Masyarakat, serta Terjaminnya Kelestarian Lingkungan Hidup”		
1. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah		
a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian	6) Indeks Produksi Padi	1,11
	7) Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	1,5
b. Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	8) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	14,60
2. Menurunkan Angka Pengangguran		
a. Menurunnya angka pengangguran	9) Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00%
3. Menurunkan Angka Kemiskinan		
a. Menurunnya angka kemiskinan	10) Persentase penduduk miskin	13,83%
4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup		
a. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	11) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3
Misi III “Meningkatkan Investasi serta Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”		
1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan		
a. Meningkatnya Nilai Investasi	12) Realisasi investasi PMA dan PMDN	4.747.479
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif		
a. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	13) Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	8,75
b. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	14) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	2,3
Misi IV “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas serta Berdimensi Kewilayahan”		
1. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur.		
a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan Jembatan	15) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	72,43
	16) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	85,71
b. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	17) Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	9,35%
c. Meningkatnya ketersediaan air baku	18) Persentase cakupan Air baku.	80%
2. Meningkatkan Kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai		
a. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	19) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	4

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3
Misi V “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Terjangkau bagi Semua Lapisan Masyarakat, Termasuk Pendidikan Keagamaan”		
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna dan Jaminan Kepastian Akses Pelayanan Kesehatan kepada Seluruh Lapisan Masyarakat		
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	20) AKI (Angka Kematian Ibu)	6
	21) AKB (Angka Kematian Bayi)	115
2. Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah diakses Seluruh Warga dengan Menekankan Pendidikan Karakter, untuk Mewujudkan Insan Terdidik yang Cerdas, Trampil, Mandiri & Berwawasan Kebangsaan.		
a. Meningkatnya angka rata rata lama sekolah	22) Rata-rata lama sekolah	7,6
	23) Angka Harapan Lama Sekolah	12,2
3. Mengembangkan Potensi Pemuda dan Prestasi Olah Raga		
a. Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga	24) Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional	40
Misi VI “Menciptakan Stabilitas Politik, Pemerintahan, Sosial, dan Mengembangkan Budaya Lokal serta Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dan Tertib Administrasi Kependudukan”		
1. Meningkatkan Kondusivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat		
a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan tertib masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	25) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100,00%
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat		
a. Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	26) Persentase PMKS yang ditangani	60%

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3
3. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, Kesenjangan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak		
a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak	27) Cakupan desa ramah anak	75%
	28) Cakupan Pemenuhan Hak Anak	65%
4. Memberikan Fasilitas yang Memadai Kepada Para Pelaku Seni agar dapat Bereksresi Seluas-Luasnya dan Berupaya Menjaga Segala Aspek Budaya Lokal yang Merupakan Warisan Berharga dari Pendahulu		
a. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	29) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16%
5. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan		
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	30) Persentase pertumbuhan penduduk	0,65%
	31) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,61
Misi VII "Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan"		
1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan		
a. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	32) Skor PPH	87,90%
2. Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan		
a. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	33) Indeks Produksi Pertanian	6,5
	34) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	2%

Sasaran seperti diuraikan dalam tabel tersebut di atas dijelaskan sesuai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021. Proses pencapaian sasaran pada tahun 2019 didukung oleh program-program sebagai berikut :

Tabel II.2
Program dan Anggaran
Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54.730.417.640,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.603.272.250,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	260.520.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.476.099.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.627.984.000,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	51.000.000,00
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.541.537.250,00
8	Program Pendidikan Kedinasan	333.467.950,00
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	25.000.000,00
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.519.650.000,00
11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	20.000.000,00
12	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	5.264.155.000,00
13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.909.213.500,00
14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.437.305.000,00
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	62.053.725.400,00
16	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	199.000.000,00
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.588.150.000,00
18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.153.130.000,00
19	Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan	15.000.000,00
20	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
		80.000.000,00
21	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.058.648.000,00
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.308.555.156,00
23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.169.000.000,00
24	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	129.985.000,00
25	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	313.000.000,00
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.418.656.000,00
27	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	206.850.000,00
28	Program Pendidikan Dasar	109.419.983.888,00
29	Program Pengembangan Perumahan	3.375.078.700,00
30	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	335.000.000,00
31	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan	50.000.000,00
32	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.794.525.000,00
33	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31.984.230.300,00
34	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	500.000.000,00
35	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	100.000.000,00
36	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	235.000.000,00
37	Program Pengawasan Obat dan Makanan	101.910.000,00
38	Program Penguatan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	35.000.000,00
39	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	2.911.501.050,00
40	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	2.986.178.000,00
41	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	30.000.000,00
42	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	255.000.000,00
43	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	45.274.000,00
44	Program Pendidikan Politik Masyarakat	66.000.000,00
45	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	590.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
46	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	115.000.000,00
47	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	15.000.000,00
48	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.268.950.000,00
49	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	650.000.000,00
50	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	155.300.000,00
51	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	13.236.026.350,00
52	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	17.093.300.000,00
53	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	20.000.000,00
54	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	670.000.000,00
55	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	302.454.173,00
56	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	95.400.000,00
57	Program Desa Mandiri Pangan	300.000.000,00
58	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	875.000.000,00
59	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	600.000.000,00
60	Program Penegakan Peraturan Daerah	720.000.000,00
61	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	59.000.000,00
62	Program Penyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah	175.000.000,00
63	Program Pembangunan Sistem Informasi Irigasi	107.561.750,00
64	Program Penanganan Anak Terlantar	200.000.000,00
65	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	625.686.680,00
66	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	-
67	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	570.000.000,00
68	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.372.580.000,00
69	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38.100.000,00
70	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	395.000.000,00
71	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	35.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
72	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	112.000.000,00
73	Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal	325.000.000,00
74	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	733.000.000,00
75	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3.199.593.250,00
76	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan	367.500.000,00
77	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.307.796.000,00
78	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.614.490.000,00
79	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	990.800.000,00
80	Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	300.000.000,00
81	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.020.085.173,00
82	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	15.000.000,00
83	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.563.000.000,00
84	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	205.000.000,00
85	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	757.600.000,00
86	Program Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	149.000.000,00
87	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	280.000.000,00
88	Program Pengembangan dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	1.215.950.000,00
89	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.317.905.000,00
90	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	30.000.000,00
91	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.100.000.000,00
92	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	240.000.000,00
93	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	160.000.000,00
94	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	87.200.000,00
95	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.170.000.000,00
96	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	587.730.000,00
97	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
		185.000.000,00
98	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	759.400.000,00
99	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.389.745.000,00
100	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	705.000.000,00
101	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	288.650.000,00
102	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	213.000.000,00
103	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	210.000.000,00
104	Program Pembinaan Sejarah Lokal	200.000.000,00
105	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	593.850.000,00
106	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	10.391.613.320,00
107	Program Pengembangan Budaya Baca	5.367.450.000,00
108	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	105.000.000,00
109	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	255.000.000,00
110	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	55.000.000,00
111	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	30.000.000,00
112	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	50.000.000,00
113	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	70.000.000,00
114	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	158.000.000,00
115	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	-
116	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	6.463.500.000,00
117	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	55.000.000,00
118	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	212.000.000,00
119	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100.000.000,00
120	Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	317.000.000,00
121	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100.000.000,00
122	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.470.000.000,00
123	Program Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri	

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
		50.000.000,00
124	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	188.000.000,00
125	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	300.000.000,00
126	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	50.000.000,00
127	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	25.000.000,00
128	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.388.572.000,00
129	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	300.000.000,00
130	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	1.944.800.000,00
131	Program Peningkatan Produksi Pertanian	793.250.000,00
132	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	20.000.000,00
133	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	244.800.000,00
134	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	80.000.000,00
135	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	100.000.000,00
136	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	92.338.500,00
137	Program Pengembangan Nelayan Kecil	921.450.000,00
138	Program Pengembangan Nilai Budaya	60.000.000,00
139	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	50.000.000,00
140	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	150.000.000,00
141	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	400.000.000,00
142	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00
143	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	12.000.000,00
144	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	877.454.173,00
145	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	200.000.000,00
146	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	2.395.000.000,00
147	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	320.000.000,00
148	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	612.720.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
149	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	250.000.000,00
150	Program Pembinaan Kesenian Masyarakat	60.000.000,00
151	Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	470.000.000,00
152	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.129.000,00
153	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	123.000.000,00
154	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	230.000.000,00
155	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan	16.000.000,00
156	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	11.000.000,00
157	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	50.000.000,00
158	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	460.000.000,00
159	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	270.000.000,00
160	Program Kerjasama Pembangunan	148.000.000,00
161	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	2.328.952.400,00
162	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi	1.530.925.000,00
163	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	225.000.000,00
164	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	-
165	Program Pengelolaan TPI Terpadu	11.335.484.700,00
166	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	145.000.000,00
167	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.372.000.000,00
168	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas	395.000.000,00
169	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	90.000.000,00
170	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.262.800.000,00
171	Program Pembinaan Industri	55.000.000,00
172	Program pembinaan jasa konstruksi	55.000.000,00
173	Program pembinaan pedagang	15.000.000,00
174	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
		775.000.000,00
175	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.425.478.000,00
176	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran	159.825.000,00
177	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1.219.000.000,00
178	Program Peningkatan Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak	420.000.000,00
179	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	78.000.000,00
180	Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	721.600.000,00
181	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	430.000.000,00
182	Program Kerjasama informasi dan media massa	54.000.000,00
183	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	295.000.000,00
184	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	265.000.000,00
185	Program Pengembangan Agribisnis	845.500.000,00
186	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas	50.674.777.070,00
187	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya	614.630.000,00
188	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	131.400.000,00
189	Program Perencanaan Tata Ruang	270.000.000,00
190	Program Promosi Produk Unggulan Daerah	994.500.000,00
191	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	715.200.000,00
192	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	155.000.000,00
193	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	572.000.000,00
194	Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika	107.000.000,00
195	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno	104.710.968.392,00
196	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	279.977.000,00
197	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	610.000.000,00
198	Program Sistem Data Gender dan Anak	5.000.000,00
199	Program keluarga berencana	6.271.190.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
200	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru	40.000.000,00
201	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	125.000.000,00
202	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian	27.940.375.000,00
203	Program Peningkatan Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen	887.000.000,00
204	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	2.640.000,00
205	Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha	25.000.000,00
206	Program Pelayanan Kontrasepsi	73.000.000,00
207	Program Pengembangan Sistem Distribusi	200.000.000,00
208	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	4.300.000.000,00
209	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	50.000.000,00
210	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1.197.000.000,00
211	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	761.525.000,00
212	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	641.026.340,00
213	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	45.000.000,00
214	Program Ketahanan Keluarga	74.200.000,00
215	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	5.937.851.000,00
216	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	25.000.000,00
217	Program Kerjasama Pembangunan	304.100.000,00
218	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah	100.000.000,00
219	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	1.679.000.000,00
220	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	30.800.000,00
221	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.300.780.000,00
222	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	17.000.000,00
223	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	5.000.000,00
224	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	188.000.000,00
225	Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik	5.055.300.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019
226	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	1.642.300.000,00
227	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa	709.700.000,00
228	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	110.000.000,00
229	Program Perencanaan Tata Ruang	-
230	Program Pemanfaatan Ruang	12.860.000,00
231	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan	10.000.000,00
232	Program Penanggulangan kemiskinan	10.000.000,00
233	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24.733.373.000,00
234	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	19.422.040.000,00
235	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	72.000.000,00
236	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	63.960.000,00
237	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	12.302.793.000,00
238	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	60.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2019, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator *outcome* dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019. Indikator tersebut diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi / pelaporan dari masing - masing SKPD di Kabupaten Rembang dan data eksternal yang berasal dari luar instansi / lintas sektoral.

2. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$$

2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel III.1 :
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91%≤100%	Sangat Tinggi
2.	76%≤90%	Tinggi
3.	66%≤75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Misi I “Mewujudkan Pemerintahan yang Cepat Tanggap, Transparan, Partisipatif dan Berkeadilan sesuai Prinsip Pemerintahan yang Amanah”				
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan				
a. Terwujudnya Good Governance	1) Tingkat maturitas SPIP	3	3	100%
	2) Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%
	3) Nilai SAKIP	64	58,70	91,72%

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan				
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	4) Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	65%	64,57%	99,34%
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan dan Partisipatif				
a. Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	5) Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	78	78,04	100,05%
Misi II “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sumberdaya Daerah, maupun Pemberdayaan Masyarakat, serta Terjaminnya Kelestarian Lingkungan Hidup”				
1. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah				
a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian	6) Indeks Produksi Padi	1,11	0,84	75,68%
	7) Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian`	1,5	1,78	118,67%
b. Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	8) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	14,60	13,72	93,97%
2. Menurunkan Angka Pengangguran				
a. Menurunnya angka pengangguran	9) Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00%	3,69	108,40%
3. Menurunkan Angka Kemiskinan				
a. Menurunnya angka kemiskinan	10) Persentase penduduk miskin	13,83	14,95	91,90%

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup				
a. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	11) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67	64,44	96,18%
Misi III "Meningkatkan Investasi serta Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif"				
1. Meningkatkan Investasi dengan Memanfaatkan Potensi Lokal dan Berwawasan Lingkungan				
a. Meningkatnya Nilai Investasi	12) Realisasi investasi PMA dan PMDN	4.747.479	8.029.000	169,12 %
2. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif				
a. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	13) Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	8,75	6,27	71,66%
b. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	14) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	2,3	2,05	89,01%
Misi IV "Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas serta Berdimensi Kewilayahan"				
1. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur.				
a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan Jembatan	15) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	72,43%	85,53%	118,09%
	16) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	85,71%	92,06%	107,41%
b. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	17) persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ ditangani	9,35%	22,49%	240,04%

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
c. Meningkatkan ketersediaan air baku	18) Persentase cakupan Air baku	80%	45,72%	57,15%
2. Meningkatkan Kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai				
a. Meningkatkan jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	19) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	4	4	100%
Misi V “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Terjangkau bagi Semua Lapisan Masyarakat, Termasuk Pendidikan Keagamaan”				
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna dan Jaminan Kepastian Akses Pelayanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat				
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) AKI (Angka Kematian Ibu)	6	7	83,3%
	21) AKB (Angka Kematian Bayi)	115	164	57,4%
2. Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah diakses Seluruh Warga dengan Menekankan Pendidikan Karakter, untuk Mewujudkan Insan Terdidik yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan				
a. Meningkatkan angka rata rata lama sekolah	22) Rata-rata lama sekolah	7,6	7,15	91,4%
	23) Angka Harapan Lama Sekolah	12,2	12,10	99,1%
3. Mengembangkan Potensi Pemuda dan Prestasi Olah Raga				
a. Meningkatkan potensi pemuda dan prestasi	24) Jumlah Medali yang diperoleh	40	46	115%

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
olahraga	dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional			
Misi VI “Menciptakan Stabilitas Politik, Pemerintahan, Sosial, dan Mengembangkan Budaya Lokal serta Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dan Tertib Administrasi Kependudukan”				
1. Meningkatkan Kondusivitas dan Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Masyarakat				
a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	25) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	100%
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat				
a. Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	26) Persentase PMKS yang ditangani	60%	90%	150%
3. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, Kesenjangan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak				
a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak	27) Cakupan desa ramah anak	75%	65%	86,6%
	28) Cakupan Pemenuhan Hak Anak	65%	65%	100%
4. Memberikan Fasilitas yang Memadai kepada Para Pelaku Seni agar dapat Berekspresi Seluas-Luasnya dan Berupaya Menjaga Segala Aspek Budaya				

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Lokal yang Merupakan Warisan Berharga dari Pendahulu				
a. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	29) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16%	26%	162,5%
5. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan				
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	30) Persentase pertumbuhan penduduk	0,65%	0,79%	78,46%
	31) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,61	9,98	66,23%
Misi VII "Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan"				
1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan				
a. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	32) Skor PPH	87,90%	87,90%	100%
2. Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan				
a. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	33) Indeks Produksi Pertanian	6,5	6.32	97.29%
	34) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	2%	2,67%	133,30%

B. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS



Sasaran 1

Terwujudnya Good Governance



Penyerahan Laporan Keuangan Opini WTP Kabupaten Rembang

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah” dan juga untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan”.

Adapun capaian kinerja Sasaran “Terwujudnya *Good Governance*” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya *Good Governance* Tahun 2019

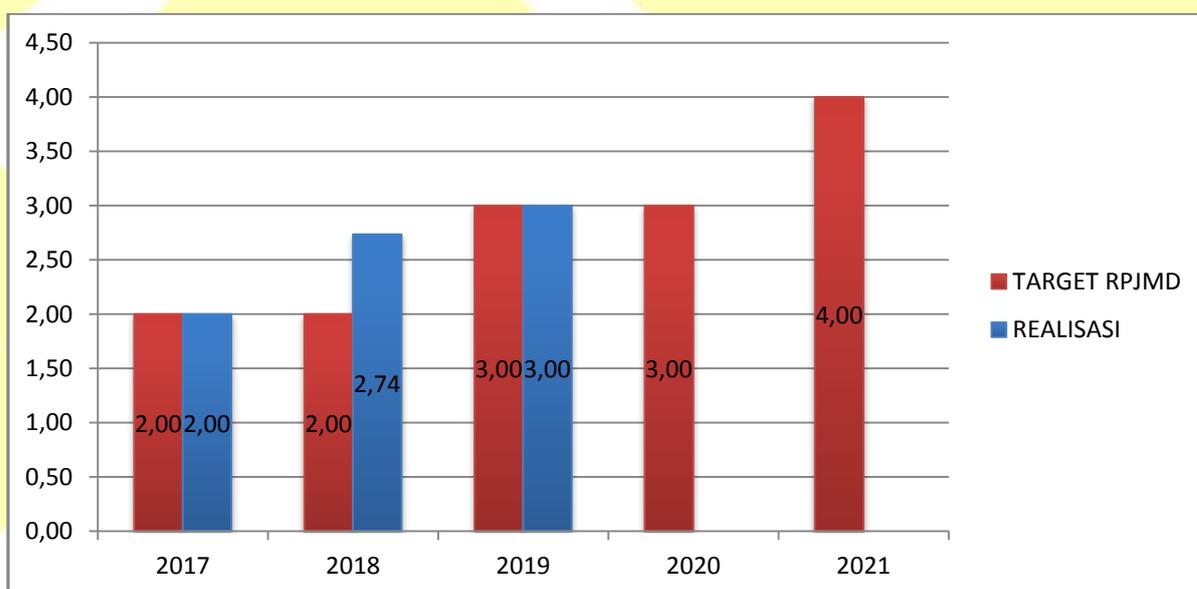
No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%	Sangat Tinggi
2.	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%	
3.	Nilai SAKIP	64	58,70	91,72%	
	Rata - rata		97,24%		

1. Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP merupakan sistem atau metode pengendalian yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah. Untuk itu diperlukan penegasan komitmen dari Bupati dalam rangka mencapai Penilaian Maturitas SPIP sebagai bentuk penilaian terhadap ketercapaian pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Adapun grafik ketercapaian Tingkat Maturitas SPIP bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.1
Target dan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP
Tahun 2017 - 2021



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Target Tingkat Maturitas SPIP pada tahun 2019 adalah Tingkat 3 dengan realisasi tingkat 3, sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2018 realisasi Tingkat Maturitas SPIP adalah tingkat 2.74 sedangkan pada tahun 2019 Tingkat Maturitas SPIP adalah tingkat 3, hal ini menjelaskan bahwa semakin ke depan realisasi capaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP semakin meningkat.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target tingkat 4 maka persentase capaian terhadap akhir tahun RPJMD adalah sebesar 75%.

2. Opini Laporan Keuangan BPK

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Pencapaian opini WTP tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama semua Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang dalam menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel hingga proses konsolidasi di tingkat Kabupaten Rembang oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun ketercapaian Opini Laporan Keuangan BPK bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.4
Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan BPK
Tahun 2017 - 2021

NO	TAHUN	TARGET RPJMD	REALISASI
1.	2017	WDP	WDP
2.	2018	WTP	WDP
3.	2019	WTP	WTP
4.	2020	WTP	-
5.	2021	WTP	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Target Opini Laporan Keuangan BPK pada Tahun 2019 adalah WTP dengan realisasi tingkat WTP, sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2018 realisasi Opini Laporan Keuangan BPK adalah WDP sedangkan pada tahun 2019 Opini Laporan Keuangan BPK adalah WTP, hal ini menjelaskan bahwa semakin ke depan realisasi Opini Laporan Keuangan BPK semakin meningkat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target WTP maka persentase capaian terhadap akhir tahun RPJMD adalah sebesar 100%.

3. Nilai SAKIP

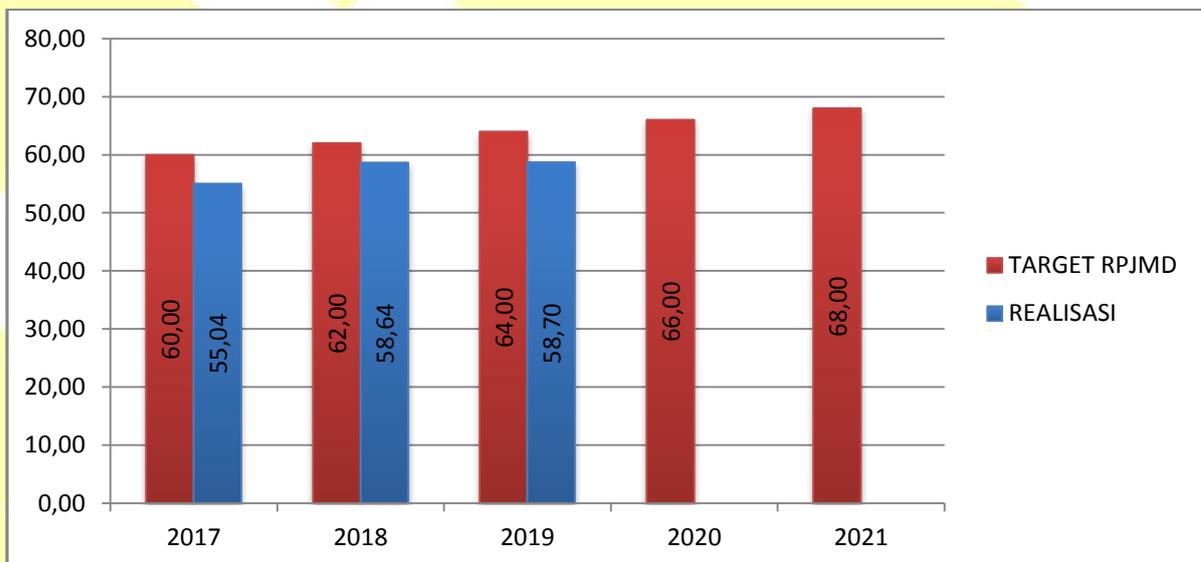
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya

menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Adapun grafik ketercapaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Rembang bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.2
Target dan Realisasi Nilai SAKIP
Tahun 2017 - 2021



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Target Nilai SAKIP pada tahun 2019 adalah sebesar 64 dengan realisasi sebesar 58,70, sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 91,72%. Pada tahun 2018 realisasi Nilai SAKIP adalah sebesar 58,64 sedangkan pada tahun 2019 Nilai SAKIP adalah sebesar 58,70, hal ini menunjukkan bahwa semakin kedepan realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP semakin meningkat meskipun capaian pada tahun 2019 belum 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target sebesar 68 maka persentase capaian terhadap akhir tahun RPJMD adalah sebesar 86,32%.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Terwujudnya *Good Governance* pada Tahun 2019, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.5
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran
Terwujudnya *Good Governance* Tahun 2019

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	INSPEKTORAT
2.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	INSPEKTORAT
3.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	INSPEKTORAT
4.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SETDA
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD
6.	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	SETDA
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Semua Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya *Good Governance*”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

Faktor Pendorong

1. Adanya dukungan regulasi yang semakin membuka peluang bagi penguatan SPIP;
2. Tingkat pendidikan formal SDM AP/IP yang cukup tinggi;

3. Adanya sinkronisasi dalam rangka sinergitas pengawasan;
4. Telah dimanfaatkannya Sistem Aplikasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (SIPANDU dan SIMDA Keuangan);
5. Pendampingan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan untuk seluruh Perangkat Daerah;
6. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah menggunakan penilaian Disiplin Pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai.
7. Pelaksanaan Perubahan RPJMD pada Tingkat Daerah dan Perubahan Renstra pada Tingkat Perangkat Daerah sehingga sasaran strategis perangkat daerah telah berorientasi hasil (*outcome*).

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1.	Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Optimalisasi Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
2.	Tingkat kapabilitas APIP yang masih dibawah level diharapkan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang berkualitas;
3.	Pengelolaan Aset Tanah pada DINDIKPORA, Aset Peralatan dan Mesin pada DINKES dan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada DPUTARU belum tertib.	Mengidentifikasi Aset dan Menelusuri Aset - Aset tersebut dan Mengakomodir Pencatatannya di KIB dan Neraca
4.	Pengelolaan Aset Tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang tidak tertib.	Menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga yang terlibat dalam Pelaksanaan Proses Reklamasi dan Menyusun Kerjasama Pemanfaatan
5.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Perangkat Daerah belum berorientasi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Review penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 2. Menetapkan masing - masing Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
6.	Cascading Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja khususnya di level eselon III dan IV	Memanfaatkan Cascading dan menetapkan perjanjian kinerja dari eselon II, III dan IV sampai dengan tingkat pelaksana.
7.	Kualitas Hasil Evaluasi Inspektorat masih belum dapat digunakan secara optimal untuk perbaikan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Internal pada Inspektorat terhadap Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.



Sasaran 2

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi



MUSRENBANG Kabupaten Rembang Tahun 2019

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”**

dan juga untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan partisipasi**

masyarakat dan swasta dalam pembangunan”.

Dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem

perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam dilihat dari indikator Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen Perencanaan. Usulan masyarakat tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan kepada pemerintah daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya.

Adapun capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.6

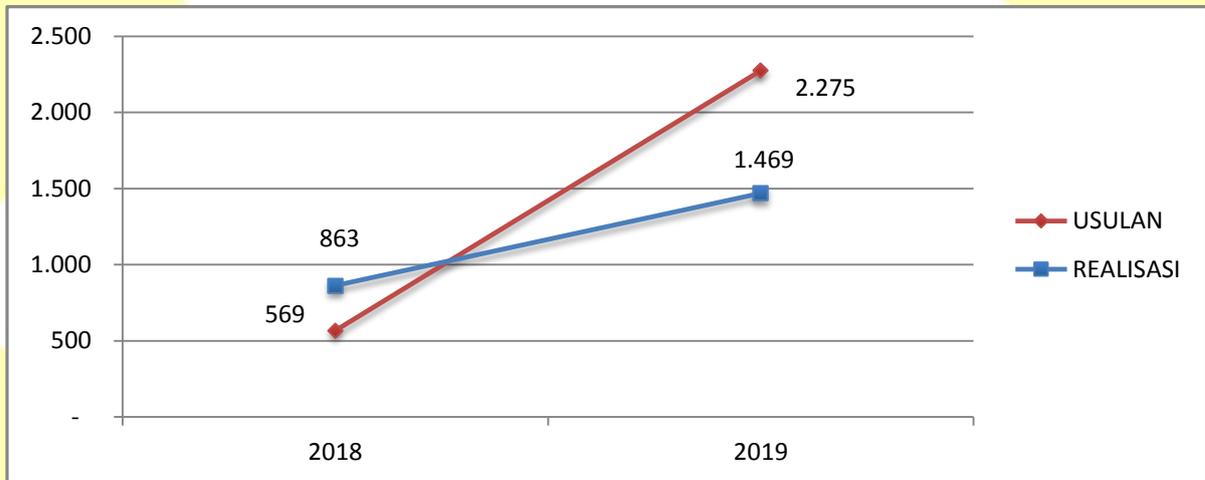
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	65%	64,57%	99,34%	Sangat Tinggi

Total usulan masyarakat yang ditampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebanyak 2.275 usulan, sedangkan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (dalam hal ini tertuang di dokumen KUA PPAS) adalah sebanyak 1.469 usulan sehingga dapat dihitung realisasi persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 64,57%. Kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2019 ditetapkan 65% maka capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 99,34% dari target yang ditetapkan.

Adapun grafik usulan masyarakat yang ditampung dalam penyusunan RKPD dibandingkan dengan usulan yang diakomodir dalam dokumen KUA PPAS dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik. III.3
Usulan dan Realisasi Usulan Masyarakat
Tahun 2017 - 2021



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (KUA PPAS) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir memang mengalami penurunan, namun secara jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (KUA PPAS) pada tahun 2019 sebanyak 1.469 usulan lebih banyak dibanding pada tahun 2018 yang hanya 863 usulan.

Peran serta usulan masyarakat ini sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengawal proses perencanaan dan memantau pelaksanaan pembangunan serta memberi masukan terhadap pembangunan yang sudah berjalan sehingga pembangunan daerah di Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi pada Tahun 2019, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.7

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi Tahun 2019

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	BAPPEDA

Dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

Faktor Pendorong

1. Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Rembang dan sistem birokrasi yang sudah tertata dengan baik;
4. Tersedianya potensi daerah (SDA) yang belum dimanfaatkan secara optimal;
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1.	Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mengampu semua usulan masyarakat	Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menentukan skala prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
2.	Belum optimalnya koordinasi perencanaan antar perangkat daerah.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan
3.	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat.	Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran secara terpadu (SIPANDU) dalam menyusun Dokumen Perencanaan Daerah
4.	Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan, serta minimnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi.	Optimalisasi dukungan SDM, Pengusulan formasi jabatan Fungsional Perencana dan Pelatihan berkaitan Perencanaan
5.	Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan.	Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Komitmen Pimpinan dalam Proses Perencanaan



Sasaran 3

Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima



Launching Antrean Online di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang

yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif”.

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”** dan juga untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan kualitas pelayanan**

Adapun capaian kinerja Sasaran “Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

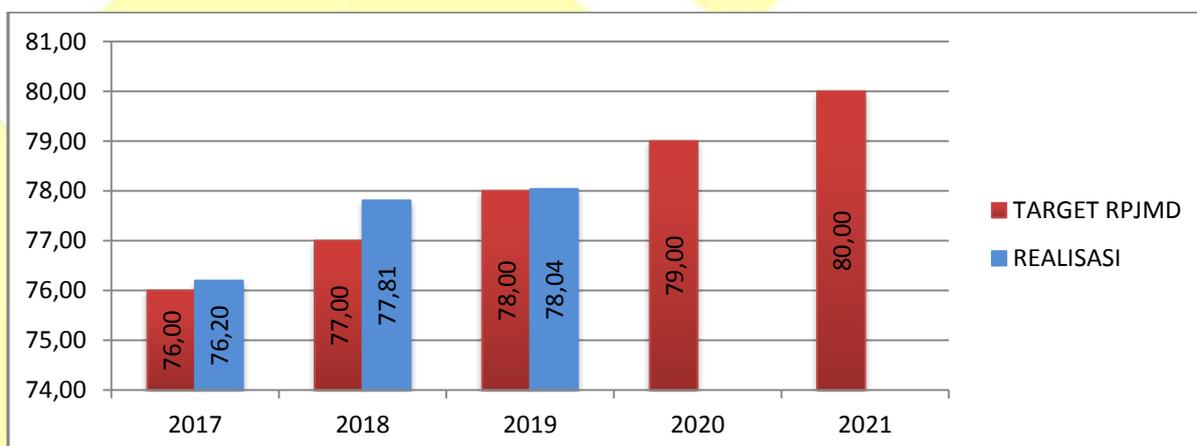
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik	78	78,04	100.05%	Sangat Tinggi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, bahwa skor 78,04 menunjukkan bahwa Mutu atas Pelayanan Publik kepada masyarakat mendapatkan nilai B yang menandakan bahwa Pelayanan Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang memiliki Kinerja Baik.

Adapun grafik ketercapaian Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.4
Target dan Realisasi Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik Tahun 2017 - 2021



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Target Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2019 adalah sebesar 78 dengan realisasi sebesar 78,04, sehingga dapat dihitung persentasenya sebesar 100,05%. Pada tahun 2018 realisasi Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) adalah sebesar 77,81 sedangkan pada tahun 2019 Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) adalah sebesar 78,04.

Hal ini menjelaskan bahwa semakin kedepan realisasi capaian kinerja rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik semakin meningkat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target tingkat 4 maka persentase capaian terhadap akhir tahun RPJMD adalah sebesar 97,55%.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima pada Tahun 2019, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.9

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima Tahun 2019

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	SETDA

Dalam rangka pencapaian sasaran “Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan.

Faktor Pendorong

- 1 Adanya dukungan regulasi dan SOP dalam hal pemberian pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat;
- 2 Kesadaran Aparatur pada Perangkat Daerah pemberi pelayanan yang semakin meningkat;
- 3 Koordinasi pembagian tugas dalam pemberian pelayanan yang sudah mengacu pada pembagian tupoksi kelembagaan;
- 4 Ketepatan penempatan Aparatur pemberian pelayanan dengan Sumber Daya sudah terampil dan komunikatif; dan
- 5 Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan yang cukup memadai.



Sasaran 4

Meningkatnya kinerja sektor pertanian



Panen Raya Petani Rembang bersama Bupati Rembang

Kemandirian Ekonomi Daerah” .

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **”Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”** dan juga untuk mencapai tujuan **”Membangun**

Sasaran meningkatnya kinerja sektor pertanian merupakan salah satu sasaran dari arah kebijakan pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian serta peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian. Dengan meningkatnya kinerja sektor pertanian maka pendapatan dan kesejahteraan petani turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran keempat ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan pencapaian untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Untuk mengukur sasaran tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,18% dengan kategori predikat sangat tinggi.

Adapun hasil pengukuran capaian sasaran meningkatnya kinerja sektor pertanian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian
Tahun 2019

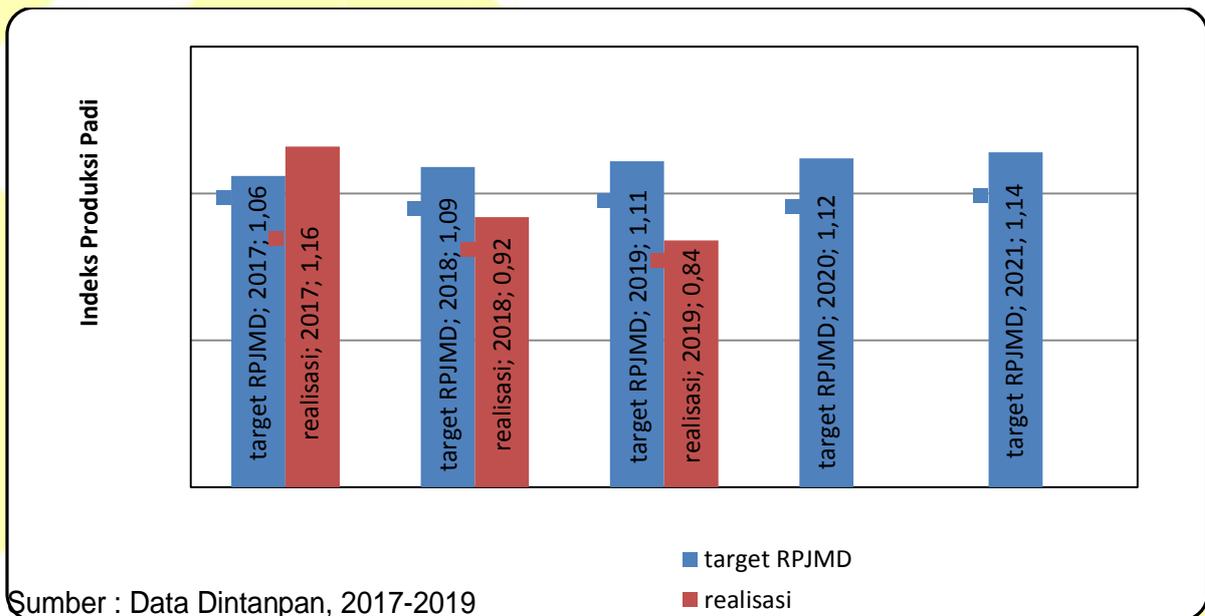
No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		% Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1	Indeks Produksi Padi	1,11	0,84	75,68	Sangat Tinggi
2	Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian	1,5	1,78	118,67	
Rata-rata Capaian Kinerja		97,18			

1. Indeks Produksi Padi

Angka Indeks Produksi Padi adalah angka yang menunjukkan perbandingan produksi padi dalam dua waktu yang berbeda dan telah ditentukan waktunya. Jika angka indeks yang dihasilkan = 100 berarti tidak ada perkembangan produksi padi antara tahun berjalan dengan tahun dasar. Jika angka indeks yang dihasilkan > 100 berarti ada perkembangan produksi padi antara tahun berjalan dengan tahun dasar. Jika angka indeks yang dihasilkan <

100 berarti ada penurunan produksi padi antara tahun berjalan dengan tahun dasar.

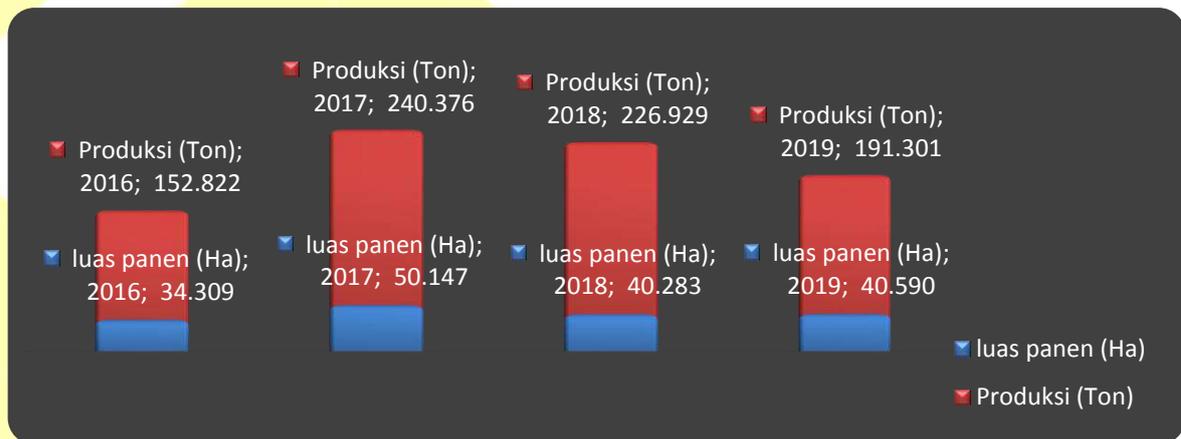
Grafik III.5
Target dan Realisasi Indeks Produksi Padi
Tahun 2017-2019



Indeks produksi padi selama 3 tahun terakhir (dari tahun 2017-2019) mengalami penurunan, secara berurutan datanya adalah 1,16; 0,92 dan 0,84. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan produksi padi antara tahun berjalan dengan tahun dasar. Turunnya pencapaian indikator ini dikarenakan terjadi penurunan kenaikan luas panen padi pada tahun 2018 dan 2019 sehingga membawa dampak terhadap produksi dan produktivitas padi. Selain itu rendahnya curah hujan pada Musim Tanam I sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi, karena sangat menolong untuk perluasan tambah tanam mengingat kondisi sebagian besar sawah di Kabupaten Rembang merupakan sawah tadah hujan. Dengan realisasi Indeks produksi padi yang masih dibawah target RPJMD, maka perlu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan indeks tersebut selama 2 tahun mendatang.

Adapun perkembangan produksi padi pada tahun 2016 - 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik III.6
Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Padi
Tahun 2016 - 2019



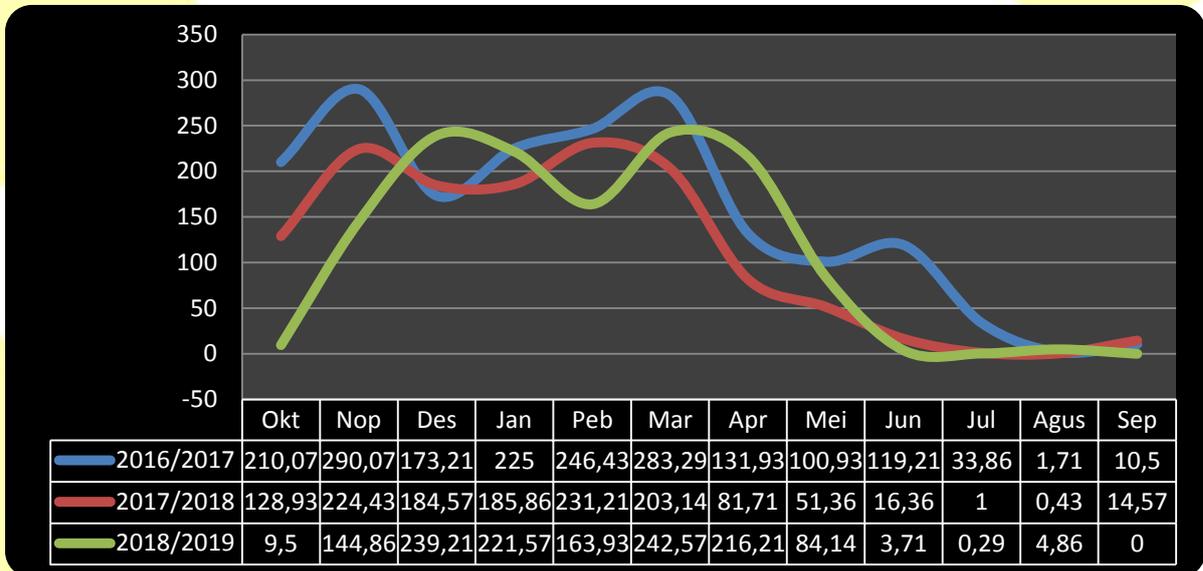
Sumber : Data Dintanpan, 2017-2019

Produksi padi selama tahun 2016 - 2019 mengalami fluktuatif. Sejak tahun 2017-2019, produksi padi mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena luas panen yang cenderung menurun dari tahun 2017-2019. Walaupun pada tahun 2019 luas panen padi sedikit mengalami peningkatan, namun faktor curah hujan sangat dominan dalam mempengaruhi produksi padi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data intensitas curah hujan pada musim tanam yang menurun selama tiga tahun terakhir seperti pada tabel dan grafik berikut :

Tabel III.11
Data Curah Hujan Rata-rata Kabupaten Rembang
MT 2016/2017, MT 2017/2018, MT 2018/2019

MT	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
2016/2017	210,07	290,07	173,21	225,00	246,43	283,29	131,93	100,93	119,21	33,86	1,71	10,50
2017/2018	128,93	224,43	184,57	185,86	231,21	203,14	81,71	51,36	16,36	1,00	0,43	14,57
2018/2019	9,50	144,86	239,21	221,57	163,93	242,57	216,21	84,14	3,71	0,29	4,86	0,00

Grafik III.7
Data Curah Hujan Rata-rata Kabupaten Rembang
MT 2016/2017, MT 2017/2018, MT2018/2019



Dari tabel dan grafik dapat diketahui bahwa curah hujan pada awal MT III 2018/2019 lebih rendah jika dibandingkan MT dua tahun sebelumnya. Intensitas curah hujan pada awal MT I tahun 2016/2017 dan MT II tahun 2017/2018 sangat mempengaruhi jumlah produksi padi. Padi membutuhkan banyak air terutama pada masa vegetatif yang berlangsung pada awal persemaian benih dan pertumbuhan bibit. Jika pada masa ini ketersediaan air terbatas, maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman.

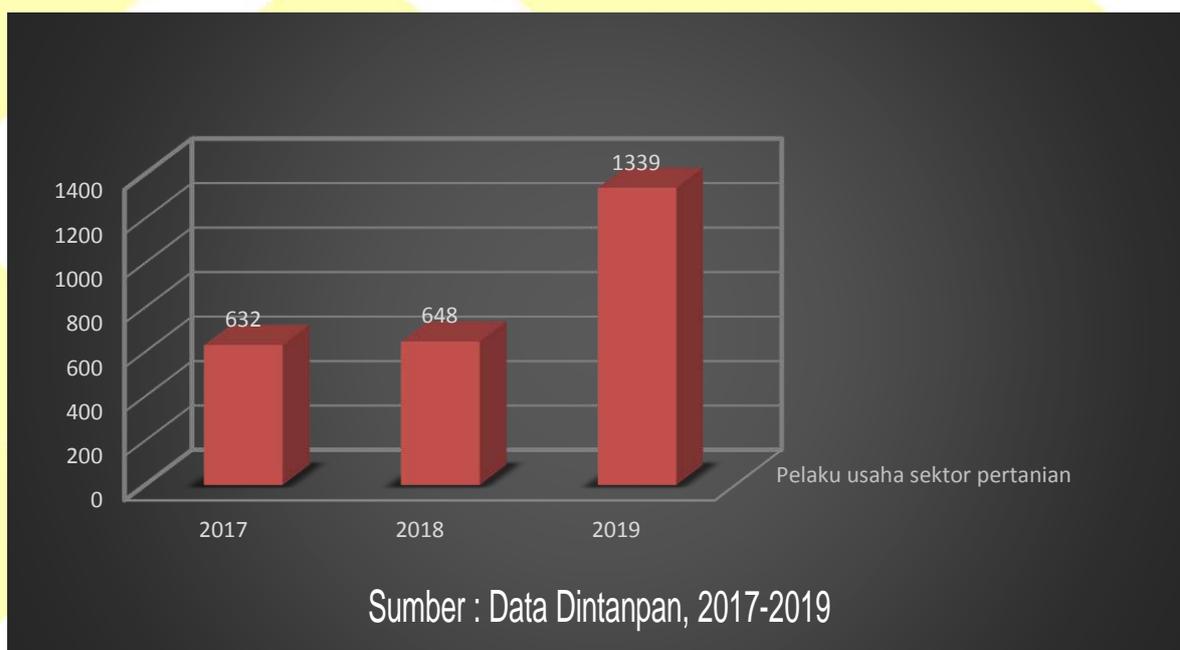
2. Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian

Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian tahun 2019 sebesar 1,78. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan indeks dua tahun sebelumnya. Adapun perkembangan peningkatan pelaku usaha di sektor pertanian selama 3 tahun terakhir tersaji pada tabel dan grafik berikut :

Tabel III.12
Pelaku Usaha Sektor Pertanian
Tahun 2017 - 2019

No.	Subsektor	2017		2018		2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	382	60,44	388	59,87	720	53,77
2.	Perkebunan	113	17,88	114	17,59	220	16,43
3.	Peternakan	137	21,68	146	22,54	399	29,80
Jumlah		632	100,00	648	100,00	1.339	100,00

Grafik III.8
Perkembangan Pelaku Usaha Sektor Pertanian di Kab. Rembang
Tahun 2017 - 2019 (Orang)



Jumlah pelaku usaha di sektor pertanian sejak tahun 2017 - 2019 angkanya mengalami kenaikan, namun kenaikannya di tahun 2019 menunjukkan sangat signifikan. Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya pelaku usaha yang belum mengajukan ijin usaha pertaniannya di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) tidak dimasukkan dalam perhitungan tersebut. Banyaknya jumlah usaha pertanian

yang belum berijin disebabkan karena sebagian besar skala usaha pertanian di Kabupaten Rembang tergolong kecil (petani gurem).

Adapun program yang mendukung sasaran Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.13

Program Pendukung Sasaran Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian

No.	Program	OPD Pengampu
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	
3.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
4.	Program Pengembangan Agribisnis	
5.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	

FAKTOR PENGHAMBAT

Tabel III.14

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Indikator Indeks Produksi Padi

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Curah hujan yang sangat rendah dan sulit dikendalikan	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sumber-sumber air yang ada; - Pembangunan embung, dam parit dan saluran pengairan untuk menampung air hujan sehingga pada musim kemarau kelangkaan air dapat dikurangi
2.	Belum optimalnya metode penanaman pada lahan sehingga kurang memperhatikan curah hujan	Mendorong penerapan pola tanam yang baik (pola tanam jajar legowo)
3.	Serangan hama penyakit tanaman padi	Melaksanakan sekolah lapangan penanggulangan hama penyakit tanaman (SLPHT) padi

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
4.	Harga jual yang rendah pada saat panen raya tiba karena penentuan harga jual oleh satu pihak yaitu tengkulak	Mendorong peran BULOG untuk bekerja sama dengan kelompok tani/ gapoktan untuk menampung gabah/ beras dari petani pada saat panen raya

FAKTOR PENDORONG

Faktor Pendorong Tercapainya Kinerja Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian :

1. Tumbuhnya pelaku usaha jasa gudang penyimpanan gabah dan pengeringan padi yang terintegrasi dengan RMU (*Rice Milling Unit*);
2. Optimalisasi mekanisasi pertanian guna mengatasi kelangkaan dan mahal nya tenaga kerja;
3. Melakukan efisiensi dalam budidaya pertanian dengan membentuk unit-unit Usaha Pelayanan Jasa Alat mesin pertanian (UPJA) pada tingkat kelompok tani/ gapoktan berupa fasilitasi bantuan alat mesin pertanian maupun swadaya kelompok.



Sasaran 5

Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan



Rapat Koordinasi Pengembangan Ekspor Kabupaten Rembang Tahun 2019

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya

kelestarian lingkungan hidup" dan juga untuk mencapai tujuan "Meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan".

Sasaran meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sasaran dari arah kebijakan peningkatan fasilitas perdagangan dengan pengembangan pasar tradisional; peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran; serta pengembangan industri skala kecil dan menengah. Dengan meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan maka pendapatan dan kesejahteraan pedagang dan pelaku industri turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran kelima ini didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan pencapaian untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan. Untuk mengukur sasaran ke enam tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,46% dengan kategori predikat sangat tinggi.

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor industri dan Perdagangan Tahun 2019

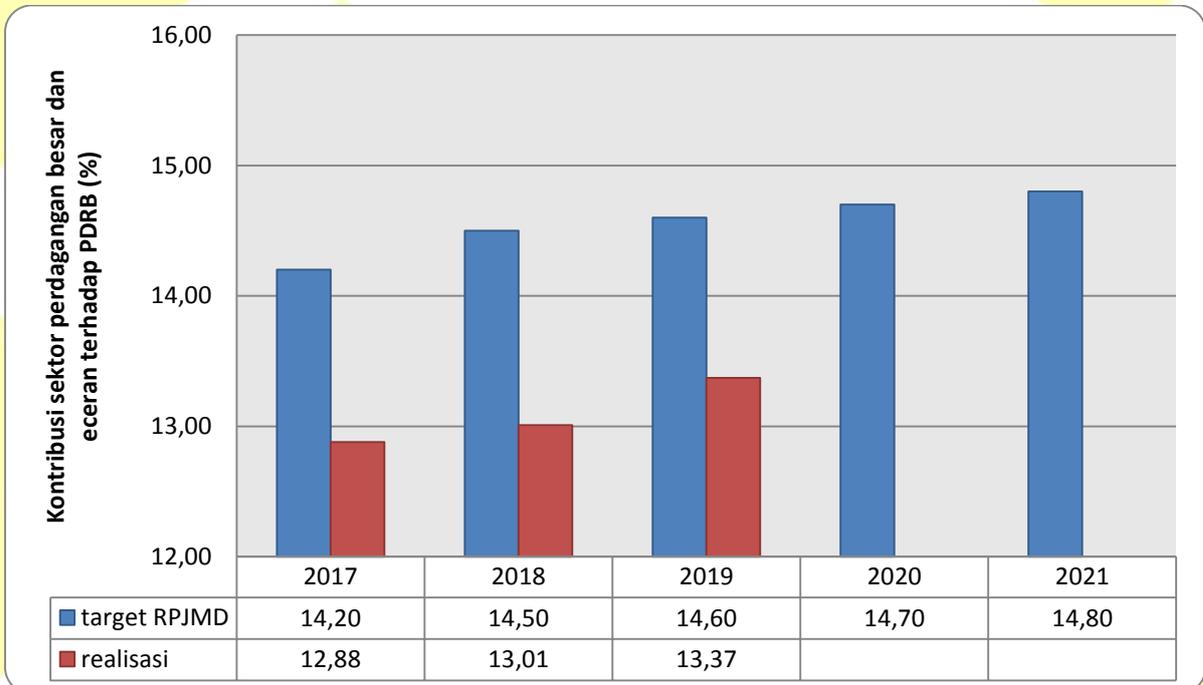
No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		% Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB (%)	14,60	13,72	93,97	Sangat Tinggi
2	Kontribusi sektor industri pengolahan (%)	21,6	23,10	106,94	
Rata-rata Capaian Kinerja		100,46			

1. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB (%)

Untuk melihat apakah pencapaian terhadap sasaran berhasil atau tidak, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah membandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Berikut data Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB (%) tahun 2017-2019 :

Grafik III.9

Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%) Tahun 2017-2019

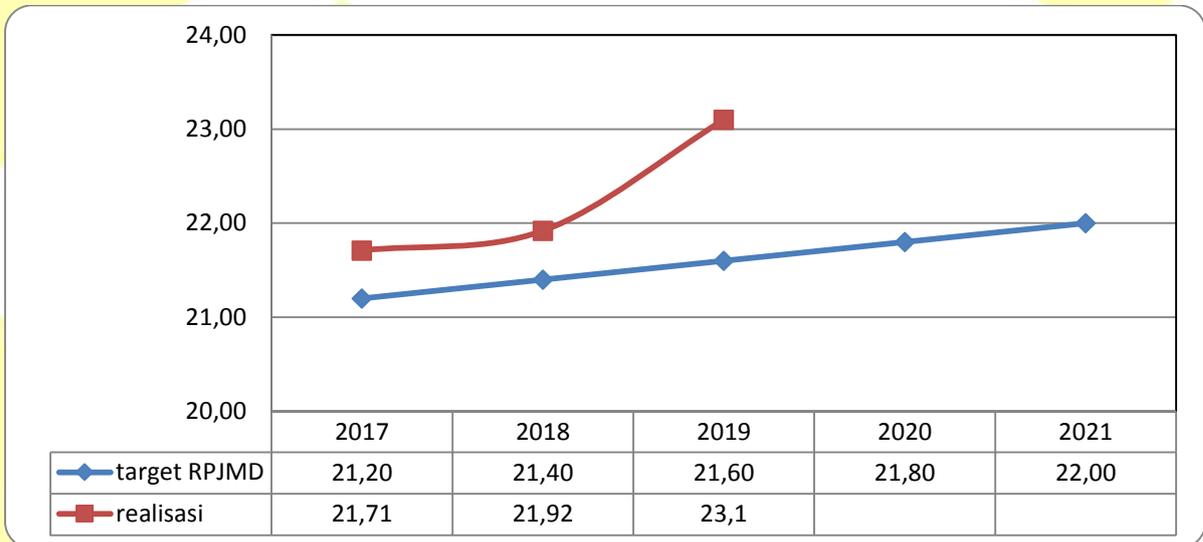


Realisasi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB selama 3 tahun terakhir (dari tahun 2017-2019) mengalami peningkatan, akan tetapi masih dibawah target RPJMD. Secara berurutan data tahun 2017-2019 adalah 12,88%, 13,01% dan 13,37%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu satu tahun di Kabupaten Rembang. Dengan realisasi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB yang masih dibawah target RPJMD, maka perlu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut selama 2 tahun mendatang.

2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Untuk melihat apakah pencapaian terhadap sasaran berhasil atau tidak, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah membandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Berikut data kontribusi sektor industri pengolahan tahun 2017-2019 :

Grafik III.10
Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)
Tahun 2017-2019



Realisasi kontribusi sektor industri pengolahan selama 3 tahun terakhir (dari tahun 2017-2019) mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari target RPJMD. Secara berurutan data tahun 2017-2019 adalah 21,71%, 21,92% dan 23,10%. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu satu tahun di Kabupaten Rembang.

Adapun program yang mendukung sasaran Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.16
Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor industri dan perdagangan

No.	Program	OPD Pengampu
1.	Program peningkatan kemitraan usaha perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	Program pembangunan sarana dan prasarana distribusi	
3.	Program promosi produk unggulan daerah	
4.	Program pengembangan produk unggulan daerah	

No.	Program	OPD Pengampu
5.	Program peningkatan kemetrolgian dan perlindungan konsumen	
6.	Program pengembangan sistem distribusi	
7.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
8.	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	
9.	Pembinaan Lingkungan Sosial	

FAKTOR PENGHAMBAT

Tabel III.17

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Kurangnya sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Rembang, seperti belum tersedianya pusat perbelanjaan yang representatif seperti mal atau pusat perbelanjaan	Merevitalisasi Pasar Rembang supaya lebih representatif dan modern melalui sinergi pembiayaan dengan Pemerintah Pusat
2.	Belum meratanya pasar daerah di Kabupaten Rembang (masih ada 4 kecamatan yang belum memiliki pasar daerah, yaitu Kecamatan Kaliori, Bulu, Sluke, dan Pancur)	Mendorong perang Swasta dalam mengoptimalkan CSR Perusahaan untuk menjalin kemitraan Pemerintah Daerah untuk membangun pasar daerah di kecamatan
3.	Bergesernya cara belanja sebagian masyarakat dari <i>offline</i> menjadi online yang transaksi perdagangannya menjadi kurang terdeteksi	Memperbaiki pasar daerah dalam memberikan pelayanan, penyajian dan harga kompetitif produk kepada pelanggan

FAKTOR PENDORONG

Faktor Pendorong Tercapainya Kinerja Kontribusi Sektor Industri Pengolahan :

1. Meningkatkan kemampuan (daya) atau usaha SDM industri pengolahan guna meningkatkan nilai suatu barang;
2. Pengelolaan SDA (air, sumber energi dan bahan mentah) sebagai pendukung industri yang dikelola dengan baik;
3. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam berbagai hal (seperti : intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rasionalisasi);
4. Melakukan pemasaran yang baik dan berkelanjutan sehingga makin tinggi dan besar jumlah penduduk, berarti makin besar potensi pemasarannya;
5. Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan industry, melalui ketentuan perpajakan dan tarif, mendorong ekspor hasil produksi lokal (daerah), penentuan lokasi atau daerah industry, dan pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha.



Sasaran 6

Menurunnya angka pengangguran



Job Fair Kabupaten Rembang Tahun 2019

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **”Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”** dan juga untuk

mencapai tujuan **”Menurunkan angka pengangguran.”**

Sasaran meningkatnya kinerja menurunkan angka pengangguran merupakan salah satu sasaran dengan strategi “meningkatkan peluang kerja usia produktif dan perluasan lapangan usaha di daerah” melalui kebijakan *peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja*. Dengan menurunnya angka pengangguran maka menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja meningkat dan pertumbuhan lapangan kerja di Rembang membaik sehingga pendapatan tenaga kerja turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan pencapaian untuk menurunkan angka pengangguran. Untuk mengukur sasaran keenam tersebut menggunakan 1 (satu) indikator sasaran dengan angka capaian kinerja sebesar 108,40% dengan kategori predikat **sangat tinggi**.

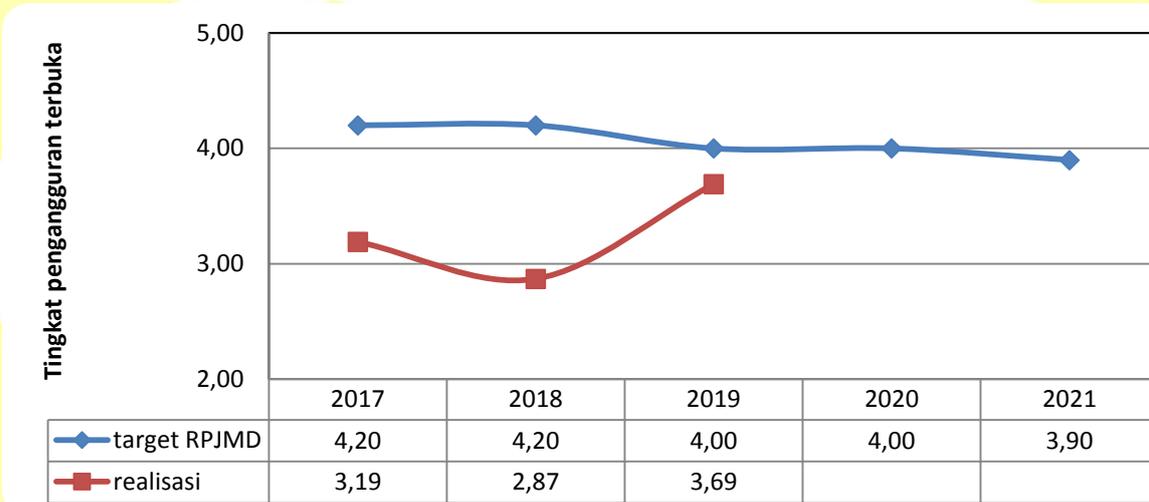
Adapun capaian terhadap sasaran Menurunkan angka pengangguran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.18
Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Pengangguran Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		% Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,00	3,69	108,40	Sangat Tinggi

Untuk melihat apakah pencapaian terhadap sasaran berhasil atau tidak, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah membandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Berikut data Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017-2019 :

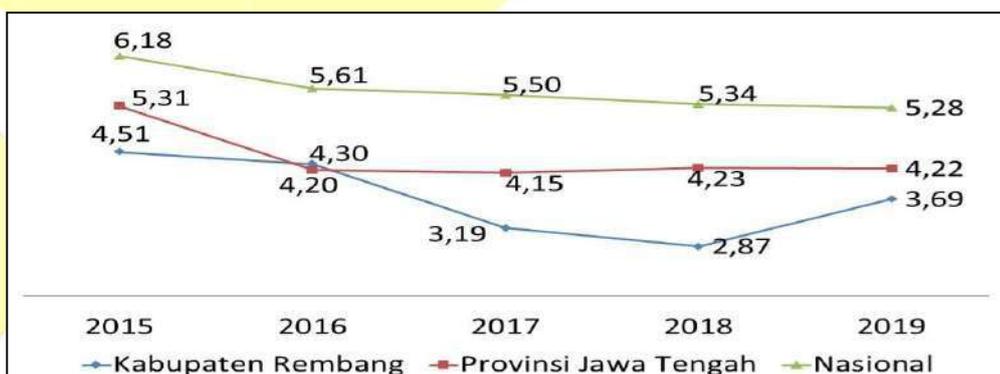
Grafik III.11
Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Tahun 2017-2019



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil realisasi TPT, semakin baik kinerjanya dalam menurunkan angka pengangguran. Realisasi TPT tahun 2019 adalah sebesar 3,69 %, kinerja ini naik apabila dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 2,87 % dan 2017 sebesar 3,19 %. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 3,90 % pada Tahun 2021, telah melampaui target tersebut.

Realisasi TPT Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir yang dibandingkan dengan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, seperti tersaji dalam grafik berikut ini.

Grafik III.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Rembang



Secara umum realisasi TPT 2019 didukung oleh Agregat Tenaga Kerja Tahun 2019 yang disumbang oleh : petani menyumbang 29,75 % (tertinggi), selanjutnya perdagangan besar dan eceran sebesar 21,47 % dan industri pengolahan sebesar 18,30 %.

Keberhasilan dalam pencapaian target sasaran TPT ini disebabkan adanya upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan - pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dalam memasuki dunia kerja, menyalurkan pencari kerja melalui pengembangan informasi pasar kerja dan penempatan pencari kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, selain itu penurunan tingkat pengangguran terbuka akibat meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Rembang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan di Kabupaten Rembang yang merupakan Sektor Basis dan Prospektif adalah pertambangan dan penggalian serta perdagangan. Sedangkan dari Sektor Non Basis dan Prospektif adalah industri pengolahan, listrik dan gas serta konstruksi. Sektor yang prospektif tersebut tentu berpeluang menyerap tenaga kerja yang besar.

Keberhasilan dalam realisasi pencapaian target capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait menurunnya angka pengangguran. Pada tahun 2019, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, berikut ini adalah tabel program pendukung saran besaran program, realisasi dan capaian anggaran:

Tabel III.19

Program Pendukung Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran

No.	Program	OPD Pengampu
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2.	Program peningkatan kesempatan kerja	
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
4.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	

No.	Program	OPD Pengampu
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	

FAKTOR PENDORONG

Faktor Pendorong Tercapainya Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran:

1. Meningkatkan pelatihan dan sertifikat kompetensi tenaga kerja sehingga siap bersaing di bursa perekrutan tenaga kerja di perusahaan;
2. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta dalam mengisi lowongan pekerjaan dari lulusan UPT BLK Kabupaten Rembang;
3. Memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan kewirausahaan untuk meningkatkan ketrampilan dari penganggur sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada;
4. Pemerintah Daerah terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru, mendirikan industri-industri baru yang bersifat padat karya;
5. Pemerintah Daerah terus mendorong masuknya investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja di Rembang.



Sasaran 7

Menurunnya angka kemiskinan



Meningkatnya Pengunjung di Pasar Mbrumbung Rembang

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup"**

dan juga untuk mencapai tujuan ”Menurunkan angka kemiskinan”.

Sasaran meningkatnya kinerja menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu sasaran dengan strategi “meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh berbasis validasi database kemiskinan dan akselerasi peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin” melalui kebijakan *peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada kecamatan dan desa yang masih banyak penduduk miskinnya dan meningkatkan keberdayaan penduduk miskin; dan memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan*. Dengan menurunnya angka kemiskinan maka menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran ke delapan ini didukung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan pencapaian untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk mengukur sasaran keenam tersebut menggunakan 1 (satu) indikator sasaran dengan angka capaian kinerja sebesar 91,90% dengan kategori predikat sangat tinggi.

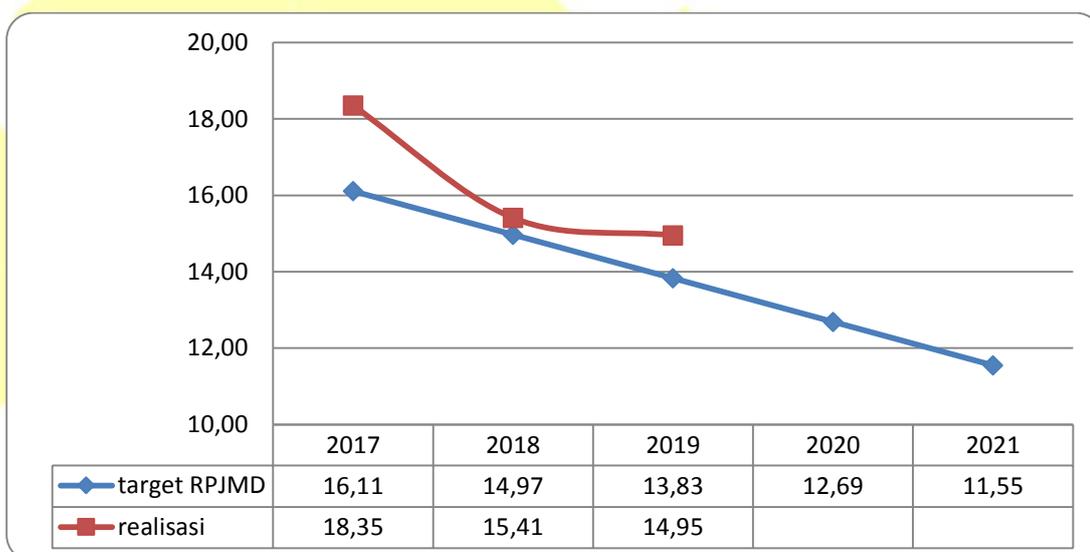
Adapun capaian terhadap sasaran Menurunkan angka kemiskinan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.20
Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		% Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1	Persentase penduduk miskin	13,83	14,95	91,90	Sangat Tinggi

Untuk melihat apakah pencapaian terhadap sasaran berhasil atau tidak, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah membandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Berikut data Persentase Penduduk Miskin tahun 2017-2019 :

Grafik III.13
Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2017 - 2019



Persentase Penduduk Miskin atau Tingkat Kemiskinan merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil realisasi persentase penduduk miskin, semakin baik kinerjanya dalam menurunkan angka kemiskinan. Realisasi persentase penduduk miskin tahun 2019 adalah sebesar 14,95 %, kinerja ini lebih baik apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 15,41 % dan 2017 sebesar 18,35 %. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 11,55 % pada tahun 2021, masih jauh dari target yang diharapkan.

Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir yang dibandingkan dengan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, seperti tersaji dalam grafik berikut ini.

Grafik III.14

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang



Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dalam 6 tahun terakhir masih tinggi dibanding Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kendati belum memenuhi target RPJMD, secara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Rembang semakin menurun hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan sudah semakin menyempit dan bersifat homogen. Sebagai gambaran, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 95,26 ribu jiwa (dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 97,44 ribu jiwa). Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada 2 tahun terakhir terlihat mempunyai kecenderungan menurun. Kondisi tersebut tentunya sangat baik, karena penduduk miskin Kabupaten Rembang berkurang cukup baik hingga 2,18 ribu orang selama dua tahun terakhir.

Untuk garis kemiskinannya pada Tahun 2019 sebesar Rp 384.561,- (dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 354.443,-). Artinya bahwa besarnya konsumsi per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Rembang naik pada tahun 2019. Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena memang trend kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan diukur dari indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap/P1), sedangkan tingkat keparahan kemiskinan diukur dari indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity/P2). Ukuran P1 menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka penduduk miskin ini semakin menjauhi garis kemiskinan tersebut. Sedangkan ukuran P2 menunjukkan adanya penyebaran pengeluaran dari penduduk. Semakin tinggi nilai dari indeks ini, maka diantara penduduk miskin terjadi kesenjangan yang semakin melebar.

Pada Tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2.32 ((dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,86). Artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga tingkat perekonomian penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari Tahun 2018. Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), yang perkembangannya pada tahun 2019 sebesar 0,48 (dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,78). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 semakin menyempit dibandingkan tahun 2018.

Adapun program yang mendukung sasaran Meningkatnya Angka Kemiskinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.21
Program Pendukung Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

No.	Program	OPD Pengampu
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial	
3.	Program Keluarga Berencana	
4.	Program Peningkatan Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak	

No.	Program	OPD Pengampu	
5.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan		
6.	Program Penanganan Anak Terlantar		
7.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		
8.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
9.	Program Ketahanan Keluarga		
10.	Program Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin		
11.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12.	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
13.	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal		
14.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
15.	Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
16.	Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru		
17.	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah		
18.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah		
19.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
20.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
21.	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak		
22.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
23.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		

No.	Program	OPD Pengampu
24.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	
26.	Program Pengembangan Nelayan Kecil	
27.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
28.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	
30.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	
31.	Program Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
32.	Program desa mandiri pangan	
33.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
34.	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	



Tabel III.22

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Menurunkan Angka Kemiskinan

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Dukungan SDM aparatur Pemerintah yang kurang optimal di semua level pemerintah dengan komitmen yang rendah	Penguatan komitmen seluruh pimpinan baik Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa untuk mendukung kinerja penanggulangan kemiskinan
2.	Belum meluasnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penanggulangan kemiskinan	Perlunya menggandeng seluas-luasnya dunia usaha untuk terlibat secara aktif dalam penanggulangan kemiskinan melalui CSR dan melakukan fasilitasi terhadap kegiatan CSR satu pintu;

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
3.	Belum optimalnya peran Pokja TKPK di semua tingkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Reaktifasi pokja TKPK agar berfungsi dengan baik dan mendorong terwujudnya pelayanan CSR; - Optimalisasi pembentukan kelembagaan TKPK ditingkat kecamatan dan desa yang diprioritaskan untuk dibentuk pada tahun 2020 agar jangkauan program lebih tepat dan cepat
4.	Penggunaan data kemiskinan yang berbeda-beda	<ul style="list-style-type: none"> - Single data penduduk miskin (by name, by address, by case) DTKS Kabupaten Rembang dijadikan sebagai dasar penentuan target sasaran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; - Database terupdate pada pengembangan aplikasi SI Nangkis untuk mempermudah penyajian data (by name by address dan data terpilah) dan sinkronisasi dokumen perencanaan serta realisasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diakses oleh masing-masing OPD sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan; - Pelaporan melalui aplikasi SI Nangkis secara online yang dapat diakses dan dipantau langsung oleh Ketua TKPK; - Ikut mengawal dan mendampingi updating DTKS yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kondisi dinamika yang berubah di masyarakat melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM);

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
5.	Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berdampak langsung pada masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk pendampingan kegiatan yang berkesinambungan dan intervensi kegiatan untuk mencapai sasaran langsung, serta kegiatan yang outputnya berdampak langsung pada masyarakat miskin; - Optimalisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pendampingan desa oleh OPD sesuai dengan keputusan Bupati sudah dilakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala



Sasaran 8

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup



Hutan Mangrove Rembang

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya**

daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup" dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup"**.

Sasaran meningkatnya kinerja meningkatkan kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran dengan strategi "meningkatkan kelestarian SDA dan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan

kualitas lingkungan secara berkala” melalui kebijakan *peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH; serta pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian degradasi SDA*. Dengan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup maka masyarakat akan terpenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah utama dalam mengkoordinasikan pencapaian untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengukur sasaran keenam tersebut menggunakan 1 (satu) indikator sasaran dengan angka capaian kinerja sebesar 96,18% dengan kategori predikat **sangat tinggi**.

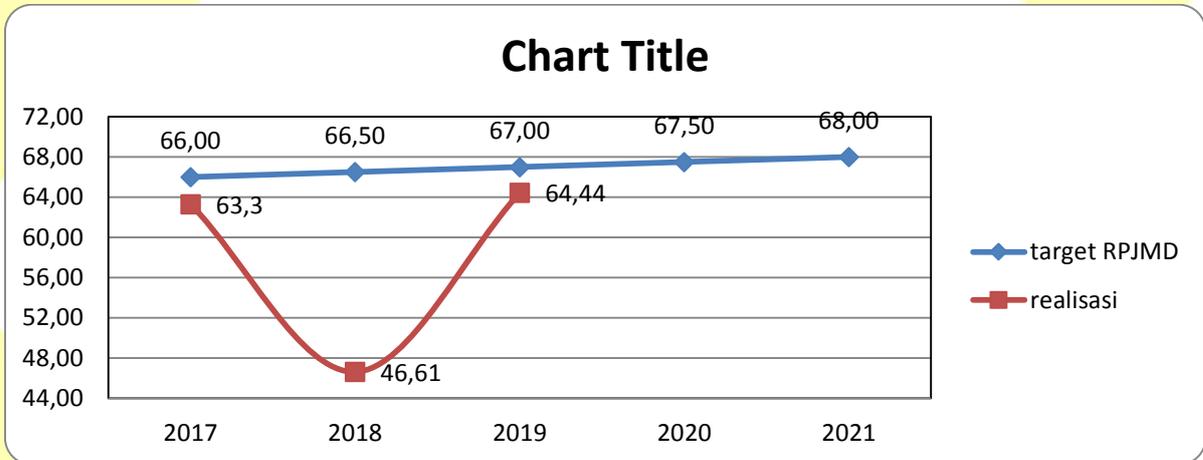
Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.23
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		% Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67	64,44	96,18	Sangat Tinggi

Untuk melihat apakah pencapaian terhadap sasaran berhasil atau tidak, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah membandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Berikut data IKLH tahun 2017-2019 :

Grafik III.15
Target dan Realisasi IKLH
Tahun 2017-2019



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air (IKA) digunakan metode indeks pencemaran air sungai. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

Indeks kualitas udara (IKU) pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂

dan SO Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau.

Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. Realisasi IKLH masih fluktuatif dalam 3 tahun terakhir. IKLH tahun 2019 adalah sebesar 66,44%, kinerja ini lebih baik apabila dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 46,41 % dan 2017 sebesar 63,3 %. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 68% pada Tahun 2021, masih jauh dari target yang diharapkan. Realisasi IKLH tahun 2019 ini dipengaruhi oleh realisasi 3 komponen pendukung, yaitu IKA = 43,85; IKU = 93,05; dan 58,42.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2019 di Kabupaten Rembang sebesar 64,44. Realisasi ini sedikit dibawah Nasional, data IKLH Nasional terbaru pada tahun 2018 sebesar 65,14. Untuk Data IKLH Nasional tahun 2019 belum tersedia.

Tabel III.24

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rembang Tahun 2019 dengan Nasional Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019	Tahun 2018
		Kabupaten Rembang	Nasional
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,44	65,14

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa Kabupaten Rembang masih dibawah Nasional. Hal ini Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menyempurnakan komponen-komponen indeks seperti menambah Indeks Kualitas Air dan indeks yang mengukur kapasitas untuk merespon tekanan dan kondisi lingkungan hidup. Prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah upaya memperbaiki dan memperkuat norma-norma sosial. Selain itu, pembangunan harus berdasarkan daya dukung dan daya tampung, prinsip pembangunan berbasis ekoregion.

Adapun program yang mendukung sasaran Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.25

Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Program	OPD Pengampu
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
4.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
5.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	
6.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
7.	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	
8.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	
9.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	

FAKTOR PENGHAMBAT

Tabel III.26

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah	Menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
2.	Kesadaran pelaku usaha masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke sungai belum semuanya memenuhi baku mutu	Pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha
3.	Belum optimalnya penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Optimalisasi program/kegiatan RTH dengan pemanfaatan tanah (Pemda dan Desa) untuk mendukung kualitas udara yang bersih
4.	Munculnya lahan kritis bekas tambang yang mempengaruhi kualitas tutupan lahan	Optimalisasi program reboisasi dan menggalakkan penanaman pohon kepada masyarakat



Sasaran 9

Meningkatnya Nilai Investasi



Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan investasi dengan**

memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan”.

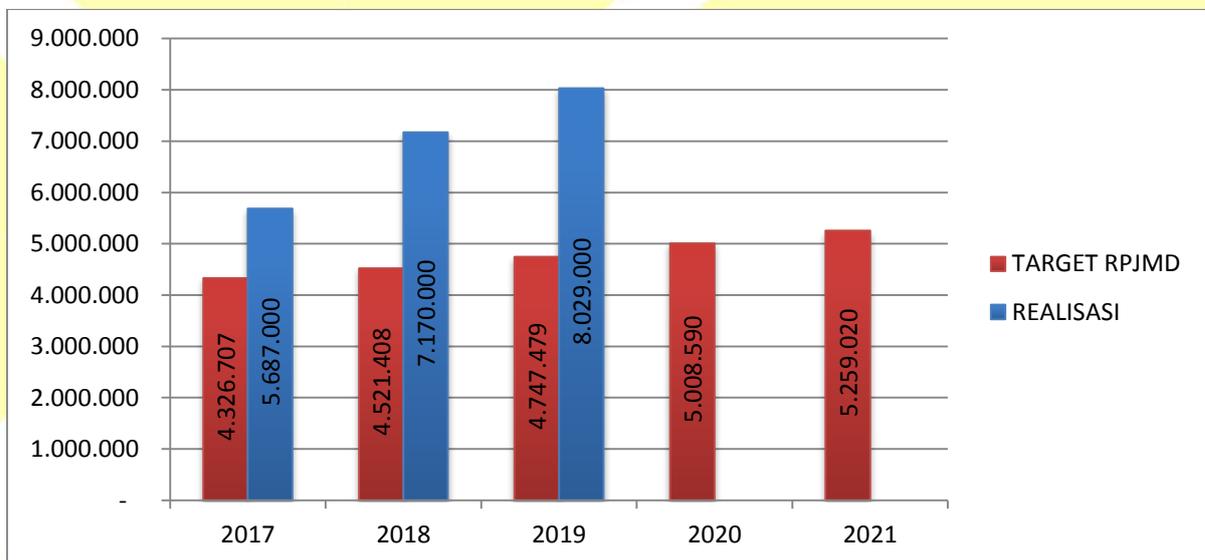
Adapun capaian terhadap sasaran meningkatnya nilai investasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.27
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		% Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Realisasi investasi PMA dan PMDN	4.747.479	8.029.000	169,12	Sangat Tinggi

Perbandingan antara target dan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami kenaikan sesuai grafik dibawah ini:

Grafik III.16
Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2017 - 2021



Dari grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan capaian sasaran meningkatnya nilai investasi dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 sebesar 131,48%, tahun 2018 sebesar 158,62% dan tahun 2019 sebesar 169,12%. Capaian ini menunjukkan semakin berkembangnya investasi lokal dari tahun ke tahun.

Realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2019 di Kabupaten Rembang adalah sebesar 8,029 triliun sedangkan tingkat Nasional Tahun 2019 sebesar Rp 809,6 triliun sehingga dapat dihitung Proporsi realisasi PMA dan PMDN pada Tahun 2019 di Kabupaten Rembang terhadap Tingkat Nasional adalah sebesar 1%. Adapun Kontribusi terbesar berasal dari penanaman modal asing (PMA) yang sebesar Rp 423,1 triliun dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 386,5 triliun.

Tabel III.28
Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Rembang dengan Nasional
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019	
		Kabupaten Rembang	Nasional
1.	Realisasi investasi PMA dan PMDN	8,029 triliun	809,6 triliun

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2019 di Kabupaten Rembang hanya 1% dibanding Nasional. Hal ini perlu terobosan dan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menarik investor untuk berinvestasi ke Rembang.

Keberhasilan capaian sasaran *meningkatnya* nilai investasi didukung dengan beberapa program sesuai tabel dibawah ini :

Tabel III.29
Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

No	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	DPMPPTSPNAKER
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	DPMPPTSPNAKER
3.	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	DPMPPTSPNAKER
4.	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	DPMPPTSPNAKER

No	Program	Perangkat Daerah Pengampu
5.	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	DPMPPTSPNAKER
6.	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	DPMPPTSPNAKER

FAKTOR PENDORONG

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan yaitu:

1. Iklim investasi yang kondusif;
2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Mempunyai profil investasi dalam rangka fasilitasi pengembangan penanaman modal;
4. Dilaksanakan *job fair* Kabupaten Rembang dalam rangka memberikan kesempatan kepada dunia usaha dalam mencari tenaga kerja yang kompeten;
5. Sosialisasi kemudahan dalam pengurusan perizinan dan fasilitasi penanaman modal bagi pengusaha atau investor.



Sasaran 10

Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif



EVENT : REMBANG EXPO

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan**

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.30
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%Capaian	Predikat
		Target	Realisasi	Tahun 2019	
1.	Rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk (%)	8,75	6,27	71,66	sedang

Capaian kinerja sasaran meningkatkan jumlah UMKM mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 hanya mencapai 71,66%, lebih rendah dari capaian tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini dikarenakan pemberdayaan industri kecil dan menengah belum sepenuhnya berhasil. Dukungan dari pemerintah daerah dalam hal fasilitasi penyediaan tenaga kerja dan permodalan usaha masih belum maksimal.

Rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kami sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.31
Rasio Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah UMKM	39.173	39.632	39.830	40.030
Jumlah Penduduk	626.136	628.901	633.211	638.215
Rasio UMKM terhadap jumlah penduduk (%)	6,26	6,30	6,29	6,27

Sumber: Dinindagkopukm Kab. Rembang (2020) dan BPS Kab. Rembang (2019)

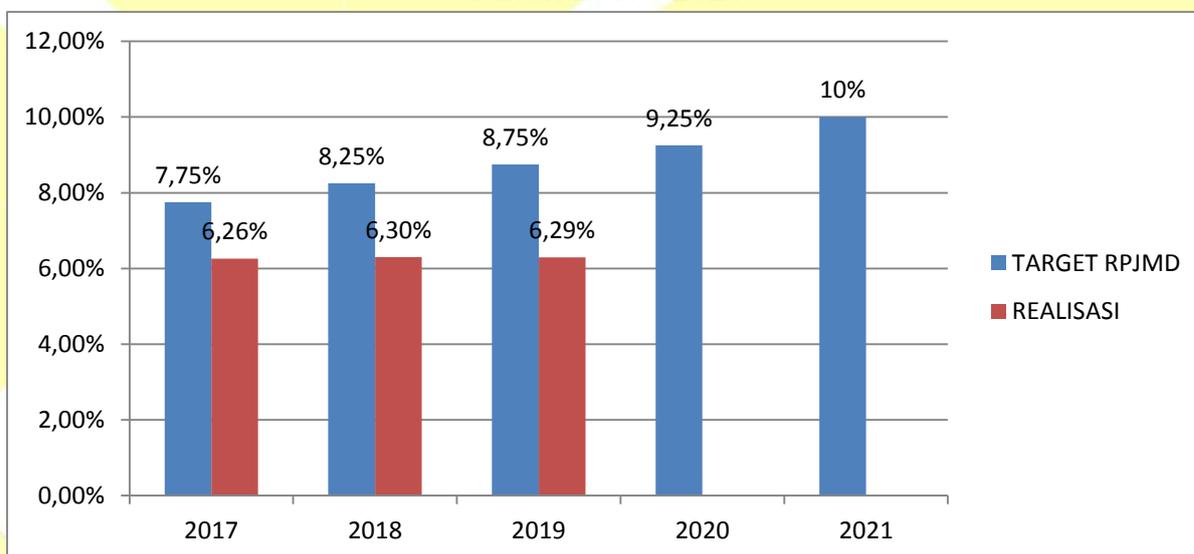
Jika dibandingkan dengan capaian standar nasional tahun 2019 maka capaian indikator kinerja rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Rembang lebih tinggi, sesuai tabel berikut :

Tabel III.32
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang dengan Capaian Standar Nasional

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten Tahun 2019	Capaian Standar Nasional tahun 2019
1.	Rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk (%)	6,27	3,1

Perbandingan antara target dan realisasi rasio UMKM terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan sesuai grafik dibawah ini :

Grafik III.17
Target dan Realisasi Rasio Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2021



Dari grafik diatas menunjukkan penurunan pada capaian sasaran meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi 6,27% di tahun 2019.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif didukung dengan beberapa program sesuai tabel dibawah ini:

Tabel III.33
Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif

No	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinindakop UKM
2.	Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha	Dinindakop UKM
3.	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Dinindakop UKM
4.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Dinindakop UKM
5.	Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru	Dinindakop UKM

FAKTOR PENGHAMBAT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Menurunnya capaian sasaran ini dikarenakan beberapa faktor penghambat terealisasinya target yang ditetapkan yaitu :

Tabel III.34
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif

NO	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Rendahnya semangat berwirausaha (<i>entrepreneurship</i>)	Melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha
2.	Masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah belum mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha.	Peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam manajemen usaha, pengembangan produk, akses permodalan, pemasaran, dan teknologi

NO	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
3.	Minimnya modal usaha bagi pelaku usaha	Memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha



Sasaran 11
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah



Destinasi Wisata Museum Kartini

Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif”

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **”Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”** dan juga untuk mencapai tujuan **”Meningkatkan Ekonomi**

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Kontribusi Pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.35

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		(%) Capaian	Predikat
		Target	Realisasi	2019	
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	2,3 %	2,05 %	89,1 %	Tinggi

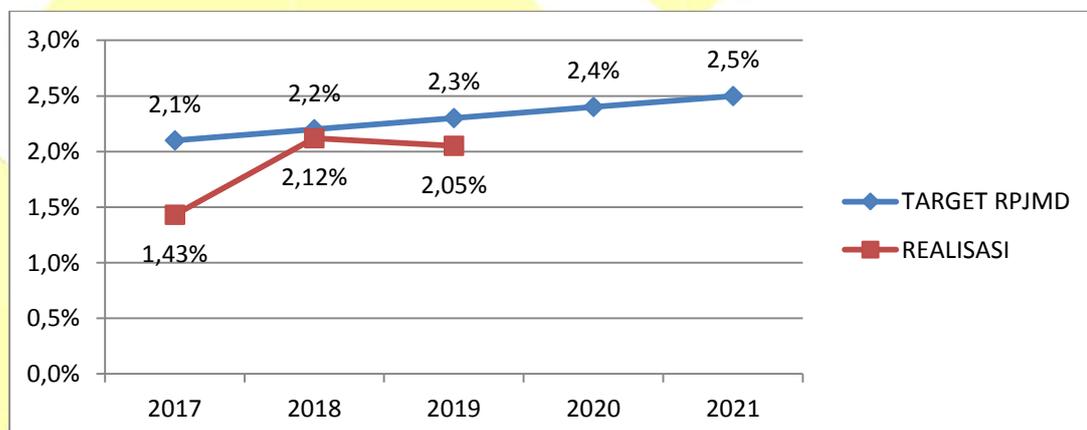
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel. III.36
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
Tahun 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1.	Pajak Hotel	900.947.867	1.547.385.331	1.465.605.218
2.	Pajak Restoran	3.079.057.000	3.645.146.314	3.965.309.311
3.	Pajak Hiburan	199.842.500	242.073.750	226.960.488
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	368.331.500	1.025.057.000	666.137.500
	Jumlah	4.548.178.867	6.459.662.395	6.324.012.517
	Total Keseluruhan PAD Kabupaten Rembang	318.032.887.325	305.691.394.431	308.691.487.670
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,43%	2,12%	2,05%

Hasil capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,05% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,12%. Hal ini dikarenakan pengelolaan pariwisata belum sepenuhnya profesional serta belum meningkatnya daya saing. Hal tersebut dapat dijelaskan sesuai grafik dibawah ini.

Grafik III.18
Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
Tahun 2017 - 2021



Untuk mencapai sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah didukung dengan beberapa program sesuai tabel dibawah ini :

Tabel III.37

Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah

No	Program Pendukung	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
2.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR

FAKTOR PENGHAMBAT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Penurunan capaian sasaran ini dikarenakan beberapa faktor penghambat terealisasinya target yang ditetapkan yaitu :

Tabel III.38

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Kunjungan wisata masih sebatas wisatawan lokal, belum mencakup wisatawan nusantara bahkan manca negara	Melakukan promosi pariwisata secara masif baik melalui media, cetak maupun elektronik
2.	Akses menuju tempat wisata masih kurang memadai	Peningkatan akses atau infrastruktur menuju tempat wisata
3.	Wahana di tempat wisata belum menarik dan variatif	Menciptakan dan menambah wahana wisata yang menarik
4.	Pelayanan yang diberikan SDM pelaku pariwisata belum sepenuhnya baik	Melakukan pelatihan SDM kepariwisataan
5.	Jumlah objek wisata yang masih sedikit	Menumbuhkan destinasi wisata baru melalui pembentukan Desa Wisata



Sasaran 12

Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan



Pemerataan Kualitas Pembangunan Jalan di Kabupaten Rembang

Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan" dan juga untuk mencapai tujuan "Meningkatkan Pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur"

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.39

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian (%)	Predikat
		Target	Realisasi	2019	
1.	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik	72,43%	85,53%	118,09%	Sangat tinggi
2.	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik	85,71%	92,06%	107,41 %	
Rata - rata				112,75 %	

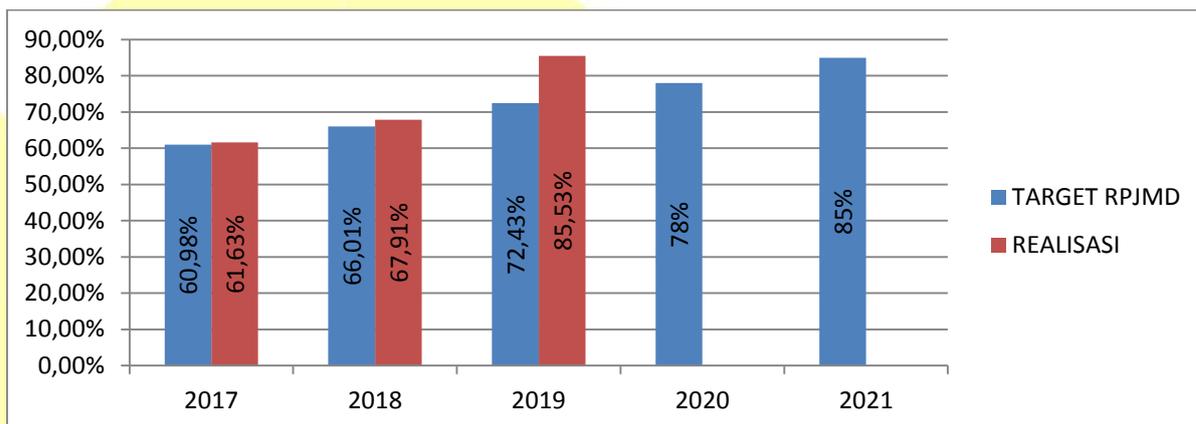
Sumber : DPUTARU Kabupaten Rembang

1. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik

Capaian indikator presentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini dijelaskan pada grafik dibawah ini :

Grafik III.19

Target dan Realisasi Persentase Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 - 2021



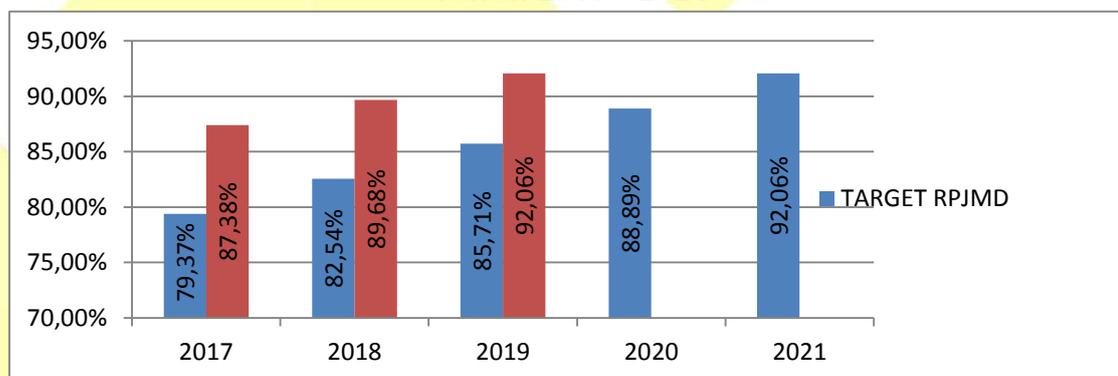
Aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2019 sebanyak 163 ruas jalan dari total 191 ruas jalan. Menunjukkan tercapainya target yaitu 72,43% terealisasi 85,53%. Artinya jalan kabupaten sepanjang 508,13 Km dalam kondisi baik dari total panjang jalan 594,10 Km.

2. Persentase jembatan dalam kondisi baik

Capaian indikator persentase jembatan dalam kondisi baik mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini dijelaskan pada grafik dibawah ini

Grafik III.20

Target dan Realisasi Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 - 2021



Aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik yaitu target tahun 2019 sebesar 85,71% terealisasi 92,06 % dari total jumlah jembatan kewenangan Kabupaten Rembang. Artinya sejumlah 116 unit dalam kondisi baik, dari total jumlah 126 unit.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, didukung dengan program sebagai berikut :

Tabel III.40

Program yang Mendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan

No.	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPU TARU
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPU TARU
3.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	DPU TARU

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan adalah sebesar 112,75% sehingga bisa dikatakan termasuk dalam kategori sangat tinggi dan telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 33,67 % Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \left\{ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right\} \\
 &= 112,49 \% - \left\{ \frac{50.396.529.786}{75.348.250.400} \times 100 \% \right\} \\
 &= 33,67
 \end{aligned}$$

FAKTOR PENDORONG

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jalan dan jembatan di wilayah selesai tepat waktu;
2. Adanya pemeliharaan dan penambahan perlengkapan jalan dan jembatan secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi;
3. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan program dan kegiatan;
4. Tersedianya anggaran yang cukup.



Sasaran 13

Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni



Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur"**

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Jumlah Rumah Layak Huni dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.41

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		(%) Capaian	Predikat
		Target	Realisasi	2019	
1.	Persentase rumah tidak layak Huni yang direhabilitasi/ditangani	9,35	22,49	240,54	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Dari tabel diatas menunjukkan capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dengan indikator Prosentase RTLH yang direhabilitasi/ditangani sebesar 22,49% dari target 9,35%. sebagaimana dijelaskan dalam table di bawah ini :

Tabel III.42

Jumlah RTLH yang direhabilitasi / ditangani dari 2016 - 2019

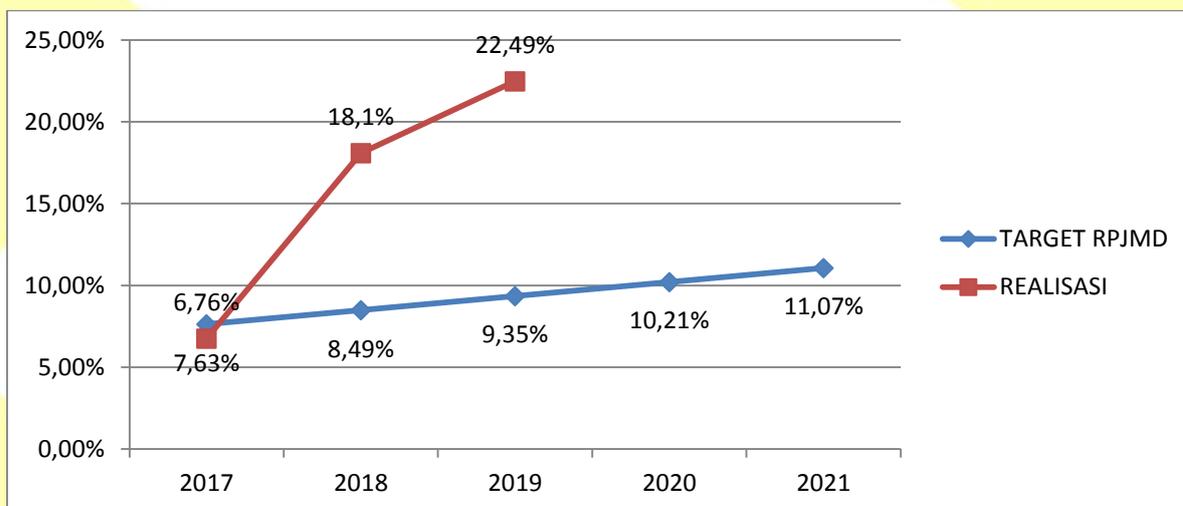
Jumlah RTLH sesuai PBDT 2015	Tahun	RTLH yang direhabilitasi/ditangani per tahun	Total RTLH yang direhabilitasi/ditangani	Persentase
59.453	2016	4.019 unit	4.019 unit	6,76 %
	2017	4.536 unit	8.555 unit	14,39 %
	2018	2.206 unit	10.761 unit	18,10%
	2019	2.610 unit	13.371 unit	22,49%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dengan indikator Persentase RTLH yang direhabilitasi/ditangani, dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Sebagaimana digambarkan pada grafik dibawah ini :

Grafik III.21

Target dan Realisasi Persentase RTLH yang Direhabilitasi/Ditangani Tahun 2017 - 2021



Dari jumlah RTLH yang tertangani pada tahun 2019 telah meningkat sebanyak 4,39% dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 18,10%. Dengan demikian capaian RTLH yang direhabilitasi/ditangani telah memenuhi target sesuai RPJMD.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni, didukung dengan program sebagai berikut :

Tabel III.43
Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

No.	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Program Pengembangan perumahan	DPKP

FAKTOR PENDORONG

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi bangunan selesai tepat waktu;
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan RTLH;

3. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pemugaran rumah;
4. Tersedianya anggaran yang cukup



Sasaran 14

Meningkatnya Ketersediaan Air Baku



Embung Lodan Kec. Sedan

Sasaran strategis 14 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan**

Pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur"

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Ketersediaan Air Baku dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.44

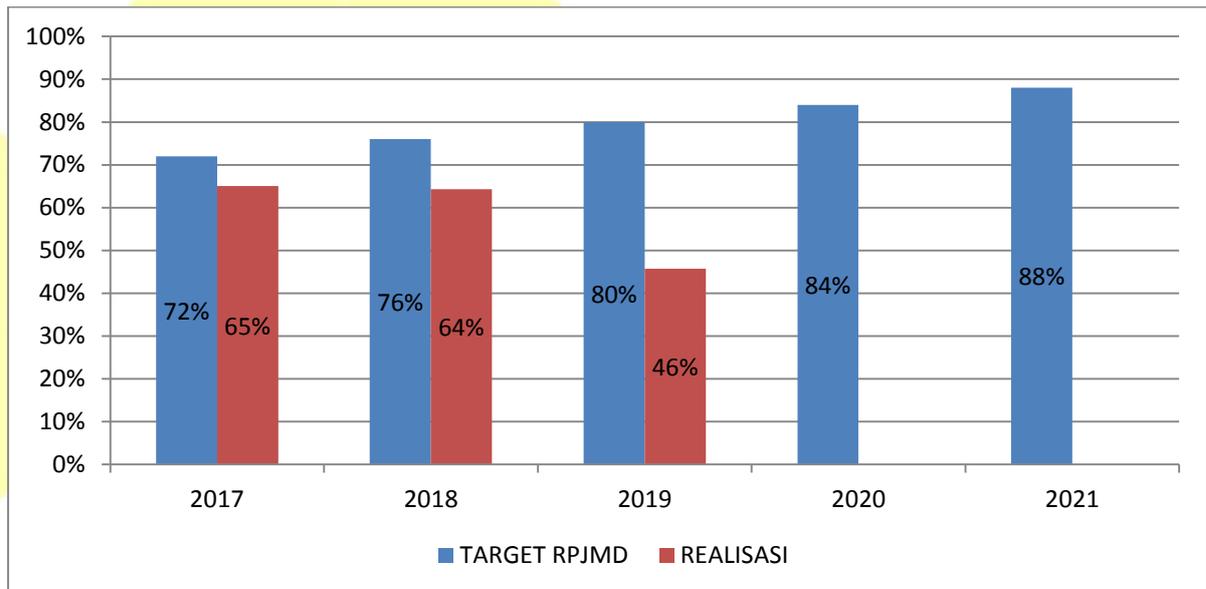
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Baku

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Persentase cakupan Air baku	80%	45,72 %	57,15 %	Rendah

Sumber : DPUTARU Kabupaten Rembang

Capaian sasaran meningkatnya ketersediaan air baku dengan indikator kinerja persentase cakupan air baku mengalami penurunan sebagaimana digambarkan pada grafik dibawah ini :

Grafik III.22
Target dan Realisasi Ketersediaan Air Baku
Tahun 2017 - 2021



Jika dibandingkan dengan capaian standar nasional tahun 2019 maka capaian indikator kinerja persentase cakupan air baku di Kabupaten Rembang lebih rendah, sesuai tabel berikut :

Tabel III.45
Perbandingan capaian indikator kinerja persentase cakupan air baku di Kabupaten Rembang terhadap capaian standar nasional

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Capaian Standar Nasional tahun 2019
1.	Persentase cakupan air baku	45,72%	76,2%

Upaya untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya ketersediaan air baku didukung dengan program sebagai berikut :

Tabel III.46

Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Baku

NO	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	DPU TARU

FAKTOR PENGHAMBAT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Menurunnya capaian sasaran ini tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat terealisasinya target yang ditetapkan yaitu :

Tabel III.47

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Baku

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Belum optimalnya pengelolaan air baku dalam hal ini masih ada air baku yang belum di maksimalkan penggunaannya	Pengadaan Pamsimas pada lokasi yang tersedia air baku
2.	Tidak adanya kegiatan pembuatan Embung dan Bendung baru, karena terkendala aturan dan rumitnya masalah pembebasan lahan	Mengoptimalkan bangunan embung dan bendung/waduk yang sudah ada Pembangunan embung dan bendung/waduk baru
3.	Curah hujan yang rendah atau musim kemarau yang panjang	- Optimalisasi sumber-sumber air yang ada; - Pembangunan embung, dam parit dan saluran pengairan untuk menampung air hujan sehingga pada musim kemarau kelangkaan air dapat dikurangi



Sasaran 15

Meningkatnya Jumlah Pusat Pertumbuhan Baru dengan Dukungan Infrastruktur memadai



Peningkatan Infrastruktur Destinasi Wisata Karang Jahe

Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai"**

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Jumlah Pusat Pertumbuhan Baru dengan Dukungan Infrastruktur memadai dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.48

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Jumlah Pusat Pertumbuhan Baru dengan Dukungan Infrastruktur memadai.

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2019		(%) Capaian	Predikat
		Target	Realisasi	2019	
1.	Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	4	4	100	Sangat tinggi

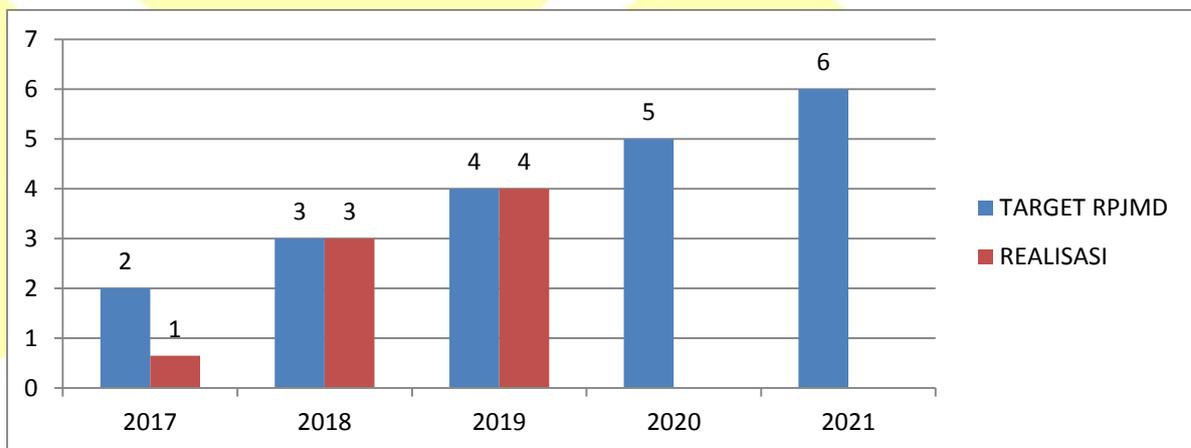
Pusat pertumbuhan baru yang berhasil dikembangkan sampai dengan tahun 2019 yaitu :

1. Pantai Karang Jahe Desa Punjul Harjo Kecamatan Rembang.
2. Wisata Hutan Mangrove Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang.
3. Pantai Pasir Putih Desa Tasikharjo Kecamatan kaliore.

4. Pantai Balongmulyo Kecamatan Kragan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran Meningkatnya jumlah pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai, sebesar 100% maka termasuk dalam kategori keberhasilan sangat tinggi. Dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami tren peningkatan sebagaimana dijelaskan grafik berikut ini:

Grafik III.23
Target dan Realisasi Jumlah Pusat Pertumbuhan Baru dengan Infrastruktur Memadai Tahun 2017 - 2021



Keberhasilan sasaran ini didukung dengan program sebagai berikut:

Tabel III.49
Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Pusat Pertumbuhan Baru dengan Dukungan Infrastruktur Memadai

NO	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	DPKP

Dengan tercapainya sasaran tersebut telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,04 % Dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian kinerja	-	Realisasi anggaran	=	Efisiensi anggaran
100 %	-	99,96 %	=	0,04 %

FAKTOR PENDORONG

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi bangunan selesai tepat waktu;
2. Perencanaan pembangunan yang selaras antara pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten;
3. Adanya partisipasi masyarakat;
4. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
5. Tersedianya anggaran yang cukup.



Sasaran 16

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019

Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”** dan juga untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan**

kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat”.

Adapun capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”** pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.50
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tahun 2019

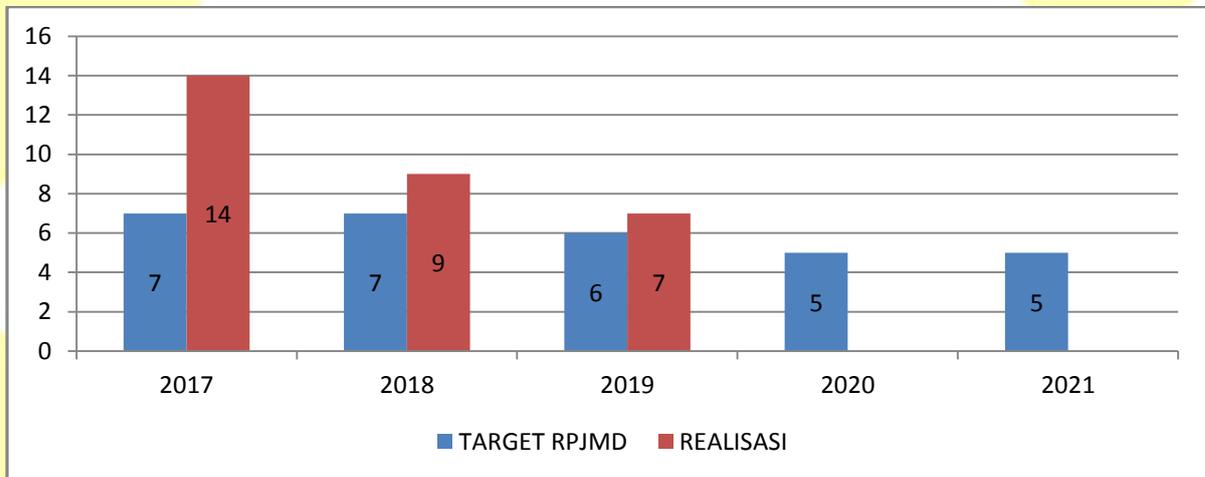
No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	AKI (Angka Kematian Ibu)	6 Kasus	7 Kasus	83,3 %	Sedang
2.	AKB (Angka Kematian Bayi)	115 Kasus	164 Kasus	57,4 %	
	Rata - Rata Capaian	70,35%			

Indikator pada sasaran ini merupakan indikator negatif dimana semakin besar realisasi maka semakin rendah tingkat capaian dan semakin kecil realisasi maka semakin tinggi tingkat capaian. Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu sebanyak 7 dari 6 kasus yang ditargetkan dengan capaian sebesar 83,3%. Sedangkan kasus kematian bayi sebanyak 164 kasus dari 115 kasus yang ditargetkan dengan capaian 57,4%. Rata - rata dari 2 (dua) indikator tersebut pada 2019 sebesar 70,35% dengan predikat sedang. Meski demikian, telah dilaksanakan beberapa intervensi dan pengendalian melalui beberapa kegiatan seperti gerakan sayang ibu, deteksi dini kehamilan sehingga per tahun realisasi kasus dapat berkurang.

1. AKI (Angka Kematian Ibu)

Angka kematian ibu adalah kematian selama kehamilan dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Indikator dimaksud menggambarkan tingkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang dimana semakin berkurang kasus kematian ibu, maka tingkat kesehatan masyarakat semakin tinggi. Adapun grafik Ketercapaian AKI (Angka Kematian Ibu) bila dibandingkan dengan target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.24
Target dan Realisasi AKI (Angka Kematian Ibu)
Tahun 2017 - 2021



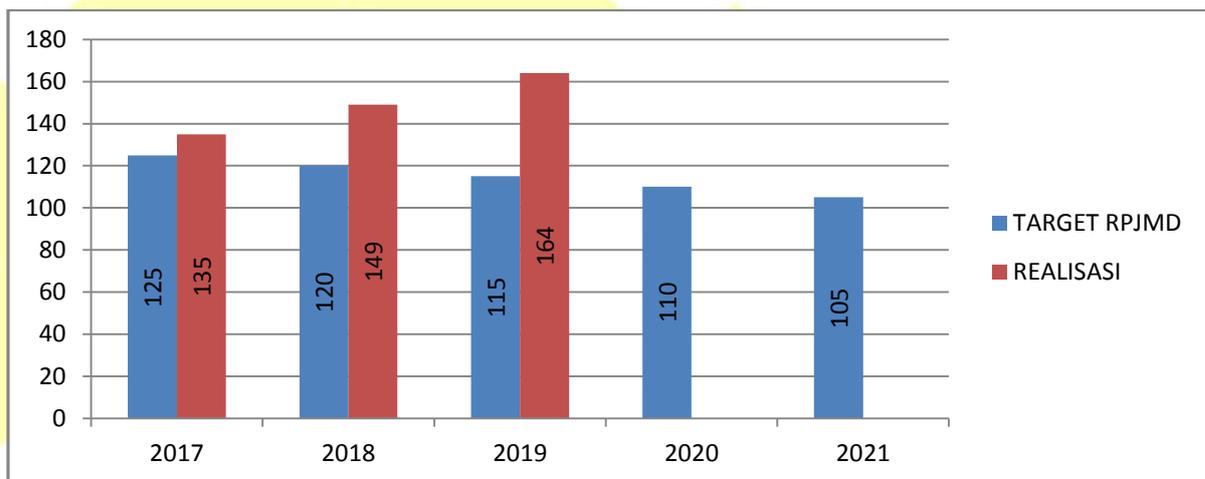
Realisasi pada indikator kematian ibu telah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Kasus terbanyak dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 terjadi di tahun 2017 sebanyak 14 kasus dan jauh berkurang menjadi hanya 7 kasus di tahun 2019. Rata - rata kematian ibu per tahun pada periode 2017 sampai dengan 2019 mencapai 10 kasus, yang berarti tiap tahunnya pada periode 2017-2019 terdapat 10 kasus kematian ibu. Sedangkan tren kasus kematian ibu di Kabupaten Rembang menurun tiap tahunnya dimulai pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebanyak 5 kasus dan pada 2018-2019 sebanyak 2 kasus. Untuk mencapai target di tahun akhir RPJMD, maka dilakukan langkah secara intensif melalui peningkatan status kesehatan perempuan ketika hamil di Kabupaten Rembang.

2. AKB (Angka Kematian Bayi)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan

tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Adapun grafik Ketercapaian AKB (Angka Kematian Bayi) bila dibandingkan dengan target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.25
Target dan Realisasi AKB (Angka Kematian Bayi)
Tahun 2017 - 2021



Realisasi pada indikator kematian bayi sebagaimana grafik diatas semakin naik per tahun. Apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD maka terdapat rata-rata gap sebanyak 29,3 kasus per tahun pada periode 2017 sampai dengan 2019. Kondisi tersebut berarti dalam periode 1 tahun terdapat sekitar 29 kasus kematian Bayi di Kabupaten Rembang. Sedangkan dari sisi tren pada tiap tahunnya terdapat kenaikan kasus kematian bayi. Tren kenaikan tersebut pada tahun 2017-2018 sebanyak 19 kasus, sedangkan pada tahun 2018-2019 sebanyak 20 kasus. Proporsi pencapaian realisasi terhadap target akhir tahun dalam jangka waktu 2 tahun mencapai 59 kasus. Meskipun begitu terhadap kenaikan realisasi kasus telah dilakukan intervensi secara simultan melalui optimalisasi Germas, penguatan Posyandu dan mendorong peremajaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Rembang.

Adapun Program dalam mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.50

Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Dinas Kesehatan
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
4	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
5	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

FAKTOR PENGHAMBAT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2019 ditampilkan dalam bagan sebagai berikut :



Bagan Permasalahan Derajat Kesehatan Masyarakat

Adapun strategi untuk mengendalikan faktor penghambat, kendala dan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :



Strategi Mengatasi Permasalahan Derajat Kesehatan Masyarakat



Sasaran 17

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah



Talkshow Halo Bupati, Bupati Rembang Mengajar

Sasaran strategis 17 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”**

dan juga untuk mencapai tujuan **“Membangun Sistem Pendidikan**

yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan”.

Adapun capaian kinerja Sasaran **“Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah”** pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.51
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019

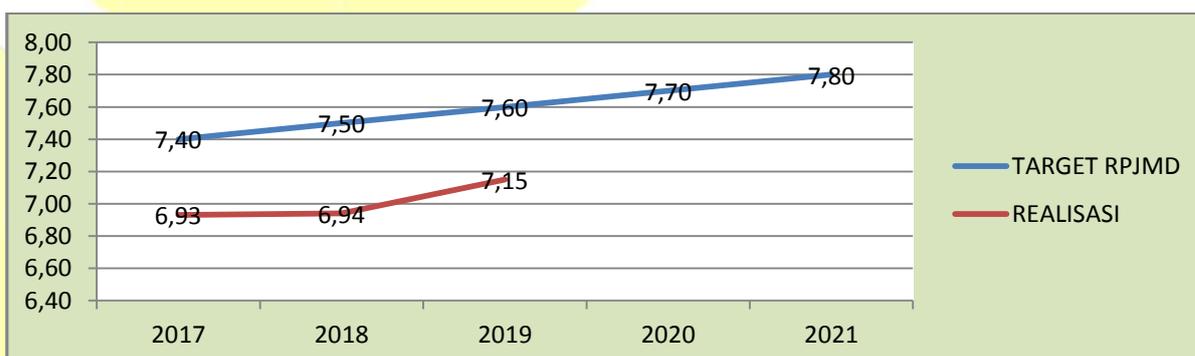
No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,6	7,15	94,1 %	Sangat Tinggi
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,2	12.10	99,1 %	
Rata - rata Capaian		96,7%			

Berdasarkan tabel diatas dapat dicermati bahwa indikator untuk sasaran Meningkatnya angka rata rata lama sekolah di Kabupaten Rembang telah mendekati target sebagaimana kolom capaian. Terdapat gap 0,45 tahun untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (tahun) dan 0,1 tahun untuk indikator Angka Harapan Lama Sekolah (tahun). Berdasarkan capaian tersebut, maka rata - rata capaian kinerja indikator yang dihitung berdasarkan interval nilai diperoleh predikat sangat tinggi.

1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) dapat diartikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun grafik Ketercapaian Rata-rata Lama Sekolah (tahun) bila dibandingkan dengan target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.26
Target dan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Tahun 2017 - 2021



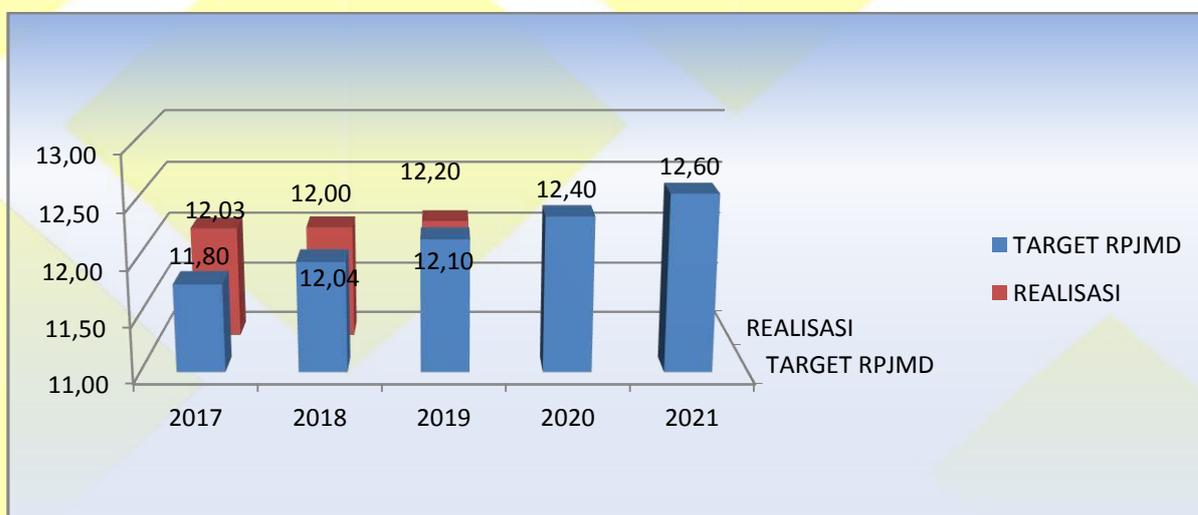
Realisasi pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (tahun) telah mengalami kenaikan dalam periode tiga tahun terakhir di Kabupaten Rembang. Pada periode tahun 2017-2018 terdapat kenaikan sebesar 0,1 tahun sedangkan pada periode tahun 2018-2019 terdapat kenaikan sebesar 0,21 tahun. Berdasarkan capaian akhir tahun 2019 maka masih terdapat gap dengan target RPJMD sebesar 0,65 tahun yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 2 tahun. Tren kenaikan dari rata-rata lama sekolah didukung dengan kebijakan pendanaan serta menempatkan program unggulan pendidikan dalam prioritas Kabupaten Rembang yang diantaranya adalah pemberian beasiswa kepada anak didik yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan daya dukung untuk terus bersekolah.

2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah secara spesifik mempengaruhi rata-rata lama sekolah dikarenakan adanya peluang untuk bersekolah sampai dengan skala umur tertentu.

Adapun grafik Angka Harapan Lama Sekolah bila dibandingkan dengan target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.27
Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah
Tahun 2017 - 2021



Realisasi Indikator sebagaimana grafik diatas dapat kita lihat bahwa angka harapan lama sekolah pada periode 3 tahun terus meningkat yaitu pada tahun 2017-2019. Peningkatan dimaksud secara berurut sebesar 0,01 tahun dan 0,06 tahun. Dengan adanya peningkatan tersebut maka secara langsung akan menyokong pencapaian sasaran rata-rata lama sekolah melalui penganangan keberlanjutan program pendidikan di Kabupaten Rembang sampai dengan jenjang pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa dan pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro yang masuk dalam kategori kampus terbaik di Indonesia.

Adapun Program dalam mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

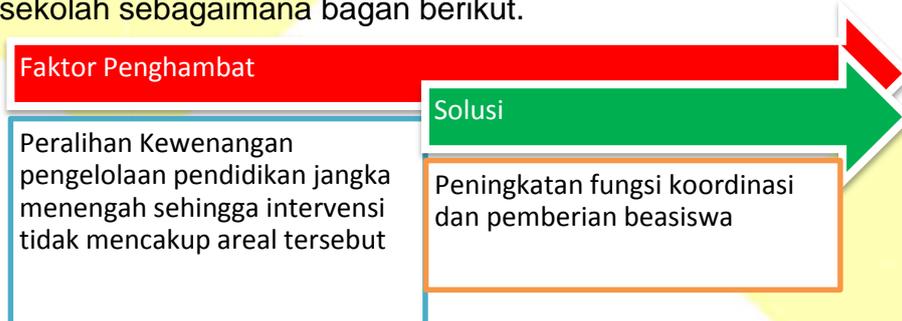
Tabel III.53

Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

FAKTOR PENGHAMBAT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang serta solusi untuk mencapai target pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah sebagaimana bagan berikut.





Sasaran 18

Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga



Rembang Juara Umum MAPSI 2019

Sasaran strategis 18 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,**

termasuk pendidikan keagamaan” dan juga untuk mencapai tujuan **“Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga”**.

Adapun capaian kinerja Sasaran **“Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga”** pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.54

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional	40	46	115 %	Sangat Tinggi

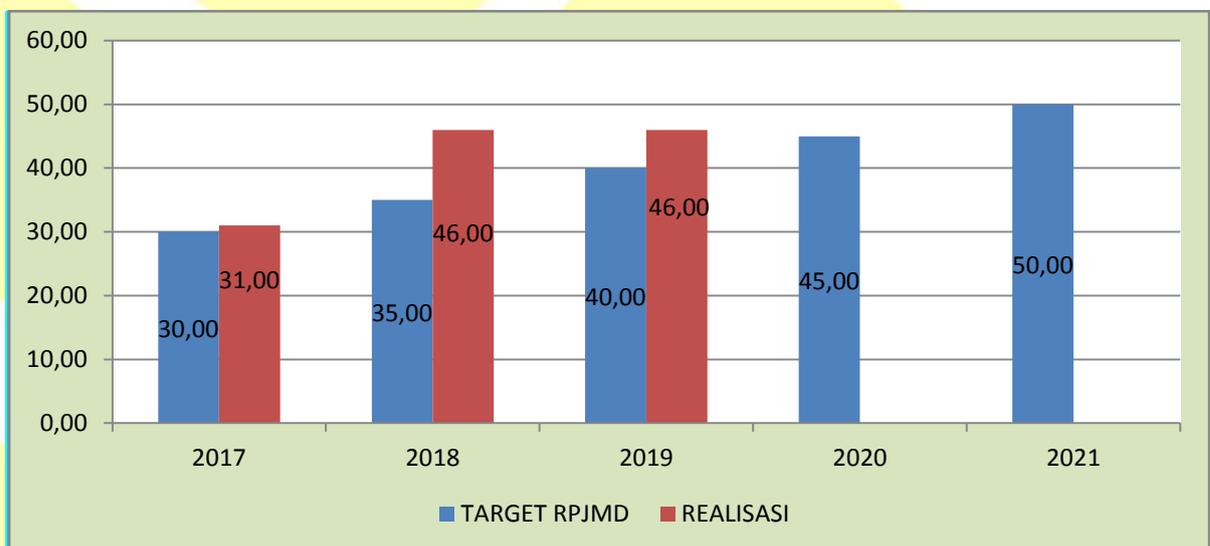
Tabel capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa realisasi capaian di tahun 2019 sebesar 115 % atau sangat tinggi. Indikator jumlah medali menunjukkan

bahwa peningkatan potensi pemuda disasar melalui pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pada bidang keolahragaan sehingga menumbuhkan prestasi di beberapa event tingkat provinsi dan nasional.

Adapun grafik Ketercapaian meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga bila dibandingkan dengan target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.28

Target dan Realisasi Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional Tahun 2017 - 2021



Berdasarkan data dalam grafik diatas maka dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional selama kurun periode tahun 2017-2019 selalu memenuhi target dalam RPJMD dan terus meningkat. Kondisi tersebut merupakan buah dari pembinaan atlet melalui serangkaian program keolahragaan di tingkat sekolah dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi sehingga dapat meningkatkan prestasi.

Adapun Program dalam mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.55
Program Pendukung Capaian Sasaran
Meningkatnya Potensi Pemuda Dan Prestasi Olahraga

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program Pengembangan dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

FAKTOR PENDORONG

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga adalah sebagai berikut :

1. Melimpahnya sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan keolahragaan meliputi peserta didik tingkat dasar dan menengah sehingga dalam pemilihan atlet yang berpotensi dapat lebih selektif;
2. Pembinaan berjenjang melalui kegiatan olahraga prestasi unggulan, sehingga atlet maupun pemuda dengan prestasi yang unggul dapat meningkatkan prestasi di bidang keahliannya.



Sasaran 19

Menurunnya Kasus Gangguan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



SATPOL PP Kab. Rembang Razia pelajar yang bolos sekolah

Sasaran strategis 19 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan"** dan juga untuk mencapai tujuan

"Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat"

Adapun capaian terhadap sasaran Menurunnya Kasus Gangguan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.56

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kasus Gangguan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

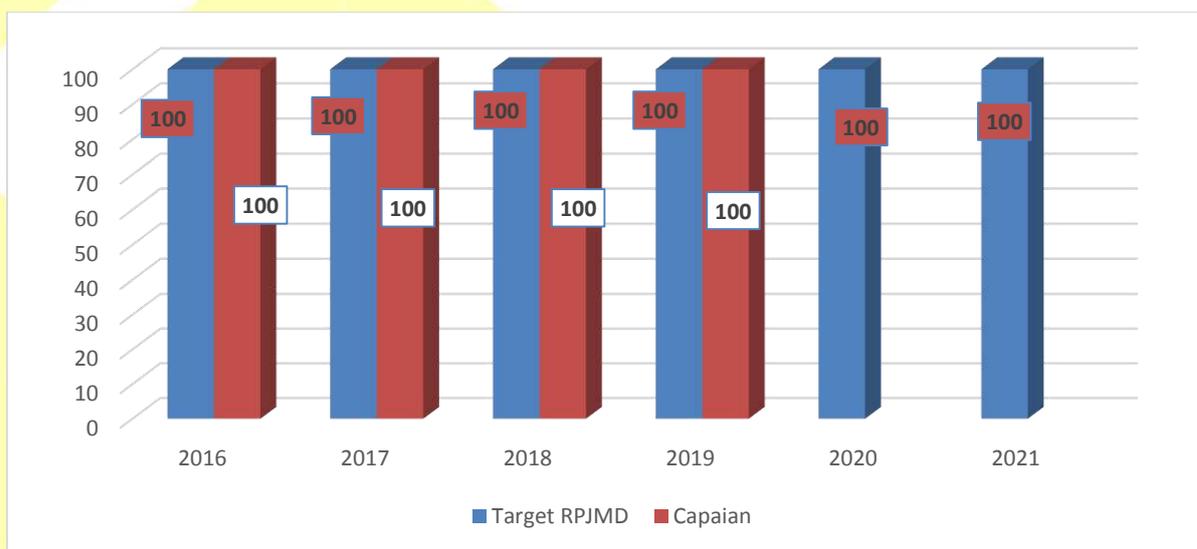
No.	Indikator	Tahun 2019		Capaian 2019 (%)	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi

Kondusivitas dan stabilitas politik serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang memuaskan. Selama kurun waktu empat tahun Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercapai 100%. Data selengkapnya capaian target dan

realisasi Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 4 tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.29

Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021



Capaian target dan realisasi Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Rembang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tercapai 100%. Dengan demikian berarti selama kurun waktu 4 tahun target RPJMD terpenuhi.

Adapun Program dalam mendukung Ketercapaian Sasaran menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.57

Program Pendukung Capaian Sasaran Menurunnya Kasus Gangguan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP

Faktor pendorong tercapainya capaian target Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah antara lain adalah terpenuhinya kebutuh

Sumber daya manusia yang professional. Kecukupan anggaran juga menjadi faktor penting dalam pencapaian sasaran tersebut. Tidak kalah penting juga adalah tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional di kantor maupun di lapangan.



Sasaran 20

Meningkatnya Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS



Bantuan Sosial bagi pentandang disabilitas

Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS** merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan” dan juga untuk

mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat”.

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

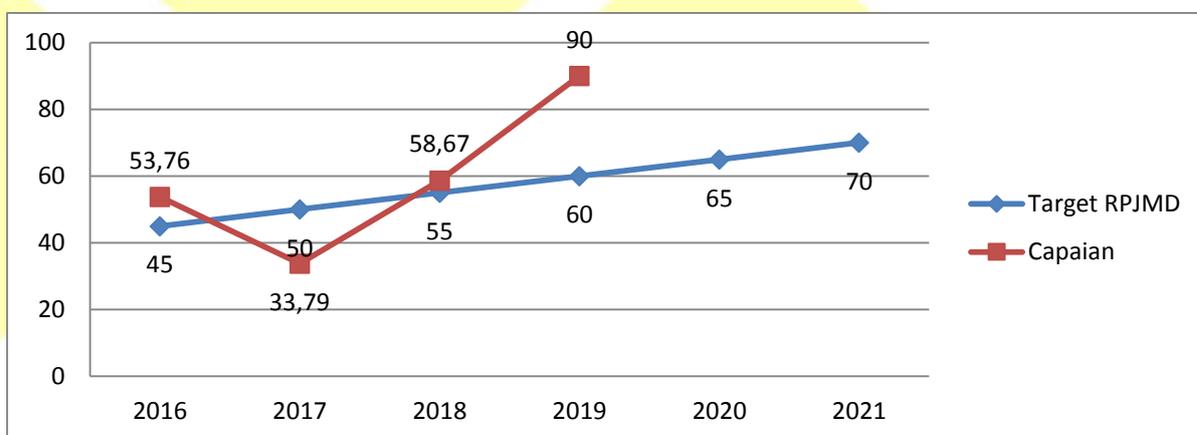
Tabel III.58

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS Tahun 2019

No.	Indikator	Tahun 2019		Capaian 2019 (%)	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Persentase PMKS yang ditangani	60	90	150	Sangat Tinggi

Pencapaian Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS di Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang sangat memuaskan. Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 60% tercapai 90%, atau sebesar 150% dari target yang ditetapkan. Perkembangan capaian Persentase PMKS yang ditangani selama empat menunjukkan angka yang fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.30
Persentase PMKS yang ditangani di Kabupaten Rembang
Tahun 2016 - 2021



Capaian target dan realisasi Persentase PMKS yang ditangani di Kabupaten Rembang tahun 2019 tercapai 90% dari target yang ditetapkan 60%. Data tersebut meningkat dari tahun 2016 sebesar 53,76% dan sempat turun menjadi 33,79% pada tahun 2017 dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 58,67%.

Adapun Program dalam mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.59
Program Pendukung Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsos PPKB

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
2	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Dinsos PPKB
3	Program Penanganan Anak Terlantar	Dinsos PPKB

Sumberdaya pendukung baik anggaran maupun sarana dan prasarana menjadi Faktor penentu tercapainya target sasaran Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS. Selain itu ketersediaan sumber daya aparatur yang professional juga menjadi hal penting dalam tercapainya sasaran tersebut.

Permasalahan dalam mencapai Target sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Pada Masyarakat PMKS 2019 antara lain :

- 1) Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
- 2) Belum optimalnya validasi data PMKS;
- 3) Belum adanya rumah singgah sebagai penampung sementara bagi PMKS;
- 4) Kurangnya peran PSKS untuk melakukan UKS;
- 5) Kurangnya ketrampilan dan kemampuan PSKS dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial;
- 6) Volume kegiatan belum memadai dengan kebutuhan jumlah PSKS;
- 7) Rendahnya rasio antara kebutuhan wilayah dengan personil PSKS yang ada;
- 8) Kurangnya kualitas dan sumberdaya manusia dalam rangka penanganan PMKS;
- 9) Kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan penanganan PMKS, PSKS dan pendataan data miskin dan PMKS;
- 10) Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Kurangnya sarana prasarana kantor yang memadai guna mendukung tupoksi DINSOSPPKB;
- 12) Kurangnya dukungan anggaran pemeliharaan dan operasional kantor guna mendukung tupoksi DINSOSPPKB;
- 13) Kurangnya SDM ASN

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sosialisasi dan pemahaman semua pemangku kebijakan pentingnya data PMKS dan data FM;
- 2) Peningkatan penguatan sumber daya manusia;
- 3) Melakukan usulan untuk peningkatan sarana dan prasarana data dan PSKS;
- 4) Upaya optimalisasi standar pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Melakukan usulan untuk peningkatan sarana dan prasarana data dan PSKS;
- 6) Melakukan usulan untuk peningkatan sarana prasarana kantor, pemeliharaan dan operasional kantor guna mendukung kelancaran kegiatan DINSOSPPKB;
- 7) Melakukan usulan penambahan SDM ASN



Sasaran 21

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak



Kabupaten Layak Anak

Sasaran strategis 21 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan**

gender serta perlindungan anak"

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.60

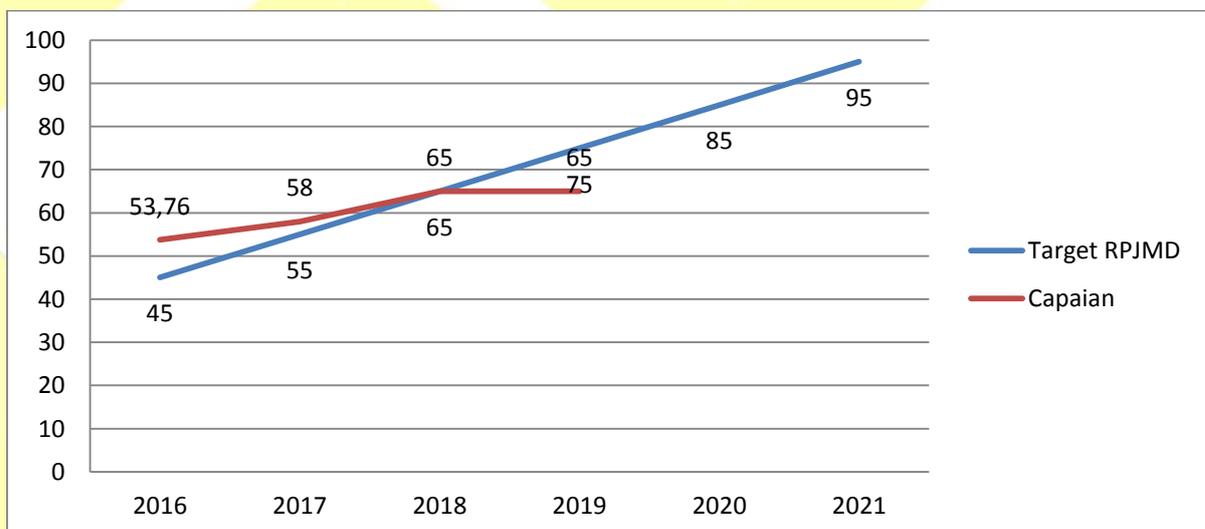
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Indikator	Tahun 2019		Capaian 2019 (%)	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Cakupan desa ramah anak	75	65	86,6	Sangat Tinggi
2	Cakupan Pemenuhan Hak anak	65	65	100	
	Rata-rata		93,3		

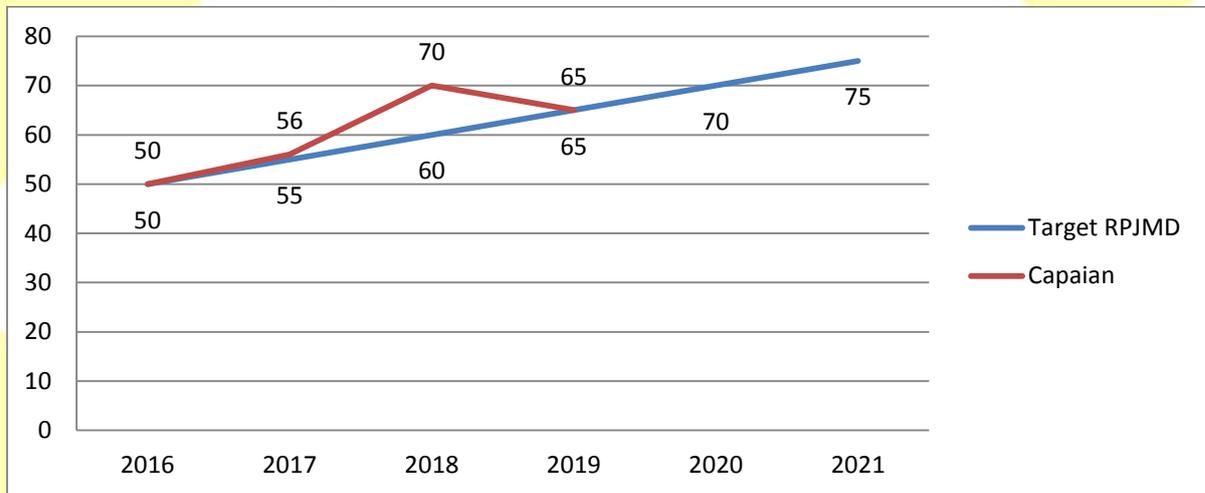
Capaian sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang cukup bagus. Target yang tidak tercapai pada indikator cakupan desa ramah anak dimana dari target 75% hanya tercapai 65% atau 86,6% dari target yang ditetapkan. Sementara itu indikator cakupan pemenuhan hak anak sudah tercapai 100%. Perkembangan capaian Cakupan desa ramah anak dan cakupan pemenuhan hak anak dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.31

Cakupan Pemenuhan hak anak di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021



Grafik III.32
Cakupan desa ramah anak di Kabupaten Rembang
Tahun 2016 - 2021



Capaian target dan realisasi Cakupan desa ramah anak di Kabupaten Rembang dari tahun 2019 tercapai 65 % dari target yang ditetapkan 75%. Data tersebut meningkat dari tahun 2016 sebesar 53,76% namun stagnan dari tahun 2018 menjadi 65%. Sementara Capaian target dan realisasi Cakupan pemenuhan hak anak tahun 2019 tercapai 65% dari target yang ditetapkan 65%, atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Data tersebut mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sebesar 50% dan sempat meningkat menjadi 70% pada tahun 2017 kemudian turun kembali menjadi 65% pada tahun 2019.

Adapun Program dalam mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.61
Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan	Dinsos PPKB

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
2	Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak	Dinsos PPKB

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pencapaian target sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak antara lain adalah Pemahaman terhadap hak-hak anak oleh masyarakat masih rendah karena masih terbatas jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak belum dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas. Banyaknya remaja yang terjebak dalam modernisasi sehingga banyak mendapatkan masalah pergaulan bebas.

Permasalahan dalam mencapai Target sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak antara lain :

- 1) Replikasi pengembangan industri rumahan (IR) perempuan menjadi 18 desa, Mulai tahun 2018 ada tambahan 14 desa replikasi dengan total 1.172 IR namun dukungan anggaran sangat kecil;
- 2) Pendampingan di desa replikasi kurang optimal;
- 3) Pengarusutamaan gender dan anak belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD/Kec. dan desa;
- 4) Penyusunan Perencanaan dan anggaran yang responsive gender dan anak lintas sektor masih belum optimal;
- 5) Pelaksanaan program/kegiatan OPD masih belum mempertimbangkan data pilah gender;
- 6) Keterbatasan Sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam rangka mendukung kegiatan pengarusutamaan gender dan perlindungan;
- 7) Jumlah pelapor dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih minim
- 8) Belum semua kasus dilaporkan, karena masih ada masyarakat yang enggan melapor karena di anggap aib
- 9) Penanganan terhadap kasus hanya kasus yang dilaporkan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan OPD terkait dan PKK;
- 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- 3) Pembuatan Forum Data Gender;
- 4) Membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak;
- 5) Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- 6) Penguatan Kelompok Perlindungan Anak Desa.



Sasaran 22

Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Lokal



Museum Kartini Rembang

Sasaran strategis 22 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Memberikan**

Fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berprestasi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya local yang merupakan warisan berharga dari pendahulu"

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya Lokal dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.62

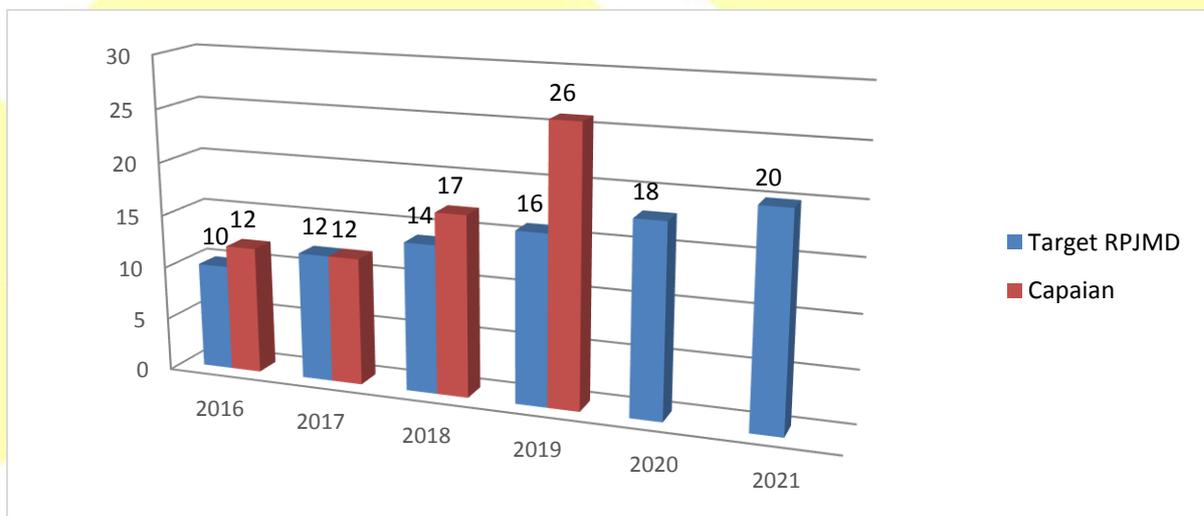
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Lokal

No.	Indikator	Tahun 2019		Capaian 2019 (%)	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16 %	26 %	162,5 %	Sangat Tinggi

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang cukup bagus. Dari target 16% tercapai 26% atau 162,5% dari target yang ditetapkan. selengkapnya Perkembangan capaian Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.33

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021



Capaian target dan realisasi Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2019 tercapai 26 % dari target yang ditetapkan 16%. Data tersebut terus mengalami peningkatan dari awal kurun waktu RPJMD sebesar 12% pada tahun 2016. Keberhasilan capaian sasaran ini dicapai berdasarkan upaya pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya melalui pendataan dan penetapan. Untuk pendataan cagar budaya sudah masuk di

Registasi Nasional Cagar Budaya. Pada Tahun 2019 jumlah cagar budaya di Kabupaten rembang yang sudah didaftarkan dan diverifikasi oleh Registrasi Nasional sebanyak 131 cagar budaya, sedangkan yang sudah dilestarikan sebanyak 35 cagar budaya dan yang telah ditetapkan sebanyak 11 cagar budaya.

Adapun Program dalam mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Lokal Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.63
Program Pendukung Capaian Sasaran
Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Lokal

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	Dinbupar

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan pelestarian seni budaya lokal antara lain :

- 1) Inventarisasi cagar budaya
- 2) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala
- 3) Pengembangan nilai-nilai budaya tradisi masyarakat
- 4) Penyelenggaraan gelar seni budaya
- 5) Penyelenggaraan festival budaya daerah
- 6) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Namun demikian masih terdapat faktor penghambat, kendala dan permasalahan, dalam upaya mencapai sasaran sebagai berikut:

- 1) Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya masih perlu ditingkatkan.
- 2) Kemampuan teknis pengelola museum masih belum optimal, baik dalam teknik perawatan maupun penataan koleksi.

Adapun strategi untuk mengendalikan faktor penghambat, kendala dan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibatkan masyarakat dan generasi muda melalui : kemah budaya, sosialisasi cagar budaya, pembinaan lomba karya tulis ilmiah cagar budaya, belajar bersama di museum, seminar permuseuman dan fasilitasi kegiatan pada generasi muda untuk mencintai museum (duta museum).
- 2) Peningkatan gerakan museum masuk sekolah agar warisan budaya bisa berfungsi optimal sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
- 3) Peningkatan kemampuan teknis pengelola museum melalui bimbingan teknis dan workshop.
- 4) Peningkatan perawatan koleksi museum dengan kegiatan konservasi.



Sasaran 23

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk



Rembang Raih Penghargaan tentang Keluarga Berencana Tingkat Nasional

Sasaran strategis 23 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan"**

Adapun capaian terhadap sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.64

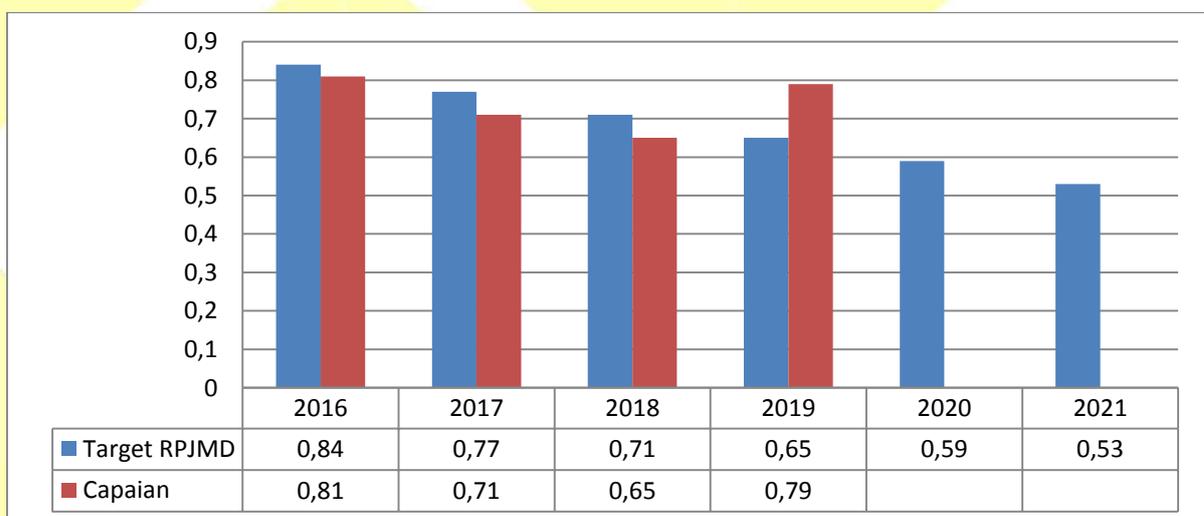
Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

No.	Indikator	Tahun 2019		Capaian 2019 (%)	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Persentase pertumbuhan penduduk	0,65	0,79	78,46	Sedang
2.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	6,61	9,98	66,23	
Rata-rata		72,34			

Capaian sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang menunjukkan angka sedang dengan capaian rata-rata sebesar 72,34% dari dua indikator yang ditetapkan. Indikator Persentase pertumbuhan penduduk mencapai 0,79% Target yang ditetapkan sebesar 0,65% atau 78,46% dari target yang ditetapkan. Sementara itu indikator Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) tercapai 9,98% dari target yang ditetapkan sebesar 6,61% atau 66,23% dari target yang ditetapkan. Perkembangan capaian Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.34

Persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021



Adapun bila dibandingkan dengan proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Nasional rentang tahun 2015 - 2020 sebesar 1,19%, maka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang lebih Rendah daripada Tingkat Nasional sehingga menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang lebih dapat dikendalikan. Adapun perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang dengan proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

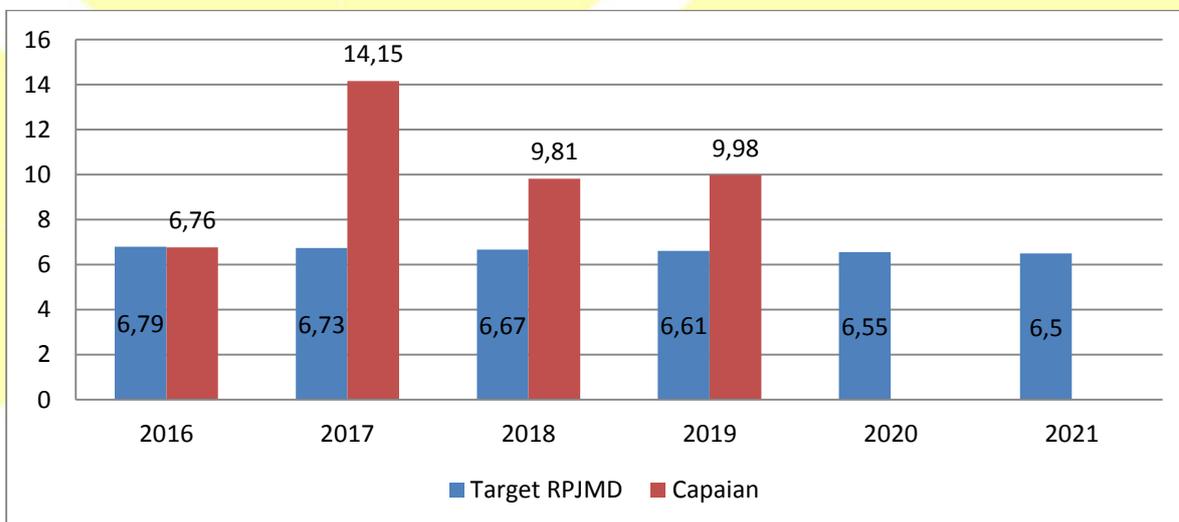
Tabel III.65

Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang Dengan Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Nasional

Indikator	Proyeksi Nasional Tahun 2015-2020	Kabupaten Rembang Tahun 2019
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,19%	0,79%

Grafik III.35

Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021



Capaian target dan realisasi Persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tahun 2019 sebesar 0,79% dari target 0,65%. Angka prosentase pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi selama kurun waktu empat tahun. Prosentase pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,81%. Sementara Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi

(*Unmet need*) tahun 2019 tercapai 9,98%. Angka tersebut mengalami fluktuasi sejak tahun 2016. Capaian terendah terjadi pada tahun 2017 dengan capaian 14,15% dari target yang ditetapkan sebesar 6,73%. Rendahnya capaian Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) menjadi salah satu faktor tingginya prosentase pertumbuhan penduduk.

Adapun Program dalam mendukung Sasaran Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel III.66
Program Pendukung Capaian Sasaran
Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk

NO	PROGRAM PENDUKUNG	OPD PENGAMPU
1	Program Keluarga Berencana	Dinsos PPKB
2	Program Pelayanan Kontrasepsi	Dinsos PPKB

Permasalahan dalam mencapai Target sasaran Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk antara lain :

1. Masih rendahnya kesertaan KB MKJP (26,07%) dan Kesertaan KB Pria (0,98%);
2. Masyarakat masih banyak yang merasa takut dan malu untuk menggunakan alat kontrasepsi MKJP terutama IUD, MOW dan MOP
3. Animo masyarakat terhadap pemakaian kontrasepsi MKJP hanya kontrasepsi implant saja;
4. Keterbatasan SDM kader sebagai tenaga konseling di lini lapangan;
5. Banyaknya jumlah wilayah kerja penyuluh KB rata-rata 1 penyuluh KB mempunyai 6-7 desa binaan;
6. Tidak ada tenaga medis/dokter yang berkopetensi melayani KB MOP.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Meningkatkan konseling dan KIE kontrasepsi KB khususnya MKJP;
2. Pelayanan KB MKJP secara rutin dan serentak melalui berbagai momentum seperti TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara, Harlah Muslimat

NU, Milad Aisyiyah, Hari Kartini, Hari Keluarga Nasional, Hari Juang Kartika, Hari Kontrasepsi Sedunia;

3. Meningkatkan peran kader dalam penggerakan pelayanan KB MKJP Peserta KB MKJP di layani di PKBI Semarang.



Sasaran 24

Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan Daerah



Bantuan Alat Mesin Pertanian

Sasaran strategis 24 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”** dan juga untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan Kedaulatan Pangan”**.

Adapun capaian kinerja Sasaran **“Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan Daerah”** pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

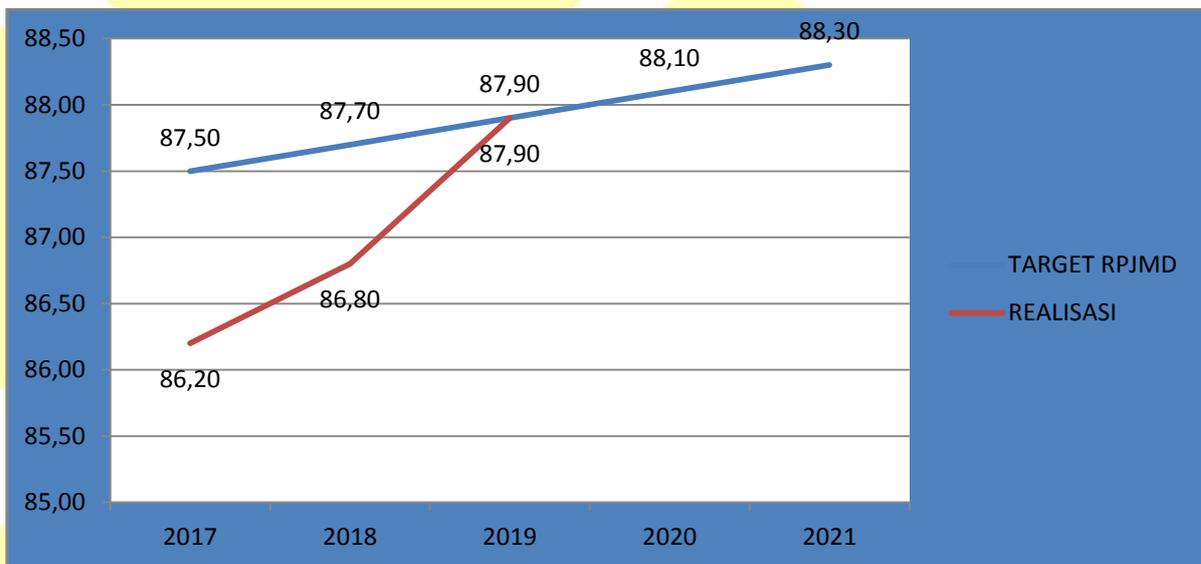
Tabel III.67

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Skor PPH	87,9	87,9	100%	Sangat Tinggi

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 yaitu Skor PPH mencapai 100% dengan predikat sangat tinggi. Pencapaian tersebut identik dengan target yang ditetapkan pada tahun 2019. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja indikator skor PPH terhadap RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.36
Target dan Realisasi Skor PPH
Tahun 2017 - 2021



Skor PPH merupakan indikator kualitas konsumsi pangan, dimana sangat dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Skor ideal untuk pola pangan harapan adalah 100. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian ketersediaan energi dan protein per kapita tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 maupun 2017. Skor PPH terus mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 skor PPH mencapai 86,2 kemudian meningkat menjadi 86,8 pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 87,9 di tahun 2019. Untuk mencapai target pada masa akhir RPJMD maka terdapat gap sebesar 0,4.

Dengan rata-rata pertumbuhan skor tiap tahun sebesar 0,85 maka realisasi RPJMD pada akhir tahun dapat tercapai. Hal tersebut tidaklah lepas dari berbagai intervensi Pemerintah Kabupaten Rembang berupa mengembangkan lumbung

pangan, pameran dan festival pangan yang mendorong keragaman dan keseimbangan antar kelompok pangan di Kabupaten Rembang.

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.68
Program Pendukung Capaian Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan Tahun 2019

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah	DINTANPAN
2.	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	DINTANPAN
3.	Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	DINTANPAN
4.	Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	DINTANPAN

Adapun faktor pendorong dapat dilihat sebagai berikut :





Sasaran 25

Meningkatnya Kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga



Simbolis Serah Terima Asuransi Nelayan dan Bantuan Hibah Kepada Kelompok Nelayan

Sasaran strategis 25 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan” dan juga untuk mencapai tujuan “Mewujudkan kedaulatan pangan”.

Adapun capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.69

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan pada Ekonomi Rumah Tangga tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian 2019	Predikat
		Target	Realisasi		
1.	Indeks Produksi Pertanian	6,5	6.32	97.29%	Sangat Tinggi
2.	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Per Tahun	2	2,67	133,30%	
	Rata - rata		114.40%		

1. Indeks Produksi Pertanian

Realisasi indeks produksi pertanian diukur dengan cara mengambil rata-rata nilai dari jumlah Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah dan Mangga (ton) dibagi Luas Lahan panen (Ha)

Adapun pengukuran Indeks produksi pertanian dan perkembangan jumlah Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah dan Mangga Tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

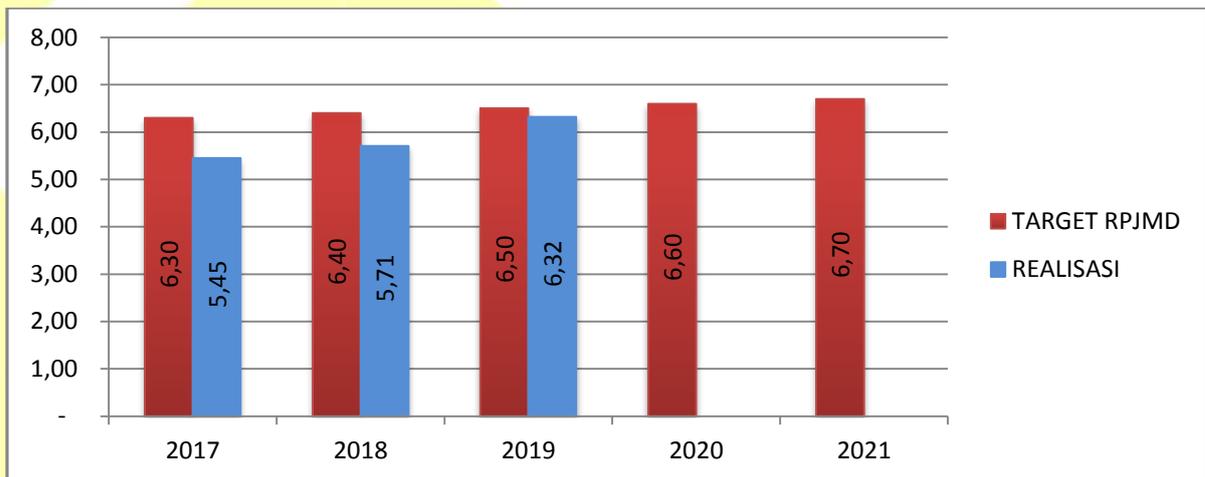
Tabel III.70

Perkembangan Jumlah Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah dan Mangga Tahun 2017 - 2019

No.	Komoditas	2017		2018		2019	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi	50,147	240,376	40,283	226,929	40,590	191,301
2.	Jagung	29,468	143,962	21,147	110,912	23,659	123,973
3.	Kedelai	1,456	2,039	1,924	2,684	2,034	2,807
4.	Cabe	4,108	15,606	2,019	7,969	1,948	7,759
5.	Bawang Merah	326	2,066	200	1,372	137	1,044
6.	Mangga	4,673	87,481	4,701	51,271	6,935	149,325
	Jumlah	90,178	491,529	70,274	401,137	75,303	476,208
	Indeks	5.45		5.71		6.32	

Adapun grafik ketercapaian indeks produksi pertanian bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.37
Target dan Realisasi Indeks Produksi Pertanian
Tahun 2017 - 2019



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target Indeks produksi pertanian pada tahun 2019 adalah sebesar 6,50 dengan realisasi sebesar 6,32 sehingga dapat dihitung persentasenya sebesar 97,29%. Pada tahun 2018 realisasi Indeks produksi pertanian adalah sebesar 5,71 sedangkan pada tahun 2019 Indeks produksi pertanian adalah sebesar 6,32. Apabila dilihat dari tabel perkembangan pertanian di atas menunjukkan bahwa luas lahan pertanian ke depan semakin berkurang tetapi bila dibandingkan dengan grafik perkembangan pertanian indeks pertanian semakin ke depan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun luas lahan panen pertanian ke depan semakin menurun tetapi tingkat produksi pertanian apabila dibandingkan dengan luas lahan pertanian semakin meningkat atau semakin produktif.

2. Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Per Tahun

Target pertumbuhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 adalah sebesar 2% dengan realisasi sebesar 2,67% sehingga dapat dihitung persentasenya sebesar 133,30%. Realisasi tersebut dihitung dengan membandingkan capaian produksi budidaya air payau dan air tawar di

kabupaten rembang pada tahun 2019 dengan capaian produksi budidaya air payau dan air tawar di kabupaten rembang pada tahun 2018.

Adapun produksi dan nilai produksi budidaya air payau dan air tawar di Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.71
Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Air Payau dan Air Tawar
Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2019

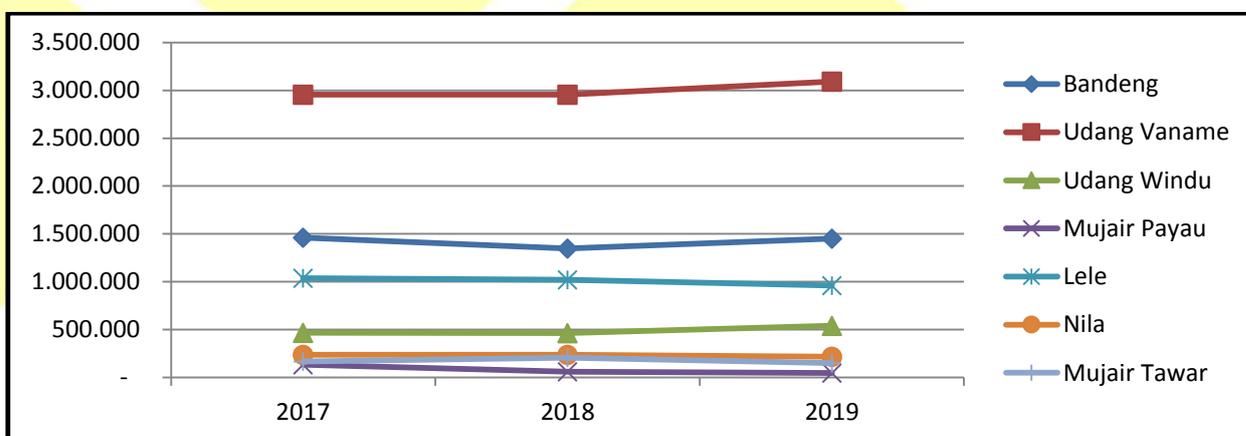
No	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp.)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp.)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budidaya Air Payau							
1	Bandeng	1.459.954	24.797.460.000	1.347.910	22.858.049.000	1.450.277	28.890.646.000
2	Udang Vaname	2.956.308	236.504.638.000	2.954.308	236.204.638.000	3.092.486	247.398.878.000
3	Udang Windu	467.294	37.383.559.000	463.984	37.118.759.000	539.482	43.158.599.000
4	Mujair Payau	132.214	1.848.201.000	58.380	817.380.000	44.694	625.716.000
Jumlah		5.015.770	300.533.858.000	4.824.582	296.998.826.000	5.126.939	320.073.839.000
Budidaya Air Tawar							
5	Lele	1.037.217	16.026.948.000	1.020.520	15.775.491.000	958.941	15.719.241
6	Nila	234.978	36.329.555.000	234.978	3.632.955.000	217.013	3.523.725
7	Mujair Tawar	166.975	2.004.920.000	204.677	2.456.125.000	149.427	1.981.445
Jumlah		1.439.170	54.361.423.000	1.460.175	21.864.571.000	1.325.381	21.224.411
Jumlah Total		6.454.940	354.895.281.000	6.284.757	318.863.397.000	6.452.320	320.095.063.411

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa realisasi produksi budidaya air payau dan air tawar pada tahun 2017 sebesar 6.454.940 kg sedangkan realisasi produksi pada tahun 2018 sebesar 6.284.757 kg sehingga dapat dihitung penurunan produksi pada komoditas air payau dan air tawar sebesar - 2.64%. Akan tetapi, realisasi produksi pada tahun 2019 meningkat kenaikan sebesar 6.452.320 kg sehingga dapat dihitung pertumbuhan produksi budidaya pada komoditas air payau dan air tawar sebesar 2.67%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat dikatakan telah berhasil dalam mengembangkan potensi perikanan, khususnya di bidang

perikanan budidaya air payau dan air tawar. Penyebab penurunan pada tahun 2018 terjadi dikarenakan faktor cuaca ekstrim mempengaruhi kualitas perairan dari kegiatan usaha perikanan budidaya.

Adapun secara grafik pertumbuhan produksi budidaya air payau dan air tawar Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.38
Pertumbuhan Produksi Budidaya Air Payau dan Air Tawar
Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2019



Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan pada Ekonomi pada Tahun 2019, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.72
Program Pendukung Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Produksi
Hasil Pertanian dan Perikanan pada Ekonomi Rumah Tangga
Tahun 2019

NO	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program Desa Mandiri Pangan	DINTANPAN
2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DINLUTKAN

Dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan pada Ekonomi”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

Faktor Pendorong

1. Topografi pertanian di Kabupaten Rembang yang cenderung datar sehingga mempermudah proses pengolahan;
2. Unsur hara/kesuburan dan sifat fisik tanah di Kabupaten Rembang cenderung masih terjaga;
3. Potensi sumberdaya pertanian, kelautan dan perikanan yang cukup besar;
4. Tersedianya sumber daya manusia pertanian, kelautan dan perikanan;
5. Komitmen dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kelautan dan perikanan;
6. Permintaan pasar akan hasil pertanian, kelautan dan perikanan semakin meningkat;
7. Keberadaan mitra usaha pertanian, kelautan dan perikanan serta peran masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan;
- 8.

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1.	Pola pengembangan pertanian yang masih tradisional'	Pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian.
2.	Ketersediaan sarana prasarana pertanian yang masih rendah.	Peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian serta pemberian bantuan alat mesin pertanian.

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
3.	Masih rendahnya SDM dan pendidikan para petani	Penguatan lembaga ketahanan pangan daerah dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian.
4.	Sulitnya akses ke pembiayaan pertanian untuk wilayah pedesaan	Peningkatan akses pembiayaan dengan kerjasama dengan perbankan dan pengawasan pemberian pupuk subsidi dan pemberian bantuan benih pertanian.
5.	Sistem budidaya ikan masih tradisional;	Mendorong penerapan CBIP (Cara pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) sebagai proses pemeliharaan benih dan pembesaran ikan untuk menjaga kualitas/mutu ikan.
6.	Jumlah kematian ikan yang disebabkan oleh hama penyakit masih tinggi;	Akselerasi/ percepatan melaksanakan perbaikan kualitas lingkungan dengan rehabilitasi hutan bakau dan perairan laut sebagai ekosistem SDKP.
7.	Harga pakan ikan yang mahal dan Harga jual ikan terutama udang yang rendah.	Mendorong pembentukan wadah koperasi bersama dari kelompok-kelompok usaha budidaya yang ada guna mengontrol harga pakan dan pasca panen.
8.	Kualitas dan pendidikan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang relatif masih rendah.	Sosialisasi, pembinaan dan pelatihan serta pendampingan bagi pembudidaya beserta nelayan dan pelaku usaha terkait.
9.	Kurangnya koordinasi dalam meningkatkan produksi perikanan	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan bersama dengan semua stake holder.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai pencapaian target kinerja sebanyak 25 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 maka besaran alokasi anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.73

**Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
1	Terwujudnya <i>Good Governance</i>								
		Tingkat maturitas SPIP	3	3	100	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	129.985.000	114.432.709	88,04
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	5.264.155.000	5.140.535.989	97,65
						Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	206.850.000	200.915.500	97,13
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	775.000.000	765.047.866	98,72
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.308.555.156	9.847.731.725	95,53
		Nilai SAKIP	64	58,70	91,72	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	1.300.780.000	1.280.267.763	98,42
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.627.984.000	3.309.394.636	91,22

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi								
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	65	64,57	99,34	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	641.026.340	640.622.600	99,94
3	Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima								
		Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	78	78,04	100,05	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	320.000.000	319.462.024	99,83
4	Meningkatnya kinerja sektor pertanian								
		Indeks Produksi Padi	1,11	0,84	75,68	Program Peningkatan produksi Pertanian	793.250.000	771.094.509	97,21
						Program Peningkatan produksi Perkebunan	877.454.173	866.342.975	98,73
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	270.000.000	264.661.000	98,02
		Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian`	1,5	1,78	118,67	Program Pengembangan Agribisnis	845.500.000	821.463.444	97,16
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.020.085.173	1.934.073.150	95,74
5	Meningkatnya kinerja								

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
	sektor industri dan perdagangan								
		Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	14,60	13,72	93,97	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	25.000.000	24.158.900	96,64
		Kontribusi sektor industri pengolahan	21,6	23,10	106,94	Program Peningkatan Kemetrologian dan perlindungan Konsumen	887.000.000	860.343.311	96,99
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.388.572.000	3.730.827.360	85,01
						Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi	1.530.925.000	1.415.145.582	92,44
						Program Promosi produk unggulan daerah	994.500.000	974.078.723	97,95
						Program Pengembangan Sistem Distribusi	200.000.000	181.675.688	90,84
						Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan	16.000.000	13.562.750	84,77
						Program Pembinaan Pedagang	15.000.000	11.203.750	74,69
						Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	300.000.000	294.601.000	98,20
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.100.000.000	99.859.000	3,22
						Program Peningkatan Kemampuan Teknologi	70.000.000	69.783.000	99,69

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
						Industri			
						Program Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri	50.000.000	49.606.000	99,21
						Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	50.000.000	49.409.000	98,82
						Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	470.000.000	466.730.300	99,30
						Program Pembinaan Lingkungan Sosial	225.000.000	220.850.900	98,16
						Program Pembinaan Industri	55.000.000	53.940.000	98,07
6	Menurunnya angka pengangguran								
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00	3,69	108,40	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.169.000.000	1.011.187.954	86,50
						Program peningkatan kesempatan kerja	335.000.000	320.358.750	95,63
						Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	255.000.000	252.875.000	99,17
						Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	115.000.000	114.000.000	99,13
7	Menurunnya angka kemiskinan								
		Persentase penduduk miskin	13,83	14,95	91,90	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin	149.000.000	146.812.000	98,53
						Program Penanggulangan	10.000.000	9.952.000	99,52

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
						kemiskinan			
						Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	1.679.000.000	1.664.269.268	99,12
						Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	160.000.000	158.036.650	98,77
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	199.000.000	185.747.740	93,34
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	875.000.000	866.841.000	99,07
						Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	123.000.000	121.580.500	98,85
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	313.000.000	299.274.350	95,61
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	875.000.000	866.841.000	99,07
						Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	213.000.000	191.608.900	89,96
8	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup								
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	67	64,44	96,18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50.000.000	25.091.700	50,18

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.307.796.000	4.184.842.282	97,15
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	587.730.000	541.989.625	92,22
						Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	55.000.000	47.598.625	86,54
						Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	244.800.000	242.712.000	99,15
						Program Peningkatan Pengendalian Polusi	50.000.000	47.472.600	94,95
						Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	145.000.000	142.197.450	98,07
						Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	265.000.000	261.290.500	98,60
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	715.200.000	696.158.688	97,34
9	Meningkatnya Nilai Investasi								
		Realisasi investasi PMA dan PMDN	4.747.479	8.029.000	169,12	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	205.000.000	196.040.277	95,63
						Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	185.000.000	158.138.709	85,48
						Program Pelayanan dan	612.720.000	560.728.061	91,51

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
						Pengendalian Pelayanan Perijinan			
						Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	25.000.000	16.542.700	66,17
						Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	80.000.000	66.816.000	83,52
						Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	612.720.000	560.728.061	91,51
10	Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif								
		Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	8,75	6,27	71,66	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	55.000.000	43.725.000	79,50
						Program Fasilitas Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha	25.000.000	22.722.000	90,89
						Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	112.000.000	98.071.000	87,56
						Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	240.000.000	217.903.800	90,79
						Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha	40.000.000	36.235.000	90,59

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
11	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah					Baru			
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	2,3	2,05	89,10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.317.905.000	1.769.464.197	76,34
						Program pengembangan Pemasaran pariwisata	990.800.000	985.208.550	99,44
						Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	255.000.000	252.216.800	98,91
						Program Pengembangan ekonomi kreatif	300.000.000	292.772.950	97,59
12	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.								
		Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	72,43	85,53	118,09	Program pembangunan jalan dan jembatan	62.053.725.400	46.137.205.426	74,35
		Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	85,71	92,06	107,41				
13	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni								
		persentase rumah tidak layak huni yang	9,35	22,49	240,04	Program Pengembangan Perumahan	3.375.078.700	2.595.613.046	76,91

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
		direhabilitasi/ditangan							
14	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku								
		Persentase cakupan Air baku	80%	45,72 %	57,15 %	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air lainnya	3.170.000.000	3.088.278.200	97,42
15	Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai								
		Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	4	4	100	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	20.000.000	19.096.000	95,48
16	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
		AKI (Angka Kematian Ibu)	6 kasus	7 kasus	83,30	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	1.372.000.000	498.403.187	36,33
		AKB (Angka Kematian Bayi)	115 kasus	164 kasus	57,40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	12.000.000	10.640.000	88,67
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31.984.230.300	26.869.259.417	84,01
						Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan	10.391.613.320	8.977.292.900	86,39

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
						Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya			
						Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	212.000.000	199.822.000	94,26
17	Meningkatnya angka rata rata lama sekolah								
		Rata-rata lama sekolah	7,60	7,15	91,40	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.153.130.000	2.830.289.755	89,76
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,20	12,10	99,10	Program Pendidikan Dasar	109.419.983.888	104.649.761.825	95,64
						Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	2.986.178.000	2.122.684.608	71,08
18	Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga								
		Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	40	46	115,00	Program Pengembangan dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	1.215.950.000	1.192.275.253	98,05
						Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga	105.000.000	104.199.510	99,24
						Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.470.000.000	1.443.807.429	98,22
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	200.000.000	195.960.850	97,98

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
19	Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat								
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	100	100	Program Penegakan Peraturan Daerah	720.000.000	631.027.600	87,64
20	Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS								
		Persentase PMKS yang ditangani	60	90	150	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	199.000.000	185.747.740	93,34
						Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	45.274.000	41.140.000	90,87
						Program Penanganan Anak Terlantar	200.000.000	188.280.000	94,14
21	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak								
		Cakupan desa ramah anak	75	65	86,60	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan	90.000.000	89.855.000	99,84
		Cakupan	65	65	100	Program peningkatan	420.000.000	418.688.900	99,69

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
		Pemenuhan Hak Anak				perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak			
22	Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal								
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16	26	162,50	Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	317.000.000	314.677.783	99,27
23	Terkendalinya pertumbuhan penduduk								
		Persentase pertumbuhan penduduk	0,65	0,79	78,46	Program Keluarga Berencana	6.271.190.000	5.227.150.933	83,35
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,61	9,98	66,23	Program Pelayanan Kontrasepsi	73.000.000	67.942.000	93,07
24	Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah								
		Skor PPH	87,90	87,90	100	Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah	35.000.000	34.794.100	99,41
						Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	570.000.000	569.518.150	99,92
						Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	15.000.000	14.980.525	99,87

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2019			program	Anggaran Tahun 2019		
			target	realisasi	%		pagu	realisasi	%
						Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	302.454.173	296.325.900	97,97
25	Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga								
		Indeks Produksi pertanian	6,50	6,32	97,29	Program Desa Mandiri Pangan	300.000.000	299.319.600	99,77
		Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	2	2,67	133,30	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.425.478.000	937.911.515	65,80

Informasi Kinerja Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 *Unaudited*. Secara garis besar Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang dikaji melalui Sisi Pendapatan, Sisi Belanja dan Sisi Pembiayaan.

A. PENDAPATAN

Capaian Keuangan pada Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi dan capaian sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.74
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2019 *Unaudited*

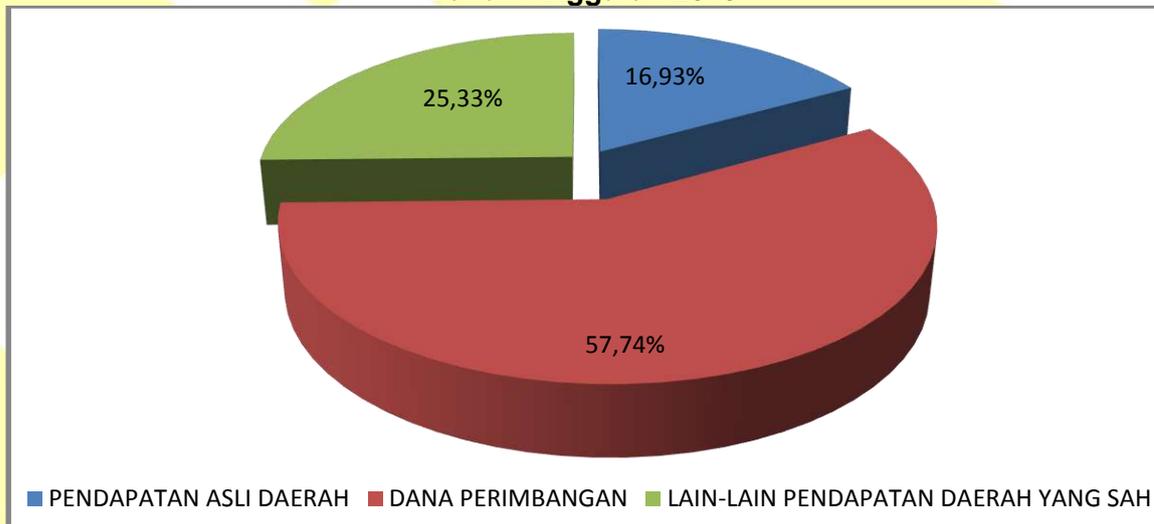
URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%) CAPAIAN
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1,871,420,964,071.00	1,821,899,884,311.31	(49,521,079,759.69)	97.35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	310,601,592,071.00	308,445,489,137.31	(2,156,102,933.69)	99.31
Pendapatan Pajak Daerah	100,522,250,000.00	100,695,231,898.00	172,981,898.00	100.17
Hasil Retribusi Daerah	24,102,329,000.00	19,033,999,790.00	(5,068,329,210.00)	78.97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,840,309,000.00	10,840,310,633.00	1,633.00	100.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175,136,704,071.00	177,875,946,816.31	2,739,242,745.31	101.56
DANA PERIMBANGAN	1,094,799,320,000.00	1,051,964,945,792.00	(42,834,374,208.00)	96.09
Dana Transfer Umum	850,594,561,000.00	838,539,540,291.00	(12,055,020,709.00)	98.58
Dana Transfer Khusus	244,204,759,000.00	213,425,405,501.00	(30,779,353,499.00)	87.40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	466,020,052,000.00	461,489,449,382.00	(4,530,602,618.00)	99.03
Pendapatan Hibah	66,343,640,000.00	66,782,874,842.00	439,234,842.00	100.66
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106,030,000,000.00	107,361,335,445.00	1,331,335,445.00	101.26
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258,436,412,000.00	258,436,412,000.00	0.00	100.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35,210,000,000.00	28,908,827,095.00	(6,301,172,905.00)	82.10

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 *Unaudited*

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, target Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebesar Rp. 1,871,420,964,071.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,821,899,884,311.31 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 97.35%.

Apabila dilihat dari segi proporsi realisasi pada masing - masing komponen Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase proporsi sebesar 16.93%, Dana Perimbangan dengan persentase proporsi sebesar 57.74% dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan persentase proporsi sebesar 25.33%. Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.39
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2019



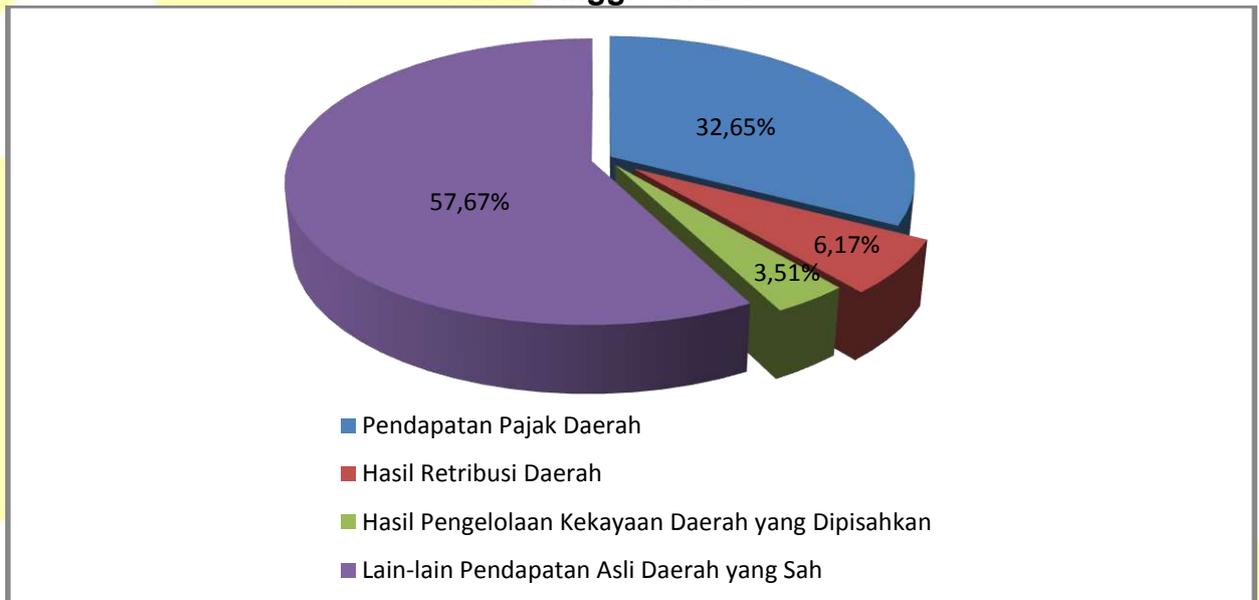
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, target Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 310,601,592,071.00 dengan realisasi sebesar Rp. 308,445,489,137.31 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 99.31%. Proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 100,695,231,898.00 dan persentase proporsi sebesar 32.65%, Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 19,033,999,790.00 dan persentase proporsi sebesar 6.17%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp. 10,840,310,633.00 dan persentase proporsi sebesar 3.51%, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan

realisasi sebesar Rp. 177,875,946,816.31 dengan persentase proporsi sebesar 57.67%.

Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.40
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2019



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.75
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019

URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019 UNAUDITED	% R
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1,722,252,909,030.04	1,785,911,075,230.15	1,821,899,884,311.31	2.86%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,319,284,807.04	296,676,436,263.15	308,445,489,137.31	1.38%
Pendapatan Pajak Daerah	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	100,695,231,898.00	34.20%
Hasil Retribusi Daerah	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	19,033,999,790.00	-3.90%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	10,840,310,633.00	30.77%

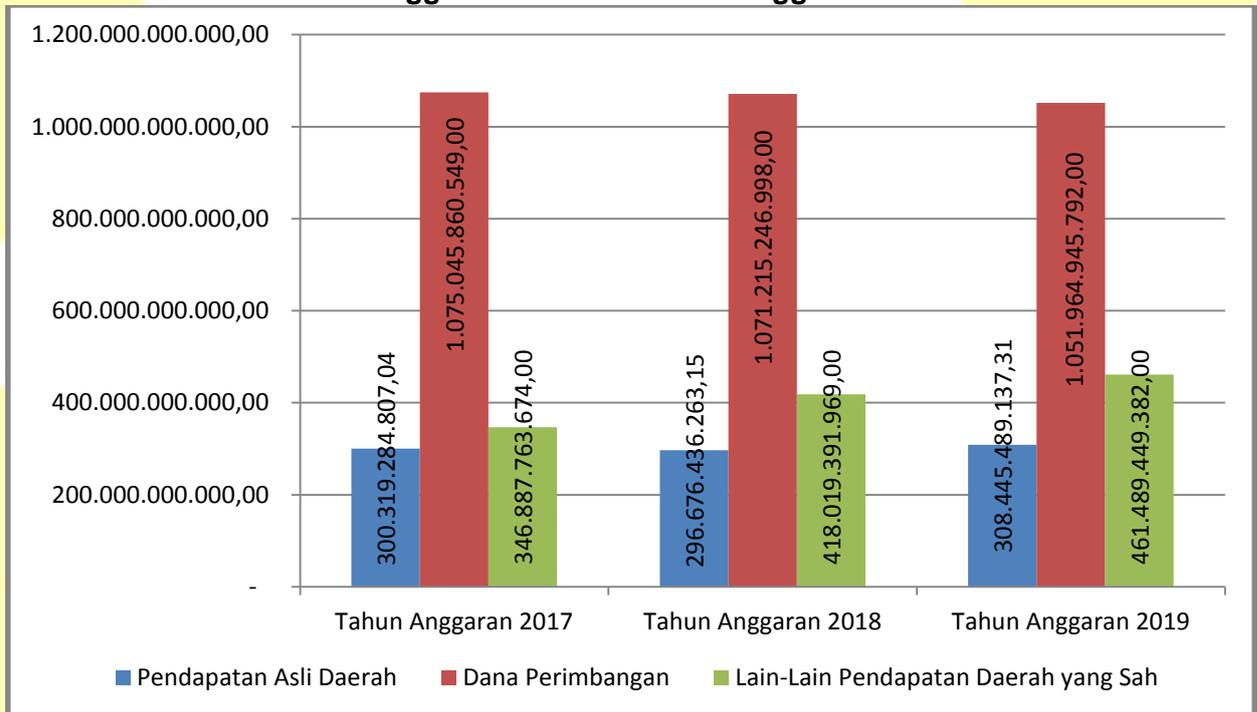
URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019 UNAUDITED	% R
1	2	3	4	5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210,641,535,102.04	156,021,190,220.15	177,875,946,816.31	-5.96%
DANA PERIMBANGAN	1,075,045,860,549.00	1,071,215,246,998.00	1,051,964,945,792.00	-1.08%
Dana Transfer Umum	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	838,539,540,291.00	1.33%
Dana Transfer Khusus	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	213,425,405,501.00	-8.64%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	346,887,763,674.00	418,019,391,969.00	461,489,449,382.00	15.45%
Pendapatan Hibah	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	66,782,874,842.00	1622.59%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	107,361,335,445.00	7.71%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	258,436,412,000.00	6.64%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00	28,908,827,095.00	8.95%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rata - rata kenaikan Realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 2.86% sedangkan persentase rata - rata kenaikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 1.38%. Pada Tahun Anggaran 2018, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang dikarenakan pada Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Hibah Dari Dana BOS sebesar Rp. 62,848,874,842.00 yang semula pada Tahun Anggaran 2017 berada pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Tahun Anggaran 2018 dipindah pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sehingga sangat berpengaruh terhadap persentase kenaikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian pada Tahun Anggaran 2019, persentase kenaikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 3.97%.

Secara rinci Grafik perkembangan realisasi masing - masing komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.41
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 Unaudited

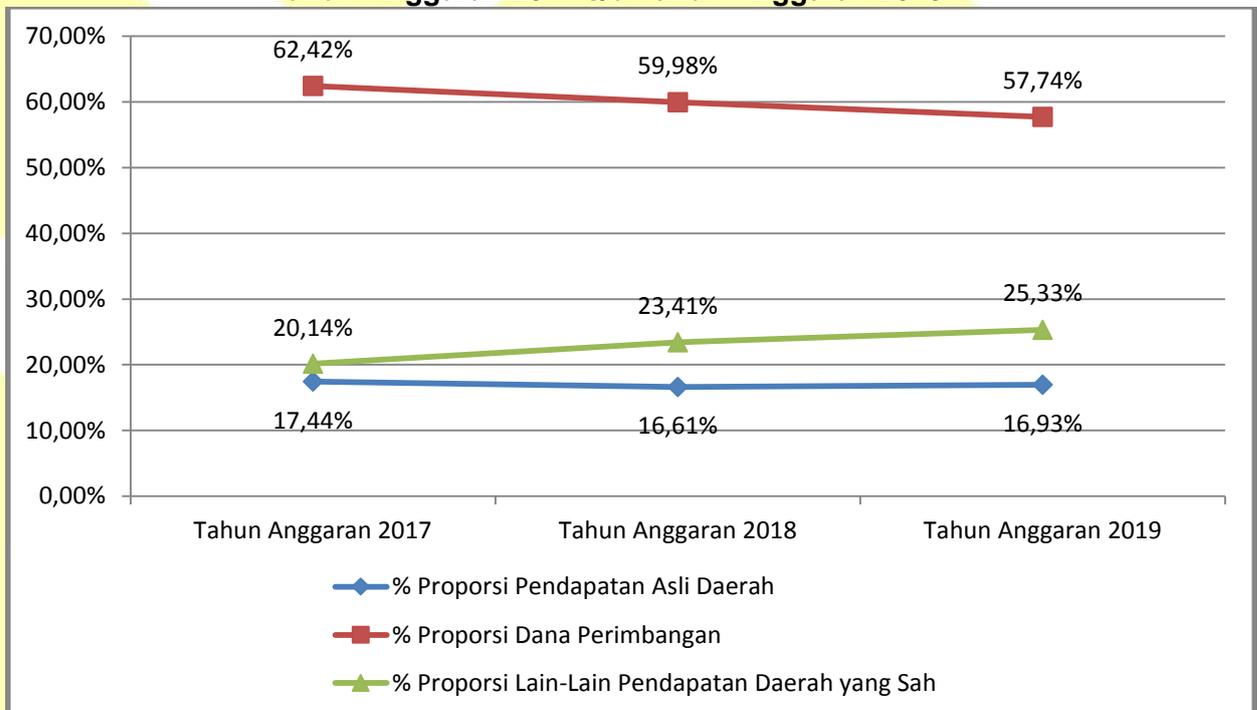
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan, hal ini di imbangi dengan realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 yang mengalami peningkatan. Sedangkan dilihat dari komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun pada Tahun Anggaran 2018 sempat menurun, tetapi pada Tahun Anggaran 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan bila dibandingkan pada Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan apabila dilihat dari segi persentase proporsi Pendapatan Daerah, persentase proporsi Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2017 sebesar 62.42% pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 57.74%, sedangkan persentase proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 17.44% sempat mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2018 menjadi sebesar 16.61%. Akan tetapi pada Tahun Anggaran 2019, persentase proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali meningkat menjadi sebesar 16.93%. Dengan semakin

menurunnya persentase proporsi Dana Perimbangan dan dengan meningkatnya persentase proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Kemampuan Fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang semakin meningkat dan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Rembang akan Anggaran Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Secara rinci Grafik perkembangan persentase proporsi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.42
Perkembangan Persentase Proporsi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 Unaudited

B. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2019 menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 1,940,245,226,611.19 dengan realisasi serapan sebesar Rp. 1,863,502,828,110.13 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 96.04%. Secara rinci realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan format sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.76
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2019 *Unaudited*

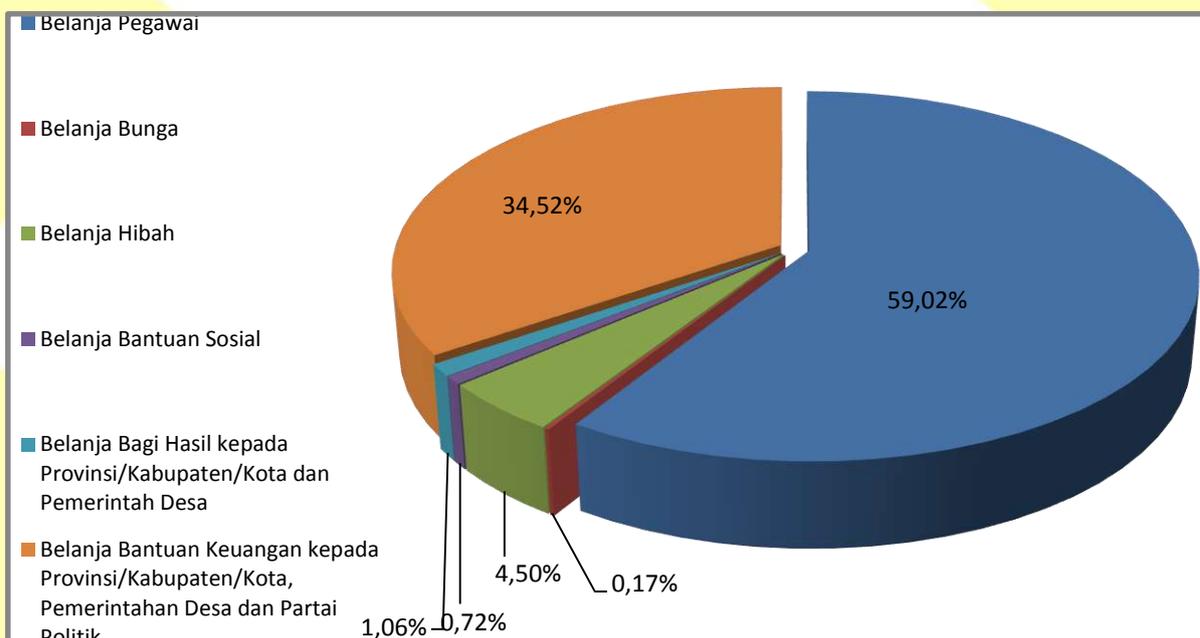
URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%) CAPAIAN
1	2	3	4	5
BELANJA	1,940,245,226,611.19	1,863,502,828,110.13	(76,742,398,501.06)	96.04
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,146,931,663,256.19	1,122,949,019,444.00	(23,982,643,812.19)	97.91
Belanja Pegawai	679,834,930,033.19	662,778,873,449.00	(17,056,056,584.19)	97.49
Belanja Bunga	1,631,632,000.00	1,964,064,583.00	332,432,583.00	120.37
Belanja Hibah	55,583,592,000.00	50,515,064,812.00	(5,068,527,188.00)	90.88
Belanja Bantuan Sosial	8,244,660,000.00	8,093,600,000.00	(151,060,000.00)	98.17
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11,984,474,900.00	11,944,474,900.00	(40,000,000.00)	99.67
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	388,375,509,700.00	387,652,941,700.00	(722,568,000.00)	99.81
Belanja Tidak Terduga	1,276,864,623.00	0.00	(1,276,864,623.00)	0.00
BELANJA LANGSUNG	793,313,563,355.00	740,553,808,666.13	(52,759,754,688.87)	93.35
Belanja Pegawai	194,093,756,930.00	202,176,927,613.00	8,083,170,683.00	104.16
Belanja Barang dan Jasa	353,923,542,070.00	331,305,451,674.13	(22,618,090,395.87)	93.61
Belanja Modal	245,296,264,355.00	207,071,429,379.00	(38,224,834,976.00)	84.42

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 *Unaudited*

Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 1,146,931,663,256.19 dengan realisasi sebesar Rp. 1,122,949,019,444.00 sehingga dapat dihitung persentasenya sebesar 97.91%. Sedangkan pada Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 793,313,563,355.00 dengan realisasi sebesar Rp. 740,553,808,666.13 sehingga dapat dihitung persentasenya sebesar 93.35%.

Dari realisasi Belanja Daerah di atas dapat dihitung persentase proporsi masing - masing komponen pada Belanja Tidak Langsung Pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Grafik III.43
Proporsi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Sedangkan untuk persentase proporsi masing - masing komponen pada Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan rincian sebagaimana tersaji pada grafik berikut :

Grafik III.44
Proporsi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2019



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.77
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019

URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019 UNAUDITED	% R
1	2	3	4	5
BELANJA	1,829,088,241,098.22	1,814,662,262,214.36	1,863,502,828,110.13	0.95%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,050,346,817,667.00	1,064,012,361,865.16	1,122,949,019,444.00	3.42%
Belanja Pegawai	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	662,778,873,449.00	3.18%
Belanja bunga	-	1,468,870,443.00	1,964,064,583.00	66.86%
Belanja Hibah	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	50,515,064,812.00	5.32%
Belanja Bantuan Sosial	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	8,093,600,000.00	-4.76%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	11,944,474,900.00	39.10%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	387,652,941,700.00	3.57%
Belanja Tidak Terduga	815,608,000.00	-	-	0.00%
BELANJA LANGSUNG	778,741,423,431.22	750,649,900,349.20	740,553,808,666.13	-2.48%
Belanja Pegawai	174,582,051,301.00	177,563,757,707.00	202,176,927,613.00	7.78%
Belanja Barang dan Jasa	250,388,658,063.00	263,637,636,747.20	331,305,451,674.13	15.48%
Belanja Modal	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	207,071,429,379.00	-22.81%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rata - rata kenaikan Realisasi Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 0.95% sedangkan persentase rata - rata kenaikan Realisasi Belanja Tidak Langsung dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 3.42%.

C. PEMBIAYAAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Target Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 155,692,630,540.19 dengan realisasi sebesar Rp. 153,281,669,305.62 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 98.45%. Sedangkan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 86,868,368,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 71,534,929,690.00 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 82.35%.

Secara rinci realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.78
Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2019 Unaudited

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%) CAPAIAN
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	155,692,630,540.19	153,281,669,305.62	(2,410,961,234.57)	98.45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75,692,630,540.19	75,415,765,915.62	(276,864,624.57)	99.63
Penerimaan Pinjaman Daerah	80,000,000,000.00	77,865,903,390.00	(2,134,096,610.00)	97.33
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	86,868,368,000.00	71,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	82.35
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	100.00
Pembayaran Pokok Utang	83,868,368,000.00	68,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	81.72
PEMBIAYAAN NETTO	68,824,262,540.19	81,746,739,615.62	12,922,477,075.43	118.78

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Secara utuh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 *Unaudited* (sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.79
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2019 Unaudited

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%) CAPAIAN
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1,871,420,964,071.00	1,821,899,884,311.31	(49,521,079,759.69)	97.35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	310,601,592,071.00	308,445,489,137.31	(2,156,102,933.69)	99.31
Pendapatan Pajak Daerah	100,522,250,000.00	100,695,231,898.00	172,981,898.00	100.17
Hasil Retribusi Daerah	24,102,329,000.00	19,033,999,790.00	(5,068,329,210.00)	78.97
Hasil Pengelolaan Kekayaan	10,840,309,000.00	10,840,310,633.00	1,633.00	100.00

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%) CAPAIAN
1	2	3	4	5
Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175,136,704,071.00	177,875,946,816.31	2,739,242,745.31	101.56
DANA PERIMBANGAN	1,094,799,320,000.00	1,051,964,945,792.00	(42,834,374,208.00)	96.09
Dana Transfer Umum	850,594,561,000.00	838,539,540,291.00	(12,055,020,709.00)	98.58
Dana Transfer Khusus	244,204,759,000.00	213,425,405,501.00	(30,779,353,499.00)	87.40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	466,020,052,000.00	461,489,449,382.00	(4,530,602,618.00)	99.03
Pendapatan Hibah	66,343,640,000.00	66,782,874,842.00	439,234,842.00	100.66
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106,030,000,000.00	107,361,335,445.00	1,331,335,445.00	101.26
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258,436,412,000.00	258,436,412,000.00	0.00	100.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35,210,000,000.00	28,908,827,095.00	(6,301,172,905.00)	82.10
BELANJA	1,940,245,226,611.19	1,863,502,828,110.13	(76,742,398,501.06)	96.04
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,146,931,663,256.19	1,122,949,019,444.00	(23,982,643,812.19)	97.91
Belanja Pegawai	679,834,930,033.19	662,778,873,449.00	(17,056,056,584.19)	97.49
Belanja Bunga	1,631,632,000.00	1,964,064,583.00	332,432,583.00	120.37
Belanja Hibah	55,583,592,000.00	50,515,064,812.00	(5,068,527,188.00)	90.88
Belanja Bantuan Sosial	8,244,660,000.00	8,093,600,000.00	(151,060,000.00)	98.17
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11,984,474,900.00	11,944,474,900.00	(40,000,000.00)	99.67
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	388,375,509,700.00	387,652,941,700.00	(722,568,000.00)	99.81
Belanja Tidak Terduga	1,276,864,623.00	0.00	(1,276,864,623.00)	0.00
BELANJA LANGSUNG	793,313,563,355.00	740,553,808,666.13	(52,759,754,688.87)	93.35
Belanja Pegawai	194,093,756,930.00	202,176,927,613.00	8,083,170,683.00	104.16
Belanja Barang dan Jasa	353,923,542,070.00	331,305,451,674.13	(22,618,090,395.87)	93.61
Belanja Modal	245,296,264,355.00	207,071,429,379.00	(38,224,834,976.00)	84.42
SURPLUS / (DEFISIT)	(68,824,262,540.19)	(41,602,943,798.82)	27,221,318,741.37	60.45
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	155,692,630,540.19	153,281,669,305.62	(2,410,961,234.57)	98.45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75,692,630,540.19	75,415,765,915.62	(276,864,624.57)	99.63
Penerimaan Pinjaman Daerah	80,000,000,000.00	77,865,903,390.00	(2,134,096,610.00)	97.33
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	86,868,368,000.00	71,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	82.35

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%) CAPAIAN
1	2	3	4	5
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	100.00
Pembayaran Pokok Utang	83,868,368,000.00	68,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	81.72
PEMBIAYAAN NETTO	68,824,262,540.19	81,746,739,615.62	12,922,477,075.43	118.78
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	40,143,795,816.80	40,143,795,816.80	0.00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 Unaudited

Adapun sebagai perbandingan secara utuh, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 beserta persentase kenaikan rata-rata dengan rinci sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.80
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019

URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019 <i>UNAUDITED</i>	% R
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1,722,252,909,030.04	1,785,911,075,230.15	1,821,899,884,311.31	2.86%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,319,284,807.04	296,676,436,263.15	308,445,489,137.31	1.38%
Pendapatan Pajak Daerah	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	100,695,231,898.00	34.20%
Hasil Retribusi Daerah	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	19,033,999,790.00	-3.90%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	10,840,310,633.00	30.77%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210,641,535,102.04	156,021,190,220.15	177,875,946,816.31	-5.96%
DANA PERIMBANGAN	1,075,045,860,549.00	1,071,215,246,998.00	1,051,964,945,792.00	-1.08%
Dana Transfer Umum	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	838,539,540,291.00	1.33%
Dana Transfer Khusus	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	213,425,405,501.00	-8.64%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	346,887,763,674.00	418,019,391,969.00	461,489,449,382.00	15.45%
Pendapatan Hibah	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	66,782,874,842.00	1622.59%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	107,361,335,445.00	7.71%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	258,436,412,000.00	6.64%
Bantuan Keuangan dari	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00	28,908,827,095.00	8.95%

URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019 UNAUDITED	% R
1	2	3	4	5
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
BELANJA	1,829,088,241,098.22	1,814,662,262,214.36	1,863,502,828,110.13	0.95%
BELANJA LANGSUNG TIDAK LANGSUNG	1,050,346,817,667.00	1,064,012,361,865.16	1,122,949,019,444.00	3.42%
Belanja Pegawai	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	662,778,873,449.00	3.18%
Belanja bunga	-	1,468,870,443.00	1,964,064,583.00	66.86%
Belanja Hibah	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	50,515,064,812.00	5.32%
Belanja Bantuan Sosial	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	8,093,600,000.00	-4.76%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	11,944,474,900.00	39.10%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	387,652,941,700.00	3.57%
Belanja Tidak Terduga	815,608,000.00	-	-	0.00%
BELANJA LANGSUNG	778,741,423,431.22	750,649,900,349.20	740,553,808,666.13	-2.48%
Belanja Pegawai	174,582,051,301.00	177,563,757,707.00	202,176,927,613.00	7.78%
Belanja Barang dan Jasa	250,388,658,063.00	263,637,636,747.20	331,305,451,674.13	15.48%
Belanja Modal	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	207,071,429,379.00	-22.81%
SURPLUS / (DEFISIT)	(106,835,332,068.18)	(28,751,186,984.21)	(41,602,943,798.82)	-14.19%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	232,225,166,662.58	117,161,445,444.40	153,281,669,305.62	-9.36%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	214,495,185,982.58	117,161,445,444.40	75,415,765,915.62	-40.50%
Penerimaan Pinjaman Daerah	17,729,980,680.00	-	77,865,903,390.00	0.00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8,228,389,150.00	12,717,627,920.00	71,534,929,690.00	258.52%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,189,000,000.00	10,422,000,000.00	3,000,000,000.00	-21.97%
Pembayaran Pokok Utang	39,389,150.00	2,256,548,000.00	68,534,929,690.00	4283.01%
Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	39,079,920.00	-	0.00%
PEMBIAYAAN NETTO	223,996,777,512.58	104,443,817,524.40	81,746,739,615.62	-37.55%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	117,161,445,444.40	75,692,630,540.19	40,143,795,816.80	-41.18%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 Unaudited

D. CAPAIAN ATAS PRESTASI YANG DIRAIH



Penghargaan atas capaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2019



Kabupaten Rembang raih Prestasi Opini WTP Tahun 2019



Penyerahan Piala Kanaga Award



Penghargaan TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Penghargaan Puskesmas Dengan Pelayanan Ramah Anak Tingkat Nasional

E. INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Akselerasi Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang periode Tahun 2016-2021, maka dilaksanakan upaya berupa penciptaan kegiatan dengan daya dongrak atau daya pintas untuk mempercepat fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

Periode Tahun 2019 terdapat beberapa kebijakan inovatif Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai akselerasi pelayanan kesehatan yang diantaranya adalah sebagai berikut

1. MAS HAJI

MAS HAJI yang merupakan akronim dari Puskesmas Sahabat Jiwa merupakan bentuk inovasi pelayanan di UPT Puskesmas Kecamatan Sedan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek sosial budaya sehingga masyarakat dapat secara terbuka berobat di Puskesmas. Kondisi tersebut secara efektif akan berdampak pada pencegahan penyakit dengan resiko menular, sehingga pencegahannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. ARJUNO

ARJUNO yang merupakan akronim Aplikasi Rujukan RSUD. Dr. R. Soetrasno Rembang adalah aplikasi yang bisa diakses secara khusus menggunakan tablet berbasis android. RSUD memberikan total 16 Puskesmas dan 1 layanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) berupa tablet android untuk koneksi aplikasi tersebut. Melalui aplikasi tersebut maka seluruh data terkait rujukan bisa diakses oleh pihak Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD. Bahkan, selama proses rujukan atau perjalanan berlangsung, komunikasi dua arah layaknya pesan dalam jaringan (daring) bisa dilakukan. Dari aplikasi bisa terekam jelas kondisi pasien, rekam penanganan medis yang sudah dilakukan, koneksi kamera untuk memotret kondisi pasien, serta pengiriman data rontgen atau laboratorium. Dengan adanya sejumlah fitur dalam aplikasi tersebut, akan membuat tim di IGD lebih siap menerima pasien rujukan. Sebab, data-data menyeluruh terkait kondisi pasien sudah bisa diterima dokter sebelum masuk ke IGD.

Pada tahun 2019 ARJUNO berhasil masuk dalam Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/53 Tahun 2019. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa usaha untuk melakukan percepatan pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera.



**Penyerahan Penghargaan Top Inovasi Provinsi Jawa Tengah
Kepada Pemerintah Kabupaten Rembang**

3. KRESNO dan OS-JEK

KRESNO atau disebut juga dengan Aplikasi *Online* Sistem Antrian RSUD. Dr. R. Soetrasno Rembang merupakan bentuk pembaharuan dari system antrian manual yang tidak efektif dan membutuhkan waktu registrasi relatif lama. Dengan adanya KRESNO maka diharapkan pasien dapat secara *online* melakukan registrasi antrian melalui gawai yang marak dimiliki oleh masyarakat, sehingga pelayanan registrasi antrean pasien akan lebih cepat dan tidak menumpuk di ruang antrian. Sejalan dengan upaya akslerasi pelayanan kesehatan, maka OS-JEK yang merupakan akronim dari Layanan Penghantaran Pulang Pasien Gratis merupakan salah satu bentuk inovasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat yang berobat di RSUD. OS-JEK pada Tahun 2019 sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/53 Tahun 2019 masuk ke dalam TOP 40 Inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

KRESNO (Aplikasi *Online* Sistem Antrian RSUD. Dr. R. Soetrasno)



RSUD dr. R. SOETRASNO
rumah dan profesional

TRAKERJAS DAUPURNA
KARS

SEMAKIN MUDAH
DENGAN
**APLIKASI
ONLINE**
SISTEM ANTRIAN
RSUD dr. R. SOETRASNO

DOWNLOAD RSUD REMBANG DI:
GET IT ON
Google Play

H. Abdul Hafidz
Bupati Rembang

CARA MUDAH

PENDAFTARAN RAWAT JALAN VIA APLIKASI ONLINE :

- ✓ Unduh dan install aplikasi dari Google Playstore dengan ketik keywords "RSUD REMBANG"
- ✓ Masukkan nomor handphone anda untuk mendaftar.
- ✓ Cek kode aktivasi di pesan (SMS).
- ✓ Masukkan password dan kode aktivasi.
- ✓ Login untuk mulai menjalankan aplikasi.

NIKMATI KEMUDAHAN ANTRIAN
KAPANPUN & DIMANAPUN DALAM SATU GENGAMAN

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang meningkat atas sasaran-sasaran strategisnya. Dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor: 060/2017/2018 tentang Indikafor Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021, terdapat 25 (dua puluh lima) sasaran strategis dengan hasil pengukuran kinerja sasaran rata-rata capaian kinerja sebesar 108,22 %. Dari 25 (dua puluh lima) sasaran strategis yang mempunyai kinerja sangat tinggi sebesar 20 sasaran, berkinerja tinggi sebanyak 1 sasaran, berkinerja sedang sejumlah 3 sasaran dan berkinerja rendah sejumlah 1 sasaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis, ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara BAPPEDA, Inspektorat, BPPKAD dan Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang untuk meningkatkan kualitas SAKIP dan penyusunan LKjIP serta mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas kinerja.
2. Peningkatan efektivitas implementasi *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-sakip* pada tahun 2019.

Rembang, Maret 2020



BUPATI REMBANG

H. Abdul Hafidz
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG



REVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2019

NOMOR : 700/019/2020

TANGGAL 19 MARET 2020



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT

Jl. Raya Rembang Lasem KM. 1,1 Rembang TELP. (0295) 691320

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2019, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja (LK). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019 menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Rembang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019.



**INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG**

FAHRUDIN, SH., MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT

Jl. Raya Rembang Lasem KM. 1,1 Rembang Telp. (0295) 691320

Rembang, 19 Maret 2020.

Nomor : 700/019/2020.
Lamp. : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu
atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten
Rembang Tahun 2019.

KEPADA

Yth. Bupati Rembang.

di -

REMBANG.

Dengan ini, Kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu LKjIP Kabupaten Rembang untuk Tahun 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Rembang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reuiu Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reuiu

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 060/0723/2020 tentang Reuiu LKjIP Kabupaten Rembang.
- d. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Rembang Nomor : 094/022/INSP/2020.

3. Pelaksanaan Reuiu

Reuiu atas LKjIP Kabupaten Rembang untuk Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan selesai.

4. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan Reuiu LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
- b. Sasaran Reuiu LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Reviu LKjIP Kabupaten Rembang tahun 2019 adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2019.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

1) Format

Kesimpulan terhadap penelaahan format LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2019, sebagai berikut :

- a) Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP);
- b) LKj telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- c) LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
- d) LKj telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- e) LKj telah menyajikan upaya perbaikan kedepan;
- f) LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik dan diagram.

2) Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap penelaahan mekanisme penyusunan LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2019, sebagai berikut :

- a) LKjIP telah disusun oleh Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- b) Informasi yang disampaikan dalam LKj sudah didukung dengan data yang memadai;
- c) Mekanisme penyampaian data dan informasi dari Unit Kerja ke Tim Penyusunan Laporan Kinerja sudah memadai;
- d) Penanggungjawab pengumpulan data / informasi telah ditunjuk di setiap Perangkat Daerah terkait / Unit Kerja;
- e) Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;
- f) Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh Unit Kerja terkait;
- g) LKjIP bukan merupakan gabungan dari LKjIP Unit Kerja dibawahnya.

3) Substansi

Kesimpulan terhadap penelaahan substansi LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2019, sebagai berikut :

- a) Tujuan / sasaran pada LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Perjanjian Kinerja;

- b) Tujuan / sasaran pada LKj telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c) Target indikator kinerja tujuan / sasaran pada LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan / sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- d) LKj tidak memuat IKU sehingga belum bisa disesuaikan dengan dokumen yang telah ditetapkan (Peraturan Bupati Rembang Nomor : 27 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2016-2021);
- e) Telah terdapat perbandingan data kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu tetapi belum terdapat perbandingan dengan data standar nasional;
- f) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran.

7. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang pada penelaahan Substansi LKjIP Kabupaten Rembang tahun 2019, supaya :

- a. LKj mencantumkan IKU berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan (Peraturan Bupati Rembang Nomor : 27 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2016-2021);

- b. LKj mencantumkan perbandingan data kinerja tahun 2019 dengan data kinerja standar nasional.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG' at the top and 'INSPEKTORAT' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the word 'INSPEKTORAT' in the center. A signature is written over the stamp.
**INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG**
FAHRUDIN, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004.

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Rembang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

Rembang, 26 Maret 2020

Nomor : 060 / 0812 / 2020
Lampiran : -
Hal : Laporan Tindak Lanjut atas
Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kabupaten
Rembang Tahun 2019.

K e p a d a :
Yth. Bupati Rembang
di-
REMBANG

Menindaklanjuti Surat Inspektur Kabupaten Rembang Nomor: 700/019/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2019, Kami sampaikan Laporan Tindak lanjut atas Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. - Rekomendasi :

LKj mencantumkan IKU berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan (Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021);

- Tindak Lanjut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sudah mencantumkan IKU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 060/2017/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Sedangkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tidak dicantumkan dalam LKjIP Tahun 2019 karena menggunakan RPJMD perubahan sehingga akan dicantumkan dalam LKjIP Tahun 2020.

2. - Rekomendasi :

LKj mencantumkan perbandingan data kinerja tahun 2019 dengan data kinerja standar nasional.

- Tindak Lanjut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sudah mencantumkan perbandingan data kinerja tahun 2019 dengan data kinerja standar nasional :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rembang Tahun 2019 dengan Nasional Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Tahun 2018
		Kabupaten Rembang	Nasional	Nasional
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,44		65,14

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa Kabupaten Rembang masih dibawah Nasional. Hal ini Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menyempurnakan komponen-komponen indeks seperti menambah Indeks Kualitas Air dan indeks yang mengukur kapasitas untuk merespon tekanan dan kondisi lingkungan hidup. Prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah upaya memperbaiki dan memperkuat norma-norma sosial. Selain itu, pembangunan harus berdasarkan daya dukung dan daya tampung, prinsip pembangunan berbasis ekoregion.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Rembang dengan Nasional Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019	
		Kabupaten Rembang	Nasional
1.	Realisasi investasi PMA dan PMDN	8,029 triliun	809,6 triliun

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2019 di Kabupaten Rembang hanya 1% dibanding Nasional. Hal ini perlu terobosan dan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menarik investor untuk berinvestasi ke Rembang.

3. Sasaran Meningkatnya Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang dengan Capaian Standar Nasional

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten Tahun 2019	Capaian Standar Nasional tahun 2019
1.	Rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk (%)	6,27	3,1

4. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Baku

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase cakupan air baku di Kabupaten Rembang terhadap capaian standar nasional

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Capaian Standar Nasional tahun 2019
1.	Persentase cakupan air baku	45,72%	76,2%

5. Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang Dengan Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Nasional

Indikator	Proyeksi Nasional Tahun 2015-2020	Kabupaten Rembang Tahun 2019
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,19%	0,79%

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia



SETO MUNTOHA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620711 199103 1 004

TEMBUSAN :

Yth. Inspektur Kabupaten Rembang



BUPATI REMBANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ABDUL HAFIDZ,S,Pd.I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rembang, 7 Januari 2019

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target PK
1.Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan		
a.Terwujudnya <i>Good Governance</i>	1)Tingkat maturitas SPIP	3
	2)Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	3)Nilai SAKIP	64
2.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan		
a.Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	4)Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	65%
3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel , transparan dan partisipatif		
a.Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	5)Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	78
1.Membangun Kemandirian Ekonomi daerah		
a.Meningkatnya kinerja sektor pertanian	6)Indeks Produksi Padi	1,11
	7)Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	1,5

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target PK
b.Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	8)Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	14,6
	9) Kontribusi sektor industri pengolahan	21,4
2.Menurunkan angka pengangguran		
a.Menurunnya angka pengangguran	10)Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00%
3.Menurunkan angka kemiskinan		
a.Menurunnya angka kemiskinan	11)Persentase penduduk miskin	13,83%
4.Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup		
a.Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67
1.Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi		
a.Meningkatnya Nilai Investasi	13)Realisasi investasi PMA dan PMDN	4.747.479
2.Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif		
a.Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	14)Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	8,75
b.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	15)Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	2,3
1.Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.		

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target PK
a.Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan Jembatan	16)Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	72,43
	17)Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	85,71
b.Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	18)persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	9,35%
c.Meningkatnya ketersediaan air baku	19) Persentase cakupan Air baku	80%
2.Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai		
a. Meningkatkan jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	20)Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	4
1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat		
a.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21) AKI (Angka Kematian Ibu)	6
	22) AKB (Angka Kematian Bayi)	115
2.Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah Diakses seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang		
a.Meningkatnya angka rata rata lama sekolah	23) Rata-rata lama sekolah	7,6
	24) Angka Harapan Lama Sekolah	12,2
3.Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga		

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target PK
a.Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga	25)Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional	40
1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat		
a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	26). Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100,00%
2.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat		
a.Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	27) Persentase PMKS yang ditangani	60%
3.Meningkatkan keberdayaan masyarat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak		
a. Meningkatnya keberdayaan masyarat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	28)Cakupan desa ramah anak	75%
	29)Cakupan Pemenuhan Hak Anak	65%

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target PK
4. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu		
a. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	30) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16%
5. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan		
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	31) Persentase pertumbuhan penduduk	0,65%
	32) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,61
1. Mewujudkan kedaulatan pangan		
a. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan	33) Skor PPH	87,90%
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis		
a. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	34) Indeks Produksi Pertanian	6,5
	35) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	2%

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.104.672.500	DINAS PENDIDIKAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	224.000.000	DAU
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	DAU
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	226.000.000	DAU
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.606.530.000	DAU dan DAK
6	Program Pembinaan sekolah Dasar	47.404.018.000	DAU dan DAK
7	Program Pembinaan Ketenagaan	2.812.878.000	DAU
8	Program Pendidikan Non Formal	25.264.100.000	DAU
9	Program Pengembangn dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	13.993.789.350	DAU
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	250.000.000	DAU
11	Program Pendidikan Khusus dan layanan khusus	185.000.000	DAU
12	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	325.000.000	DAU
13	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga	1.140.950.000	DAU
14	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Olah raga	15.000.000	DAU
15	Program Penyusunan , Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah	1.365.000.000	DAU
16	Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pemdidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	200.000.000	DAU
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.950.000.000	DINAS KESEHATAN
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	402.000.000	
19	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	167.000.000	
20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	270.000.000	
21	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.329.305.000	
22	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29.569.715.000	
23	Program Pengawasan Obat dan Makanan	101.910.000	
24	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	55.300.000	
25	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	95.400.000	
26	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	24.000.000	
27	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular*	412.686.680	

28	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	395.000.000	
29	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	3.842.640.320	
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	12.000.000	
31	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	11.000.000	
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.372.000.000	
33	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	18.000.000	
34	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	12.000.000	
35	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*	280.000.000	
36	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas	49.040.767.600	
37	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.921.403.000	DPUTARU
38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430.000.000	
39	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85.000.000	
40	Program Perencanaan tata Ruang	270.000.000	
41	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	48.922.607.000	
42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	6.935.000.000	
43	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13.600.000.000	
44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	650.000.000	
45	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1.625.530.000	
46	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.170.000.000	
47	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	500.000.000	
48	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	55.000.000	
49	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong	600.000.000	
50	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	155.000.000	
51	Program Pembangunan Sistem Informasi Irigasi	100.000.000	
52	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	775.900.000	BAPPEDA
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	752.500.000	
54	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.000.000	
55	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	172.000.000	

56	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.500.000	
57	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	17.000.000	
58	Program Pengembangan data dan Informasi perencanaan Pembangunan	384.000.000	
59	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	30.000.000	
60	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	50.000.000	
61	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000	
62	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.212.500.000	
63	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	565.000.000	
64	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	705.000.000	
65	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	610.000.000	
66	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	20.000.000	
67	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	72.500.000	
68	Program Penelitian dan Pengembangan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	793.000.000	
69	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	480.000.000	
70	Program Kerjasama Pembangunan	244.100.000	
71	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	50.000.000	
72	Program Perencanaan tata Ruang	20.000.000	
73	Program Pemanfaatan Ruang	20.000.000	
74	Program Administrasi Perkantoran	11.300.200.000	DISHUB
75	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	178.000.000	
76	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10.000.000	
77	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	
78	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.372.580.000	
79	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	725.000.000	
80	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.295.000.000	
81	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	150.000.000	
82	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	230.000.000	
83	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas	395.000.000	

84	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran	150.000.000	
85	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	100.000.000	
86	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.758.376.000	Dinas Lingkungan hidup
87	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	777.000.000	
88	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	45.000.000	
89	Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan sumber daya alam	100.000.000	
90	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup	50.000.000	
91	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	50.000.000	
92	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	45.000.000	
93	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	65.000.000	
94	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	825.000.000	
95	Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan	15.000.000	Dinduk Capil
96	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.675.598.000	DAK
97	Program Penataan Administrasi Kependudukan	850.939.250	DAU
98	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	199.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
99	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	76.000.000	
100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99.000.000	
101	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4.000.000	
102	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	569.400.000	
103	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	309.000.000	
104	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	393.000.000	
105	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	235.000.000	
106	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	45.274.000	
107	Program Pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	20.000.000	
108	Program Pemerdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	850.000.000	
109	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	38.100.000	

110	Program Penanganan Anak Terlantar	200.000.000	
111	Program Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	99.000.000	
112	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	213.000.000	
113	Program Keserasian, Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100.000.000	
114	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	400.000.000	
115	Program Peningkatan Peran Serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	460.000.000	
116	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	90.000.000	
117	Program Peningkatan Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak	420.000.000	
118	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	295.000.000	
119	Program Sistem Data Gender dan Anak	5.000.000	
120	Program Keluarga Berencana	6.285.190.000	
121	Program Pelayanan Kontrasepsi	73.000.000	
122	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	1.197.000.000	
123	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	45.000.000	
124	Program Ketahanan Keluarga	75.000.000	
125	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	30.000.000	
126	Program Pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD	5.000.000	
127	Program Pengembangan Sistem Distribusi	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
128	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	100.000.000	
129	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	112.000.000	
130	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	240.000.000	
131	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	130.000.000	
132	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	300.000.000	
133	Program Peningkatan Kemetrolagian dan perlindungan Konsumen	787.000.000	
134	Program Peningkatan dan Pengembangn Ekspor	50.000.000	

135	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.151.772.000	
136	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan	32.000.000	
137	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru	40.000.000	
138	Program Pembinaan Pedagang	15.000.000	
139	Program Promosi produk unggulan daerah	752.500.000	
140	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	25.000.000	
141	Program peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi	300.000.000	
142	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	3.100.000.000	
143	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	70.000.000	
144	Program penataan struktur industri dan kawasan industri	50.000.000	
145	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	50.000.000	
146	Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	470.000.000	
147	Program Pembinaan Industri	55.000.000	
148	Program Pembinaan Lingkungan sosial	225.000.000	
149	Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha	25.000.000	
150	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.063.100.000	KANTOR KESBANGPOL
151	Program Pendidikan Politik Masyarakat	66.000.000	
152	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	867.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
153	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	736.400.000	
154	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.500.000	
155	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	242.500.000	
156	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	670.000.000	
157	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.368.656.000	
158	Program Penegakan Peraturan Daerah	690.000.000	
159	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	30.000.000	
160	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82.000.000	
161	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.773.000.000	
162	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	729.000.000	BPBD
163	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.000.000	

164	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.000.000	
165	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.500.000	
166	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	141.500.000	
167	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	305.000.000	
168	Program Penerapan Upaya mitigasi struktural dan Non Struktural	400.000.000	
169	Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	200.000.000	
170	Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	356.600.000	
171	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	2.775.000.000	
172	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	15.000.000	
173	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
174	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.373.000.000	
175	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.000.000	
176	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	23.473.000.000	
177	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	60.000.000	
178	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	270.000.000	
179	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	675.000.000	
180	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	72.000.000	
181	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.270.000.000	
182	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.100.780.000	
183	Program Kerjasama Pembangunan	148.000.000	
184	Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik	2.063.300.000	
185	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	
186	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	110.000.000	
187	Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan	1.105.000.000	
188	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.223.446.000	SEKRETARIAT DPRD
189	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.996.069.000	
190	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	59.920.000	
191	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	779.400.000	

192	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	101.440.000	
193	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	26.759.297.000	
194	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.629.538.000	BPPKAD
195	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	268.000.000	
196	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	
197	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000	
198	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.750.000.000	
199	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.263.575.000	
200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.366.540.000	INSPEKTORAT
201	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	386.000.000	
202	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	4.380.455.000	
203	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	95.200.000	
204	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	96.275.000	
205	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	306.646.600	KECAMATAN REMBANG
206	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	531.000.000	
207	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000	
208	Program Peningkatan Penunjang Pemerintahan Desa	3.239.500.000	
209	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.500.000	KECAMATAN KALIORI
210	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.250.000	
211	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.000.000	
212	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.000.000	
213	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	404.140.000	
214	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.500.000	KECAMATAN SULANG
215	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.000.000	
216	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.000.000	
217	Program Disiplin Aparatur	5.000.000	
218	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	462.950.000	
219	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	216.300.000	KECAMATAN SUMBER

220	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77.725.000	
221	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.000.000	
222	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.000.000	
223	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	349.047.500	
224	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.424.000	KECAMATAN BULU
225	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.400.000	
226	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	800.000	
227	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.000.000	
228	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	435.300.000	
229	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	239.044.000	KECAMATAN LASEM
230	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor	152.000.000	
231	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.500.000	
232	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	460.046.000	
233	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	20.000.000	
234	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	231.000.000	KECAMATAN PANCUR
235	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.000.000	
236	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.400.000	
237	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	
238	Program Peningkatan Penunjang Pemerintah Kecamatan	422.960.000	
239	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.275.000	KECAMATAN SLUKE
240	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.172.500	
241	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	391.700.000	
242	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	234.000.000	KECAMATAN PAMOTAN
243	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.000.000	
244	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	412.600.000	
245	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.000.000	
246	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	269.300.000	KECAMATAN GUNEM
247	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	52.000.000	
248	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	332.260.000	

249	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.000.000	
250	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244.210.000	KECAMATAN SALE
251	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.174.000	
252	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.100.000	
253	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.000.000	
254	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	
255	Program Peningkatan Penunjang Pemerintah Kecamatan	424.280.000	
256	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	271.535.000	KECAMATAN KRAGAN
257	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	523.000.000	
258	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000	
259	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	634.553.500	
260	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	
261	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	224.425.000	KECAMATAN SEDAN
262	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	47.500.000	
263	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.500.000	
264	Program Pengembangan sistem Pelaporan	12.800.000	
265	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.829.000	
266	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	441.785.000	
267	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.530.000	KECAMATAN SARANG
268	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	555.500.000	
269	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.000.000	
270	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19.000.000	
271	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	637.220.000	
272	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	712.000.000	PUSTASIP
273	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	175.000.000	
274	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	
275	Program Pengembangan Budaya Baca	3.387.450.000	
276	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	280.000.000	
277	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	2.130.400.000	
278	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	1.983.050.000	

279	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	1.924.800.000	
280	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi	20.000.000	
281	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.561.076.000	DINTANPAN
282	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	820.000.000	
283	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	231.800.000	
284	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	158.000.000	
285	Program Penguatan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	35.000.000	
286	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	20.000.000	
287	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	15.000.000	
288	Program Pengembangan Penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan Pangan Segar	302.454.173	
289	Program Desa Mandiri Pangan	300.000.000	
290	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	1.070.000.000	
291	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	15.000.000	
292	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	30.000.000	
293	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.727.716.173	
294	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	5.342.500.000	
295	Program Peningkatan Produksi Pertanian	8.282.620.000	
296	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	477.454.173	
297	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	420.000.000	
298	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perternakan	2.052.000.000	
299	Program Pengembangan Agribisnis	652.000.000	
300	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian	36.624.651.000	
301	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	4.300.000.000	
302	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	607.100.000	DINBUDPAR
303	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.000.000	
304	Program Pengembangan Keragaman Budaya	538.000.000	
305	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	765.800.000	
306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.000.000	
307	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	220.000.000	
308	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.317.905.000	

309	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	255.000.000	
310	Program Pembinaan Sejarah Lokal	200.000.000	
311	Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	117.000.000	
312	Program Pengembangan ekonomi kreatif	300.000.000	
313	Program Pengembangan nilai budaya	60.000.000	
314	Program Pembinaan kesenian masyarakat	60.000.000	
315	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	10.000.000	
316	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	658.000.000	DINLUTKAN
317	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.000.000	
318	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000	
319	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	152.000.000	
320	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	126.200.000	
321	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	240.000.000	
322	Program Pengembangan Kawasab Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar	50.000.000	
323	Program Pengembangan Nelayan Kecil	964.082.000	
324	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	250.000.000	
325	Program Pengelolaan TPI Terpadu	11.279.848.000	
326	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.375.478.000	
327	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	935.290.000	DISKOMINFO
328	Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	155.000.000	
329	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.000.000	
330	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	25.000.000	
331	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.650.000.000	
332	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	95.000.000	
333	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	2.570.000.000	
334	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	49.000.000	
335	Program Peningkatan Kapsitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	122.000.000	
336	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	135.000.000	

337	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	930.316.000	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman
338	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	3.764.547.176	
339	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.000.000	
340	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000	
341	Program Pengembangan Perumahan	3.224.929.640	
342	Program Lingkungan Sehat Perumahan	7.558.938.000	
343	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	119.500.000	
344	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	615.900.000	
345	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.000.000	
346	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	103.900.000	
347	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.316.279.000	
348	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah		
349	Program Administrasi Perkantoran	600.000.000	BKD
350	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	111.000.000	
351	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2.983.570.200	
352	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	83.000.000	
353	Program Pendidikan Kedinasan	362.950.000	
354	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	3.410.750.000	
355	Program Pelayanan administrasi perkantoran	479.306.000	DINPERMADES
356	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000	
357	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	
358	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	
359	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39.000.000	
360	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	160.000.000	
361	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	158.000.000	
362	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	132.000.000	
363	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	1.522.500.000	
364	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	207.000.000	

365	Program Peningkatan sarana prasaran pemerintah dan pelayanan umum	590.000.000	
366	Pogram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintah Desa	795.500.000	
367	Program Peningkatan Peran serta Perempuan di Perdesaan	10.000.000	
368	Program Penanggulangan Kemiskinan	10.000.000	
369	Program Pelayanan administrasi perkantoran	783.530.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
370	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	761.000.000	
371	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	
372	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	329.820.000	
373	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000	
374	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.269.000.000	
375	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	335.000.000	
376	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	255.000.000	
377	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	115.000.000	
378	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	205.000.000	
379	Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi	185.000.000	
380	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	25.000.000	
381	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	80.000.000	
382	Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	612.720.000	
		594.723.935.335	

Jumlah Anggaran : Rp 594,723,935,335, - (Lima ratus Sembilan Puluh Empat milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Rembang, 7 Januari 2019



RPJMD LAMA

PERUBAHAN RPJMD

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN	Satuan	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KET
1	2	3	4					11
B.	BELANJA LANGSUNG							
	Urusan Umum				Urusan Umum			
				I	URUSAN KESEKRETARIATAN			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah			
		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%			Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%			Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%			Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%			Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		%					
		Persentase kehadiran ASN tepat waktu	%					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%			Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	%	
					Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik			
						Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	%	
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah							

		Persentase Barang Inventarisasi dalam kondisi baik	%				
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Pendidikan			1	URUSAN PENDIDIKAN		DINDIKPORA
	Program Pendidikan Anak Usia Dini				Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan		DINDIKPORA
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0-6 tahun	%			APK PAUD 3-6 Tahun	%
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%			Persentase Lembaga PNF dan PAUD yang terakreditasi A	%
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal					Persentase Desa Vokasi	%
		Persentase kelulusan kejar paket A, B, C	%				
		Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin	%				
		Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas	%				
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus						DINDIKPORA
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SD	%				DINDIKPORA
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SMP	%				DINDIKPORA
	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal						DINDIKPORA
		Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti	%				DINDIKPORA
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)				Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar		DINDIKPORA
		Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	Skor			APM SD/MI/ sederajat	point
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Skor			Persentase SD yang terakreditasi A	%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%				DINDIKPORA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%				DINDIKPORA
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%				DINDIKPORA

		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%					DINDIKPORA
	Program Pendidikan Menengah				Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			DINDIKPORA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	%			APM SMP/MTs/ sederajat	point	DINDIKPORA
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%			Persentase SMP yang terakreditasi A	%	DINDIKPORA
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			DINDIKPORA
		Guru Persentase yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%			Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi dan berkompentensi	%	DINDIKPORA
		Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%					DINDIKPORA
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%					DINDIKPORA
		Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%					DINDIKPORA
		Persentase Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%					DINDIKPORA
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							DINDIKPORA
		Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten	%					DINDIKPORA
		Persentas pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	%					DINDIKPORA
		Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%					DINDIKPORA
		Cakupan pelayanan penerbitan izin pendidikan	%					DINDIKPORA
	Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah							DINDIKPORA
		Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang tertangani	%					DINDIKPORA
2	Urusan Kesehatan			2	URUSAN KESEHATAN			DINKES

	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat			DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%			Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	DINKES
		Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	%			Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	DINKES
		Persentase penurunan AKI	skor			Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	DINKES
		Persentase penurunan AKB	skor			Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	DINKES
		Persentase Desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	%			Cakupan pelayanan kesehatan lansia	%	DINKES
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%			Prevalensi balita gizi buruk	%	DINKES
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					Prevalensi stunting	%	DINKES
		Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%					DINKES
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%					DINKES
		Rasio posyandu per satuan balita	%					DINKES
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			DINKES
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	DINKES
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%			Cakupan UKBM (posyandu strata mandiri)	%	DINKES
						Cakupan desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	DINKES
						Cakupan rumah tangga sehat	%	DINKES
						Jumlah komunitas masyarakat sehat yang terbentuk	skor	DINKES
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga			DINKES
		Cakupan rumah sehat	%			Cakupan desa STBM	skor	DINKES
		Cakupan rumah bebas jentik	%			Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan memenuhi syarat IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan)	%	DINKES
		Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	%			Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat - Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat IKL	%	DINKES

		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	%			Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga	%	DINKES
		Cakupan jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat	%					DINKES
		Cakupan Sanitasi dan Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat	%					DINKES
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional			DINKES
		Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%			Persentase Puskesmas terakreditasi	%	DINKES
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus disediakan oleh RSUD	%			Persentase RS terakreditasi	%	DINKES
		Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	%			Cakupan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	%	DINKES
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional	%			Cakupan kepesertaan JKN masyarakat	%	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	%	DINKES
		Cakupan jaminan kesehatan penduduk miskin	%			Indeks keluarga sehat	%	DINKES
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan							DINKES
		Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan	%					DINKES
		Rasio dokter per satuan penduduk (10.000 penduduk)	skor					DINKES
		Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	%					DINKES
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita							DINKES
		Cakupan Penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	%					DINKES
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia							DINKES
		Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	%					DINKES

	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						DINKES
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%				DINKES
		Cakupan kunjungan bayi	%				DINKES
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%				DINKES
		Cakupan pelayanan nifas	%				DINKES
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%				DINKES
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%				DINKES
		Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%				DINKES
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan			DINKES
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%		Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang memadai	%	DINKES
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	DINKES
		Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani	%		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	DINKES
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%				DINKES
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya						DINKES
		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	%				DINKES
		Ratio bed rawat inap per 10.000 penduduk	skor				DINKES

		Persentase puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%					DINKES
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan				Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan			DINKES
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kualitas SDM Kesehatan	%			Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	%	DINKES
						Persentase puskesmas yang terintegrasi E-Health Rembang	%	DINKES
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular			DINKES
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%			Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TBC	%	DINKES
		Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%			Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	DINKES
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%			Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	DINKES
		Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang tertangani	%			Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	DINKES
		Persentase penanganan kasus diare per 1000 penduduk yang tertangani	%			Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	DINKES
		Persentase kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani	%			Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	%	DINKES
		Persentase ODHA terdata yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ATR)	%			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Usia Produktif	%	DINKES
		Persentase kasus Filariasis (kaki gajah) yang ditangani	%			Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat	%	DINKES
		Persentase penanganan penderita malaria	%			% Desa/ Kelurahan Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	DINKES
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular							DINKES
		Prevalensi tekanan darah tinggi	%					DINKES

		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%						DINKES
		Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	%						DINKES
		Persentase Desa/Kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%						DINKES
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas								DINKES
		Persentase peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi	%						DINKES
	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang				RSUD
		Skor Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat (I/SKM) RSUD	Skor		Mutu Nasional	Kepatuhan identifikasi pasien	%		RSUD
		BOR (Bed Occupancy Ratio)	%			Emergency respon time	%		RSUD
		AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%			Waktu tunggu rawat jalan	%		RSUD
		TOI (Turn Over Interval)	%			Penundaan operasi elektif	%		RSUD
		BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	%			Kepatuhan jam visite dokter spesialis	%		RSUD
		NDR (Net Death Rate)	%						RSUD
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	%			Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium	%		RSUD
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	%			Kepatuha penggunaan formularium nasional bagi provider BPJS	%		RSUD
		Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit	%			Kepatuhan cuci tangan	%		RSUD
		Ketersediaan Obat di Rumah Sakit	%			Kepatuhan pencegahan resiko akibat pasien jatuh	%		RSUD
	tambahan 1 program					Kepatuhan terhadap clinical pathway	%		RSUD
						Kepuasan pasien dan keluarganya	%		RSUD
						Kecepatan respon terhadap komplain	%		RSUD

	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						DPU TARU
		Persentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan per tahun	%				DPU TARU
		Persentase jembatan dalam kondisi baik yang direhabilitasi per tahun	%				DPU TARU
	Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan						DPU TARU
		Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur	%				DPU TARU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						DPU TARU
		proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%				DPU TARU
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan						DPU TARU
		persentase infrastruktur pedesaan (air bersih) dalam kondisi baik	%				DPU TARU
	Program pembinaan jasa konstruksi						DPU TARU
		persentase peserta pembinaan yang lulus uji kompetensi	%				DPU TARU
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong						DPU TARU
		persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%				DPU TARU
		persentase drainase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	%				DPU TARU
	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						DPU TARU
		Persentase luapan limpasan saluran air jalan protokol yang tertangani	%				DPU TARU

	Program pembangunan sistem informasi irigasi				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya			DPU TARU
		Pemanfaatan sistem informasi irigasi dalam perumusan kebijakan	%			Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik (Formulasi : jumlah bangunan air/irigasi dalam kondisi baik / total bangunan air/ irigasi x 100 %)	%	DPU TARU
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya							DPU TARU
		Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%					DPU TARU
		rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	%					DPU TARU
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya							DPU TARU
		persentase embung dan sungai kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%					DPU TARU
	Program penyediaan dan pengolahan air baku							DPU TARU
		Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%					DPU TARU
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				<i>bergeser di URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Program Pengembangan Kawasan Permukiman)</i>			DPU TARU
		Cakupan akses air Minum						DPU TARU
		Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	%					DPU TARU
	Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah				<i>bergeser di URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung)</i>			DPU TARU

		persentase kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik	%					DPU TARU
	Program perencanaan tata ruang				Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang			DPU TARU
		persentase penetapan rencana detil tata ruang menjadi peraturan daerah	%			Rasio Kesesuaian Tata Ruang (Formulasi : Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan/Jumlah Pemohon Yang Sesuai Peruntukannya X 100%)	%	DPU TARU
	Program pengendalian pemanfaatan ruang							DPU TARU
		persentase pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%					DPU TARU
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh							DPU TARU
		Pusat pertumbuhan	kawasan					DPU TARU
4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			4	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			DPKP
	Program pengembangan perumahan				Program Pengembangan Kawasan Pemukiman			DPKP
		Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%			Persentase Cakupan Sanitasi Layak (Formulasi= Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	DPKP
						Persentase Cakupan Akses Air Minum (Formulasi = Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	DPKP
						Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh (Formulasi = Luas Pengurangan Kawasan Kumuh/Luas Kawasan Kumuh x 100%)	%	DPKP
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung			DPKP

		Persentase kawasan permukiman kumuh	%			Persentase penurunan rumah tidak layak huni (Formulasi = jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani / jumlah rumah tidak layak huni x 100%)	%	DPKP
						Rasio kesesuaian peraturan bangunan gedung (Formulasi : Jumlah rekomendasi kelayakan bangunan gedung yang disetujui/ total jumlah permohonan x 100%)	%	DPKP
	Program lingkungan sehat perumahan				Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman			DPKP
		Cakupan sanitasi layak	%			Rasio Ruang Terbuka Hijau (Formulasi = Luas RTH publik yang dipelihara/jumlah luas RTH publik x 100%)	%	DPKP
	Program pengelolaan areal pemakaman					Rasio Makam (Formulasi = Luas Makam yang tertata / total luas makam x 100%)	%	DPKP
		persentase ketersediaan tempat pemakaman umum	%					DPKP
5.	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			5	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtrantibmas			SATPOL PP
		Persentase kriminalitas yang tertangani	%			Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada) x 100%	%	SATPOL PP
		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%			Persentase Kecamatan yang kondusif (Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%)	%	SATPOL PP
	Program Penegakan Peraturan Daerah							SATPOL PP

		persentase pelanggaran Perda yang ditangani	%				SATPOL PP
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan						SATPOL PP
		rasio poskamling per 10.000 penduduk	%				SATPOL PP
		cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa	%				SATPOL PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat		SATPOL PP
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	%			Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk)	% SATPOL PP
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%			Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tingkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%)	% SATPOL PP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						SATPOL PP
		Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	%				SATPOL PP
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		KESBANGPOL
		persentase konflik sosial yang tertangani	%			Persentase Lembaga politik dan Ormas yang Pahami Politik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	% KESBANGPOL
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%				KESBANGPOL

	Program Pendidikan Politik Masyarakat						KESBANGPOL	
		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%				KESBANGPOL	
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan pendidikan politik	%				KESBANGPOL	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		BPBD	
		Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%			Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana (Jumlah Desa Tangguh Bencana Dibanding Total Desa Rawan Bencana) X 100%	%	BPBD
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana				Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana		BPBD	
		Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi	%			Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani (Jumlah Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani Dibagi Jumlah Korban Terdampak Bencana) X 100%	%	BPBD
		Persentase Sarpras sanitasi di daerah bencana	%				BPBD	
	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana		BPBD	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%			Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Dibanding Jumlah Masyarakat Yang Terdampak Bencana) X 100%	%	BPBD
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit				BPBD	

		persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadam kebakaran	%					BPBD
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana							tidak ada di rpjmd
	Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana							tidak ada di rpjmd
	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana							tidak ada di rpjmd
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							tidak ada di rpjmd
	tambahan 4 program di RKPD							
6.	Urusan Sosial			6	URUSAN SOSIAL			DINSOS PPKB
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan			DINSOS PPKB
		Pertumbuhan KUBE-FM	kelompok			Persentase Kemandirian FM	%	DINSOS PPKB
		Persentase PMKS yang ditangani	%					DINSOS PPKB
		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%					DINSOS PPKB
		Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%					DINSOS PPKB
		Persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%					DINSOS PPKB
	Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.							DINSOS PPKB
		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	%					DINSOS PPKB
	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin							DINSOS PPKB
		Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro	%					DINSOS PPKB
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial			DINSOS PPKB

		Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat	%					DINSOS PPKB
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%			Persentase keberfungsian sosial PMKS	%	DINSOS PPKB
		Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan	%					DINSOS PPKB
		Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	%					DINSOS PPKB
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							DINSOS PPKB
		Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan sosial	%					DINSOS PPKB
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%					DINSOS PPKB
		Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina	%					DINSOS PPKB
	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat							DINSOS PPKB
		Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	%					DINSOS PPKB
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma							DINSOS PPKB
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%					DINSOS PPKB
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)							DINSOS PPKB

		Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	%				DINSOS PPKB	
		persentase napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang memanfaatkan hasil pembinaan	%				DINSOS PPKB	
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo						DINSOS PPKB	
		Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik	%				DINSOS PPKB	
	Program Penanganan Anak Terlantar						DINSOS PPKB	
		Persentase penanganan anak-anak terlantar	%				DINSOS PPKB	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
1	Urusan Tenaga Kerja				URUSAN TENAGA KERJA		DPMPTSP NAKER	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		DPMPTSP NAKER	
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang			Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	%	DPMPTSP NAKER
		persentase fasilitas pelatihan yang bersertifikat	%					DPMPTSP NAKER
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							DPMPTSP NAKER
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%					DPMPTSP NAKER
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%					DPMPTSP NAKER
		Rasio penduduk yang bekerja	%					DPMPTSP NAKER
		Tingkat pengangguran terbuka	%					DPMPTSP NAKER
		Rasio ketergantungan	%					DPMPTSP NAKER
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			DPMPTSP NAKER

		persentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	%			Persentase Ketaatan Badan Usaha terhadap Peraturan PerUndang-undangan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	DPMPTSP NAKER	
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							DPMPTSP NAKER	
		persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%					DPMPTSP NAKER	
		persentase keikutsertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan	%					DPMPTSP NAKER	
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		DINSOS PPKB	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan					Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan		DINSOS PPKB	
		Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	%				Persentase Industri Rumahan Perempuan (Industri Rumahan) Miskin Yang Mendapatkan Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha	%	DINSOS PPKB
		Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%					DINSOS PPKB	
		Persentase lembaga layanan perlindungan yang aktif di Desa	%					DINSOS PPKB	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan							DINSOS PPKB	
		persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%					DINSOS PPKB	
		persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD	%					DINSOS PPKB	
		persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%					DINSOS PPKB	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		DINSOS PPKB	

		Persentase APBDes Responsife gender dan perlindungan anak	%			Persentase PD yg menyusun PPRG/A	%	DINSOS PPKB
		Persentase OPD yang memiliki anggaran responsif anak	%			Persentase Cakupan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	DINSOS PPKB
	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan					Persentase Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan	%	DINSOS PPKB
		Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%					DINSOS PPKB
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan	%					DINSOS PPKB
	Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak							DINSOS PPKB
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan	%					DINSOS PPKB
		Rasio SDM yang memiliki sertifikasi mengelola ABK terhadap ABK	%					DINSOS PPKB
		Cakupan tingkat pembinaan terhadap forum anak	%					DINSOS PPKB
		Rasio ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan anak terhadap jumlah anak	%					DINSOS PPKB
		Rasio kegiatan / event dengan kelompok anak	%					DINSOS PPKB
	Program Pemberdayaan Perempuan anak							DINSOS PPKB
		Persentase perlindungan khusus terhadap anak	%					DINSOS PPKB
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%					DINSOS PPKB

		Nilai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	nilai				DINTANPAN
		persentase Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina	%				DINTANPAN
		persentase pengembangan model pemantauan, distribusi, harga dan cadangan pangan	%				DINTANPAN
	Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar						DINTANPAN
		Skor PPH	skor				DINTANPAN
		persentase pemanfaatan hasil pendampingan dalam upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar	%				DINTANPAN
	Program Desa Mandiri Pangan						DINTANPAN
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, horikultura dan peternakan skala kecil	%				DINTANPAN
4.	Urusan Pertanahan			URUSAN PERTANAHAN			DPKP
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			Program Fasilitasi Pertanahan			DPKP
		persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah	%		Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi (Formulasi : permasalahan pertanahan yang terfasilitasi/ jumlah permasalahan pertanahan) X 100%	%	DPKP
		persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat Desa/Kelurahan	%				DPKP
	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						DPKP
		persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat	%				DPKP
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan						DPKP
		persentase penyelesaian kasus tanah negara	%				DPKP
		persentase penyelesaian izin lokasi	%				DPKP

5.	Urusan Lingkungan Hidup			5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		DLH	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		DLH	
		Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH	%			Persentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu (Jumlah Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu/Jumlah Sampel yang Diambil) X 100 %	%	DLH
		indeks kualitas air	skor			Presentase Lahan Kritis yang ditangani (Jumlah Pengendalian Kerusakan dan Dampak Perubahan Iklim/Jumlah Lokasi Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim) X 100%	%	DLH
		indeks kualitas udara	skor					DLH
		indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	skor					DLH
		persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%					DLH
		persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%					DLH
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi							DLH
		Indeks kualitas LH	indeks					DLH
		persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%					DLH
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut							DLH
		Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha					DLH
		Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi	%					DLH
		Persentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif	%					DLH
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							DLH
		Rasio luasan RTH	Rasio					DLH
		Persentase Luas RTH Perkotaan Publik	%					DLH

	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan						DLH	
		Lokasi pengembangan ekowisata	Lokasi				DLH	
		persentase ODTW berbasis ecowisata dan jasa lingkungan	%				DLH	
		NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan	%				DLH	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				Program Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		DLH	
		Luasan kawasan konservasi	Ha			Persentase Perusahaan Yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan (Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Dokumen Ijin Lingkungan/Jumlah Perusahaan Yang Wajib Memiliki Ijin Lingkungan) X100%	%	DLH
		persentase luas lahan dan hutan kritis	%			Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	dokumen	DLH
		persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan	%					DLH
		persentase sumber air dalam kondisi baik	%					DLH
		daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	skor					DLH
		persentase tutupan vegetasi	%					DLH
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam							DLH
		Persentase rehabilitasi SDA	%					DLH
		persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	%					DLH
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							DLH
		Persentase validasi data dan informasi SLHD	%					DLH
		Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup	%					DLH
		persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%					DLH

	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas			DLH
		Persentase sampah terangkut	%			Persentase Penanganan Sampah (Berat Sampah Yang Tertangani/berat Timbulan Sampah) X 100%	%	DLH
		Persentase penanganan sampah	%					DLH
		rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%					DLH
		persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%					DLH
		persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%					DLH
		Persentase bank sampah aktif	%					DLH
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							DLH
		Peran serta masyarakat dalam konservasi	pokmas					DLH
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH	%					DLH
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil			0	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DINDUKCAPIL
	Program penataan Administrasi Kependudukan				Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk			DINDUKCAPIL
		Persentase penduduk ber KTP	%			Cakupan kepemilikan KTP	%	DINDUKCAPIL
		rasio kepemilikan KTP elektronik	%			Cakupan kepemilikan KK	%	DINDUKCAPIL
		rasio kepemilikan akta kelahiran bayi (0-1 tahun)	%		Program Pelayanan Pencatatan Sipil			DINDUKCAPIL

		rasio kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk	%			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Jumlah Bayi yang Terlayani Penerbitan Akta Kelahiran/Jumlah Bayi yang Lahir)	%	DINDUKCAPIL
		rasio kepemilikan akta kematian	%			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (Jumlah Warga Masyarakat yang Terlayani Penerbitan Kutipan Akta Kematian/Jumlah Warga Masyarakat yang Meninggal Dunia)	%	DINDUKCAPIL
		rasio kepemilikan kartu identitas anak (1-10 tahun)	%					DINDUKCAPIL
	Program pengembangan data dan informasi kependudukan				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data			DINDUKCAPIL
		persentase pemanfaatan database dan profil penduduk dalam perumusan kebijakan	%			Persentase Ketersediaan data kependudukan	%	DINDUKCAPIL
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			DINPERMADES
	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa				Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan			DINPERMADES
		Persentase desa yang membentuk BUMdes	%			Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	%	DINPERMADES
		Persentase BUM Desa yang didampingi	%			Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	%	DINPERMADES
		Persentase BKAD yang didampingi	%					DINPERMADES
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa							DINPERMADES
		persentase penduduk miskin yang dientaskan	%					DINPERMADES
		persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%					DINPERMADES
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa				Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa			DINPERMADES

		Persentase Desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	%			Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	%	DINPERMADES
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat					Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	%	DINPERMADES
		Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%			Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	%	DINPERMADES
		Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%					DINPERMADES
		Persentase Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih	%					DINPERMADES
	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan							DINPERMADES
		persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	%					DINPERMADES
	Program Penanggulangan kemiskinan							DINPERMADES
		Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%					DINPERMADES
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah							DINPERMADES
		persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	%					DINPERMADES
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat				Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat			DINPERMADES
		Rata-rata Persentase kesesuaian Program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah	%			Persentase Lembaga Desa aktif	%	DINPERMADES
		Rata-rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMDes	%					DINPERMADES
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat yang telah diberdayakan	%					DINPERMADES

		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	%					DINPERMADES
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum							DINPERMADES
		Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%					DINPERMADES
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			DINSOS PPKB
	Program Keluarga Berencana				Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DINSOS PPKB
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	%			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	DINSOS PPKB
		Cakupan peserta KB aktif	%			Unmet Need KB	%	DINSOS PPKB
		Rasio akseptor KB	%					DINSOS PPKB
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%					DINSOS PPKB
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmen Need)	%					DINSOS PPKB
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%					DINSOS PPKB
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%					DINSOS PPKB
		Persentase laju pertumbuhan penduduk	%					DINSOS PPKB
		Total Fertility Rate (TFR)	%					DINSOS PPKB

Program Pelayanan Kontrasepsi							DINSOS PPKB
	Angka Drop ut KB	%					DINSOS PPKB
	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%					DINSOS PPKB
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri							DINSOS PPKB
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%					DINSOS PPKB
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%					DINSOS PPKB
Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja							DINSOS PPKB
	Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%					DINSOS PPKB
Program Ketahanan Keluarga				Program Keluarga Sejahtera			DINSOS PPKB
	Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%			Persentase Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKS dan PIK R) yang Aktif	%	DINSOS PPKB
	Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%					DINSOS PPKB
	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%					DINSOS PPKB
Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita							DINSOS PPKB

		Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	%					DINSOS PPKB
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD							DINSOS PPKB
		Cakupan kelompok Bina keluarga balita (BKB) yang terintegrasi	%					DINSOS PPKB
9.	Urusan Perhubungan			9	URUSAN PERHUBUNGAN			DINHUB
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			DINHUB
		Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%			Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Jumlah Prasarana dan Fasilitas Yang Terpasang /Jumlah Kebutuhan Prasarana dan Fasilitas) X 100%	%	DINHUB
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					Persentase Kendaraan Yang Berada Dalam Kondisi Laik Jalan (Jumlah Kendaraan Yang Lolos Uji/Jumlah Kendaraan Yang Diuji) X 100%	%	DINHUB
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%					DINHUB
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							DINHUB
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%					DINHUB
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan				Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan			DINHUB
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%			Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan (Jumlah Angkutan Yang Melayani Wilayah Jaringan Jalan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	DINHUB
						Persentase Pelanggaran Angkutan (Jumlah Pelanggaran Angkutan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	DINHUB

					Persentase Terminal dan Perparkiran Yang Terkelola (Jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola /Jumlah Terminal dan Perparkiran Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten) X 100%	%	DINHUB
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan			DINHUB
		Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%		Persentase Jumlah Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan Yang Terlaksana (Jumlah Pengembangan Teknologi Yang Terlaksana/Yang Direncanakan) X100%	%	DINHUB
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara (Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara/Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang) X 100%	%	DINHUB
		Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji	%				DINHUB
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas						DINHUB
		Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan	%				DINHUB
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran						DINHUB
		Persentase rambu - rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik	%				DINHUB
		Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik	%				DINHUB
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika			URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			DINKOMINFO
	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi			Program Pengembangan E-Government			DINKOMINFO
		Cakupan pengawasan menara BTS	niai		Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	%	DINKOMINFO
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi						DINKOMINFO
		Presentase Layanan Publik berbasis TIK	%				DINKOMINFO
		persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	%				DINKOMINFO

		persentase interkoneksi internet dan jaringan intranet kabupaten, kecamatan, desa dan perangkat daerah	%					DINKOMINFO
		persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	%					DINKOMINFO
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa				Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik			DINKOMINFO
		Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	%			Persentase OPD yang menyajikan data yang lengkap	%	DINKOMINFO
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	%					DINKOMINFO
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	%					DINKOMINFO
		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	%					DINKOMINFO
		Persentase PD telah memiliki website (%)	%					DINKOMINFO
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	%					DINKOMINFO
	Program kerjasama informasi dan media massa							DINKOMINFO
		Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan	%					DINKOMINFO
		persentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun	%					DINKOMINFO
	Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi							DINKOMINFO
		persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK	%					DINKOMINFO
11.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			DININDAGKOP UKM
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi				Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi			DININDAGKOP UKM

		Rasio UMKM dengan peningkatan skala usaha	%				DININDAGKOP UKM
	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru						DININDAGKOP UKM
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%				DININDAGKOP UKM
12.	Urusan Penanaman Modal			XII	URUSAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP NAKER
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi		DPMPTSP NAKER
		Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI	%				DPMPTSP NAKER
		Proporsi investor sektor prioritas terhadap keseluruhan sektor	%			Persentase Pertumbuhan Investor (Formulasi= {Investor t Dikurangi Investor t-1}/Investor t-1 *100%)	% DPMPTSP NAKER
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						DPMPTSP NAKER
		Peningkatan Nilai investasi	Rp.trilyun				DPMPTSP NAKER
		Proporsi investor PMDN terhadap total investasi	%				DPMPTSP NAKER
		Persentase complain terhadap Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ditangani	%				DPMPTSP NAKER
		Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%				DPMPTSP NAKER
		Persentase PMA/PMDN diKabupatenRembang yang taat aturan	%				DPMPTSP NAKER
	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal				Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan		DPMPTSP NAKER
		Persentase tindak lanjut pengaduan	%			Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Sesuai SOP dan Penanganan Pengaduan (Jumlah Ijin Tepat Waktu/Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan)X100%	% DPMPTSP NAKER
		persentase Pengembangan SIPM	%				DPMPTSP NAKER

		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti/ditangani	%					DPMPTSP NAKER
	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal							DPMPTSP NAKER
		Persentase penanaman modal sesuai perijinan	%					DPMPTSP NAKER
		persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal > 50%	%					DPMPTSP NAKER
		persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP	%					DPMPTSP NAKER
	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan							DPMPTSP NAKER
		Persentase pelayanan perijinan melalui SIPISE	%					DPMPTSP NAKER
		Persentase pelaksanaan SOP perijinan	%					DPMPTSP NAKER
13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			DINDIKPORA
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			12	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga			DINDIKPORA
		jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan	Dok			Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	%	DINDIKPORA
		Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi			Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Angka	DINDIKPORA
		Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri	Orang					DINDIKPORA
		persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam bentuk pelatihan manajemen	%					DINDIKPORA
		persentase tindaklanjut dari dokumen rencana aksi pemuda daerah	%					DINDIKPORA
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga							DINDIKPORA
		Jumlah pengurus cabor yang terlatih	Pengurus					DINDIKPORA
		persentase tenaga pelatih bersertifikat	%					DINDIKPORA
		persentase kepengurusan organisasi cabor yang terdaftar	%					DINDIKPORA

	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga							DINDIKPORA
		persentase atlet peraih medali di event tingkat Karesidenan	%					DINDIKPORA
		persentase atlet peraih medali di event tingkat provinsi	%					DINDIKPORA
		persentase atlet peraih medali di event tingkat nasional	%					DINDIKPORA
		Persentase komunitas olahraga yang aktif	%					DINDIKPORA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga							DINDIKPORA
		rasio gelanggang olah raga per 1000 penduduk	%					DINDIKPORA
		rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	%					DINDIKPORA
14.	Urusan Statistik			14	URUSAN STATISTIK			DINKOMINFO
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			DINKOMINFO
		Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%			Persentase Publikasi Data Statistik Yang Tersusun	%	DINKOMINFO
		persentase publikasi dokumen Rembang Dalam Angka yang diterbitkan tepat waktu	%					DINKOMINFO
		persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu	%					DINKOMINFO
		persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu	%					DINKOMINFO
		persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan, kependudukan, pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu	%					DINKOMINFO
								DINKOMINFO
15.	Urusan Persandian				URUSAN PERSANDIAN			DINKOMINFO
	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah				Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah			DINKOMINFO

		persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	%			Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	%	DINKOMINFO
16.	Urusan Kebudayaan			16	URUSAN KEBUDAYAAN			DINBUDPAR
	Program pengembangan nilai budaya				Program Pengembangan Nilai Budaya			DINBUDPAR
		persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	%			Persentase Perkembangan Budaya Lokal Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1 / Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1) X100%	%	DINBUDPAR
	Program pengelolaan kekayaan budaya					Persentase Perkembangan Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - (Tahun n - 1) / Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - 1) X100%	%	DINBUDPAR
		persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	%					DINBUDPAR
	Program pengelolaan keragaman budaya							DINBUDPAR
		persentase pengelolaan keragaman budaya secara profesional	%					DINBUDPAR
	Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya							DINBUDPAR
		persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani	%					DINBUDPAR
		Persentase cagar budaya yang direvitalisasi	%					DINBUDPAR
		Jumlah pemanfaatan cagar budaya	Jumlah					DINBUDPAR
	Program Pembinaan Kesenian Masyarakat							DINBUDPAR
		Perkembangan kelompok kesenian tradisional	Kelompok					DINBUDPAR
	Program Pembinaan Sejarah Lokal							DINBUDPAR
		Dokumentasi sejarah lokal	Dok					DINBUDPAR

	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa						DINBUDPAR
		Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan	Organisasi				DINBUDPAR
17.	Urusan Perpustakaan				URUSAN PERPUSTAKAAN		DINARPUS
	Program pengembangan budaya baca				Program Pelayanan Perpustakaan		DINARPUS
		persentase minat baca masyarakat	%			Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif	%
	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan						DINARPUS
		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%				DINARPUS
		Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%				DINARPUS
		Cakupan naskah kuno yang dilestarikan	rasio				DINARPUS
							DINARPUS
18.	Urusan Kearsipan			XVIII	URUSAN KEARSIPAN		DINARPUS
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				Program Pengelolaan Kearsipan		DINARPUS
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%			Persentase OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	%
		Persentase arsip yang dimusnahkan	%				DINARPUS
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan						DINARPUS
		Persentase Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku	%				DINARPUS
		Persentase arsiparis yang memiliki kompetensi	%				DINARPUS
		Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	%				DINARPUS
		Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%				DINARPUS
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						DINARPUS
		Persentase arsip/dokumen perangkat daerah yang terdigitasi	%				DINARPUS
		persentase pelaksanaan sistem kearsipan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%				DINARPUS

	URUSAN PILIHAN				URUSAN PILIHAN			
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan			1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			DINLUTKAN
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam			DINLUTKAN
		Peningkatan Produksi ikan	ton			Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya	%	DINLUTKAN
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala skala kecil	%			Persentase Peningkatan Volume Produksi Garam	%	DINLUTKAN
		Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha					DINLUTKAN
		-udang vaname						DINLUTKAN
		-bandeng						DINLUTKAN
		Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya ikan	%					DINLUTKAN
		Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan	%					DINLUTKAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha							DINLUTKAN
		Usaha produktif keluarga nelayan	Unit					DINLUTKAN
		Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan	%					DINLUTKAN
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan							DINLUTKAN
		persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna yang direkomendasikan	%					DINLUTKAN
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan			DINLUTKAN
		persentase peningkatan konsumsi ikan	%			Persentase Peningkatan Nilai Raman	%	DINLUTKAN
		persentase peningkatan produk perikanan yang bersertifikat	%					DINLUTKAN
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar							DINLUTKAN
		persentase terkelolanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar secara berkelanjutan	%					DINLUTKAN

	Program pengelolaan TPI terpadu						DINLUTKAN
		Nilai raman	Rp.Milyar				DINLUTKAN
	Program pengembangan nelayan kecil			Program Pengembangan Perikanan Tangkap			DINLUTKAN
		persentase peningkatan pendapatan nelayan kecil	%		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	%	DINLUTKAN
2.	Urusan Pariwisata			URUSAN PARIWISATA			DINBUDPAR
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			DINBUDPAR
		persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jumlah Wisatawan Tahun n-(Tahun n-1)/Jumlah Wisatawan Tahun n-1) X100%	%	DINBUDPAR
		persentase peningkatan jumlah ODTW yang dipromosikan	%		Persentase Layanan Pariwisata Yang Diinformasikan	%	DINBUDPAR
		Rata-rata lama menginap	hari				DINBUDPAR
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata						DINBUDPAR
		Peningkatan SDM pariwisata	bookdarwis				DINBUDPAR
		persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklajuti	%				DINBUDPAR
	Program pengembangan ekonomi kreatif						DINBUDPAR
		Penyediaan ruang kreatif	Ruang				DINBUDPAR
		persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	%				DINBUDPAR
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			DINBUDPAR
		Kawasan DTW strategis	DTW		Persentase Pengembangan Destinasi Wisata (Formulasi = jumlah destinasi wisata yang dikembangkan tahun n/jumlah destinasi wisata tahun n)*100%	%	DINBUDPAR
		persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%				DINBUDPAR
		Persentase pramuwisata bersertifikat	%				DINBUDPAR
		persentase pengelola Tourist Information Center bersertifikat	%				DINBUDPAR
3.	Urusan Pertanian			URUSAN PERTANIAN			DINTANPAN
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian			DINTANPAN

		Peningkatan kelas pelaku utama	poktan			Persentase Kenaikan Skor Kelompok Tani	%	DINTANPAN
		cakupan pembinaan kelompok petani	%					DINTANPAN
		persentase kelompok tani yang mendapatkan insentif pertanian	%					DINTANPAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan							DINTANPAN
		Persentase peningkatan jumlah UPJA	%					DINTANPAN
		Prosentase peningkata kelas UPJA	%					DINTANPAN
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)				Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku			DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman tembakau	ton/ha			Persentase Peningkatan Kualitas Tembakau (Formulasi {Jumlah Tembakau Dengan Kualitas Baik/Jumlah %Total Produksi Tembakau}X100%)	%	DINTANPAN
	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian			DINTANPAN
		Indeks pertanaman lahan sawah	indeks			Persentase jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan (jumlah pembiayaan petani yang terfasilitasi/ jumlah petani*100%)	%	DINTANPAN
		Prosentase jalan pertanian dalam kondisi baik	%			Persentase sarpras pertanian dalam kondisi baik (jml sarpras pertanian kondisi baik/ jml sarpras pertanian*100%)	%	DINTANPAN
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan			DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman kelapa	ton/ha			Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Formulasi {(Produktivitas Tahun t - Produktivitas Tahun t-1)/Produktivitas t-1}X 100%)	%	DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman tebu	ton/ha					DINTANPAN
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				Program Pengembangan Agribisnis Peternakan			DINTANPAN
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	indeks			Indeks Populasi Ternak (Populasi Tahun t/Populasi Tahun t-1)	nilai	DINTANPAN
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Unggas	indeks					DINTANPAN
	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan							DINTANPAN

		Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception)	indeks				DINTANPAN
		Prosentase penurunan angka kesakitan ternak	%				DINTANPAN
	Program Pengembangan Agribisnis				Program Pengembangan Agribisnis Pertanian		DINTANPAN
		Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian	indeks			Indeks Produksi Pertanian Angka	DINTANPAN
	Program Peningkatan Produksi Pertanian						DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman padi	ton/ha				DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman jagung	ton/ha				DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman kedelai	ton/ha				DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman cabe	ton/ha				DINTANPAN
		Peningkatan Produktivitas tanaman bawang merah	ton/ha				DINTANPAN
4	Urusan Perdagangan			4	URUSAN PERDAGANGAN		DININDAGKOP UKM
	Program Pengembangan Sistem Distribusi				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan		DININDAGKOP UKM
		Persentase pelaksanaan pengembangan sistem distribusi	%			Cakupan kecamatan yang memiliki pasar daerah (formulasi = kecamatan yang memiliki pasar daerah/ jumlah kecamatan * 100%) %	DININDAGKOP UKM
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi					cakupan pasar yang menerapkan eRetribusi pasar (jumlah pasar eRetribusi t - jumlah pasar eRetribusi t-1)/jumlah pasar eRetribusi t-1 x 100%) %	DININDAGKOP UKM
		Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan	%				DININDAGKOP UKM
		persentase pasar kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%				DININDAGKOP UKM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan		DININDAGKOP UKM

		Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan	%			Persentase peningkatan omset usaha perdagangan (formulasi= {Jumlah omset perdagangan t- jumlah omset perdagangan t-1}/ jumlah omset perdagangan t-1 *100%)	%	DININDAGKOP UKM
		persentase pelaku usaha yang berijin	%					DININDAGKOP UKM
	Program Peningkatan Kemetrolgian dan perlindungan Konsumen							DININDAGKOP UKM
		persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	%					DININDAGKOP UKM
		persentase produk yang tidak layak dikonsumsi	%					DININDAGKOP UKM
		Persentase cakupan sidang tera ulang	%					DININDAGKOP UKM
		Persentase pasar/toko tertib tera	%					DININDAGKOP UKM
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor							DININDAGKOP UKM
		Persentase peningkatan ekspor	%					DININDAGKOP UKM
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan							DININDAGKOP UKM
		persentase PKL dan asongan yang menempati lokasi sesuai peruntukan	%					DININDAGKOP UKM
	Program Pembinaan Pedagang							DININDAGKOP UKM
		Persentase peningkatan peran serta pedagang	%					DININDAGKOP UKM
	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan							DININDAGKOP UKM
		Jumlah kemitraan usaha perdagangan	Jumlah					DININDAGKOP UKM
		Kontribusi Sektor Perdagangan	rasio					DININDAGKOP UKM
	Program Promosi Produk Unggulan Daerah							DININDAGKOP UKM
		Persentase peningkatan omzet produk unggulan	%					DININDAGKOP UKM
		persentase keikutsertaan event promosi produk unggulan daerah tingkat nasional	%					DININDAGKOP UKM
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting							DININDAGKOP UKM
		Persentase kecukupan stok barang	%					DININDAGKOP UKM
								DININDAGKOP UKM
5	Urusan Perindustrian				URUSAN PERINDUSTRIAN			DININDAGKOP UKM

	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri			DININDAGKOP UKM
		Rasio produksi dan kapasitas terpasang	Rasio			Persentase peningkatan usaha industri agro yang dikembangkan (formulasi= {Jumlah usaha industri agro n t- jumlah usaha industri agro t-1}/ jumlah usaha industri agro t-1 *100%)	%	DININDAGKOP UKM
		persentase industri yang menerapkan standarisasi dalam tahun berkenaan	%					DININDAGKOP UKM
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							DININDAGKOP UKM
		Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%					DININDAGKOP UKM
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							DININDAGKOP UKM
		Persentase penerapan teknologi industri	%					DININDAGKOP UKM
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial							DININDAGKOP UKM
		Pertumbuhan sentra industri	Sentra					DININDAGKOP UKM
		persentase peningkatan sentra industri potensial yang dikukuhkan	%					DININDAGKOP UKM
	Program Penataan Struktur Industri							DININDAGKOP UKM
		Pertumbuhan klaster industri	klaster					DININDAGKOP UKM
		persentase peningkatan klaster industri berbasis komoditas unggulan	%					DININDAGKOP UKM
	Pembinaan Lingkungan Sosial							DININDAGKOP UKM
		Pertumbuhan pelaku industri	orang					DININDAGKOP UKM
	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah							DININDAGKOP UKM
		persentase produk unggulan daerah yang terdaftar	%					DININDAGKOP UKM
	Pembinaan Industri							DININDAGKOP UKM
		Presentase produk unggulan memenuhi SNI	%					DININDAGKOP UKM
	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif				Program Pengembangan Industri Kreatif			DININDAGKOP UKM

		Persentase IKM memperoleh HAKI	%			Persentase peningkatan usaha industri kreatif yang dikembangkan (Formulasi= (Jumlah usaha industri kreatif n t/ jumlah usaha industri kreatif t-1)/ jumlah usaha industri kreatif t-1 *100%)	%	DININDAGKOP UKM
6	Urusan Transmigrasi							SETDA
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				Bergeser ke FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (Sekretariat Daerah, masuk Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spiritual/Kemasyarakatan)			SETDA
		persentase peningkatan transmigran swakarasa dan umum	%					SETDA
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	Sekretariat Daerah			I	SEKRETARIAT DAERAH			SETDA
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan			SETDA
		Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	%			Persentase Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum Yang Ditangani	%	SETDA
	Program Kerjasama Pembangunan					Persentase MOU yang ditindaklanjuti (formulasi jumlah MOU yang ditindaklanjuti dibagi jumlah MOU)	%	SETDA
		Persentase kerjasama yang aktif	%			Nilai LPPD	Nilai	SETDA
						Persentase Kebijakan di Bidang Tata Pemerintahan Desa	%	SETDA
	Program pengembangan kualitas kebijakan publik				Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan			SETDA
		Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	%			Persentase Cakupan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Keagamaan (Jumlah layanan keagamaan yang dilakukan/jumlah seluruh layanan keagamaan/Kesehatan/ Tansmigrasi/Pemberdayaan Pemuda/Olah Raga dan Seni Budaya)	%	SETDA
					Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan			SETDA

					Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (kegiatan yang memenuhi target dibagi jumlah total kegiatan dikali 100%)	%	SETDA
					Persentase Pencapaian Level Maturitas UKPBJ (Nilai maturitas UKPBJ)	%	SETDA
				Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah			SETDA
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA Yang Dilaksanakan	%	SETDA
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Yang Dilaksanakan	%	SETDA
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilaksanakan	%	SETDA
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan			SETDA
		Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja	%		Persentase OPD Yang telah Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan	%	SETDA
		Persentase peningkatan SOP dan SPP	%		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	SETDA
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	%		Nilai IKM	%	SETDA
Program peningkatan kualitas pelayanan publik							SETDA
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	%				SETDA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks				SETDA
		Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	%				SETDA
Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur							SETDA
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	%				SETDA
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum			SETDA

		Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi	%			Persentase Produk Hukum Yang Diterbitkan (Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan dibagi jumlah produk hukum amanat peraturan perundangan) X 100%	%	SETDA
		Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan	%					SETDA
		Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	%					SETDA
	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat				Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah			SETDA
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%			Persentase Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi (jumlah permasalahan hukum yang terfasilitasi di bagi jumlah permasalahan hukum yang masuk) X 100%	%	SETDA
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan			SETDA
		Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	%			Persentase Publik Yang Menerima Informasi	%	SETDA
						Persentase Informasi Yang Diklarifikasi Untuk Peningkatan Citra Positif Pemerintah	%	SETDA
						Persentase Pelayanan Pimpinan Daerah	%	SETDA
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah							tidak ada di rpjmd
2	Kepegawaian daerah			2	KEPEGAWAIAN DAERAH			BKD
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah				Program Pelayanan dan Penataan Aparatur			BKD
		Persentase ASN yang mengikuti diklat	%			Tingkat kepuasan ASN terhadap administrasi kepegawaian (jumlah PNS yang puas terhadap layanan administrasi kepegawaian dibagi jumlah PNS yang dilayani kali 100 %)	%	BKD
		Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	%					BKD
	Program Pendidikan Kedinasan				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah			BKD

		Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	%			Persentase ASN yang memiliki Kompetensi (Jumlah ASN yg ditingkatkan kompetensi dibagi total ASN) x 100 %	%	BKD
						Prosentase pengembangan karier ASN yang terfasilitasi	%	BKD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian			BKD
		Persentase ASN yang mengikuti kegiatan assessment	%			Persentase OPD yang kinerjanya diatas 80% (nilai seluruh OPD yang diatas 80 % dibanding jumlah OPD)	%	BKD
		Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	%			Persentase Ketersediaan data informasi kepegawaian (Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah data yang harus disediakan kali 100 %)	%	BKD
		Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	%					BKD
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	%					BKD
3	Sekretariat DPRD			3	SEKRETARIAT DPRD			SETWAN
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				Program Legislasi Daerah			SETWAN
		persentase raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda	%			Persentase Raperda yang difasilitasi menjadi Perda	%	SETWAN
						Informasi Legislasi yang disampaikan kepada masyarakat		SETWAN
					Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah			SETWAN
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan	%	SETWAN
						Persentase pembahasan anggaran yang tepat waktu	%	SETWAN
4	Pengawasan			4	PENGAWASAN			INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			INSPEKTORAT
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai ditindaklanjuti	%			% Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	INSPEKTORAT
		persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	%			% Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Wilayah I, II, III, IV	%	INSPEKTORAT

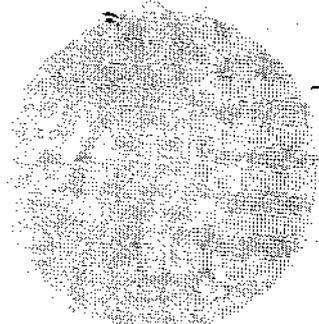
		persentase OPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi yang bersih dan melayani)	%				INSPEKTORAT
		persentase penanganan laporan gratifikasi	%				INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		INSPEKTORAT
		Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi	%			% APIP yang bersertifikat JFA dan JFPP sesuai standar	% INSPEKTORAT
		persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/bimtek/sertifikasi JFA/IB/TB	%				INSPEKTORAT
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						INSPEKTORAT
		Persentase perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI)	%				INSPEKTORAT
		Level kapabilitas Inspektorat	level				INSPEKTORAT
5	Keuangan Daerah			5	KEUANGAN DAERAH		BPPKAD
	Program pengelolaan Pendapatan Daerah				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		BPPKAD
		persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	%			Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	% BPPKAD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan		BPPKAD
		opini BPK	nilai			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	% BPPKAD
		Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%				BPPKAD
		predikat SAKIP	nilai				BPPKAD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		BPPKAD

		Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dgn standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu	%			Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	%	BPPKAD
		persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003	%					BPPKAD
		persentase ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%					BPPKAD
		persentase OPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu	%					BPPKAD
		persentase Akuntabilitas pelaporan aset daerah	%					BPPKAD
	<i>pergeseran program dari Urusan UMUM</i>				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			BPPKAD
						Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	%	BPPKAD
6	Perencanaan Pembangunan			6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			BAPPEDA
	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan				Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah			BAPPEDA
		Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu	%			Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Tepat Waktu	%	BAPPEDA
	Program Perencanaan pembangunan daerah					Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	BAPPEDA
		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%			Prosentase kesesuaian capaian kinerja daerah	%	BAPPEDA
		persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	%					BAPPEDA
	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan							BAPPEDA
		Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.	%					BAPPEDA
		Persentase tindak lanjut hasil monev	%					BAPPEDA

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah							BAPPEDA
	persentase aparaturn perencana bersertifikat kompetensi	%					BAPPEDA
Program Pengembangan wilayah perbatasan				Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			BAPPEDA
	persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan	%			% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	BAPPEDA
Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	BAPPEDA
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%					BAPPEDA
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam							BAPPEDA
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA	%					BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana							BAPPEDA
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana	%					BAPPEDA
Program Perencanaan Tata Ruang							BAPPEDA
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang	%					BAPPEDA
Program Pemanfaatan Ruang							BAPPEDA
	persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaaan tata ruang	%					BAPPEDA
Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang							BAPPEDA
	persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang	%					BAPPEDA
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							BAPPEDA

		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	%					BAPPEDA
	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya				Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			BAPPEDA
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud	%			% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	BAPPEDA
						% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	BAPPEDA
	Program Perencanaan pembangunan ekonomi				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			BAPPEDA
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%			% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi	%	BAPPEDA
	Program Kerjasama Pembangunan					% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Ekonomi	%	BAPPEDA
		Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan	%					BAPPEDA
		persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti	%					BAPPEDA
	Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek				Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK			BAPPEDA
		persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi	%			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	BAPPEDA
						Persentase pertumbuhan inovasi	%	BAPPEDA
7	penunjang pemerintah Kecamatan			7	PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN			KECAMATAN
	<i>program baru</i>				Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat			KECAMATAN
						Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	nilai	KECAMATAN
						Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	nilai	KECAMATAN
						Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	nilai	KECAMATAN
						Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	nilai	KECAMATAN

INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN
MUSEUM REKOR-DUNIA
INDONESIA

No.8338/R.MURE/II/2018

Dianugrahkan Kepada

**RSD dr R. Soetrasno Rembang &
Iksos Alumni FK UGM Angkatan Tahun 1983**
ATAS REKOR

*Pemrakarsa dan Penyelenggara
Sosial Operasi secara Nonstop Terlama*

Jakarta, 25 Februari 2018

JAYA SUPRANA
Ketua Umum



KABUPATEN REMBANG

PLAGAM PENGHARGAAN

nomor: 002/S/00284/07/2019

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/53 Tahun 2019 Tentang TOP 10, TOP 20 dan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Diberikan Kepada

**RSUD dr. R. Soetrasno
Kabupaten Rembang**

Dengan inovasi

(ARJUNO)

Aplikasi Rujukan Online Ke RSUD dr. R. Soetrasno

Sebagai

TOP 10

INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

KABUPATEN JAWA TENGAH





GOVERNUR JAWA TENGGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002-9/03-3409/2019

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660/56 Tahun 2019 Tentang TOP 10, TOP 20 dan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Mibetikan Kapitan

**RSUD dr. R. Soetrasno
Kabupaten Rembang**

Dirigan Inovasi

(OS-Jek)

Layanan Pengantaran Pasien Pulang Gratis

Sembaga

TOP 40

INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TENGGAH TAHUN 2019

GOVERNUR JAWA TENGGAH



H. GUSMAN HARNOYO, S.H., M.P.

PIAGAMPENGHARGAAN

dengan ini diberikan kepada :

Pokdarwis Pasir Putih Kabupaten Rembang

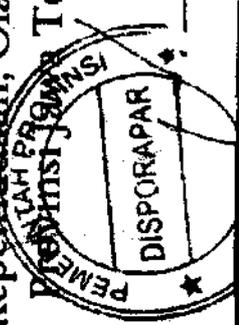
Sebagai JUARA III KONVENSI JAMBORE POKDARWIS 2019

dalam kegiatan Jambore Pokdarwis " Apresiasi dan Konvensi Kelompok Sadar Wisata Jawa Tengah Tahun 2019 "
yang diselenggarakan oleh Disporapar Prov Jateng Pada tanggal 26 s.d. 28 Juli 2019 di Kabupaten Purbalingga

Semarang, Juli 2019

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Drs. SINSINGEN RACHMADI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691231 199402 1 006

PIAGAM PENGHARGAAN

dengan ini diberikan kepada :

Pokdarwis Pasir Putih Kabupaten Rembang

Sebagai JUARA II GELAR PRODUK

dalam kegiatan Jambore Pokdarwis " Apresiasi dan Konvensi Kelompok Sadar Wisata Jawa Tengah Tahun 2019 "
yang diselenggarakan oleh Disporapar Prov Jateng Pada tanggal 26 s.d. 28 Juli 2019 di Kabupaten Purbalingga

Semarang, Juli 2019

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Drs. SINOENYU RACHMADI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691231 199402 1 006



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN *Jateng*
PROVINSI JAWA TENGAH *gayeng*

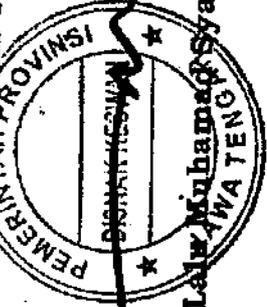
JUARA I

INDUK SAPI PO

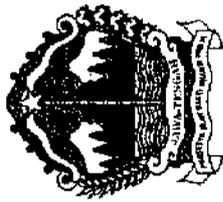
KONTES TERNAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TH. 2019
-BULAN BAKTI PETERNAKAN TAHUN 2019-

Rembang, 25 September 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Lala Mubhamat Syafriadi, MM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Jenderal Gatot Soebroto (Tarubudaya)
Telp. (024) 6921597 Kode Pos 50501
UNGARAN

JUARA I

KATEGORI CALON INDUK SAPI PO

KONTES TERNAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/014275

Dasar : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Nomor 525.3/943/2019 tentang Pemenang Lomba "FESTIVAL TEMBAKAU JAWA TENGAH"
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Diberikan Kepada :

**KELOMPOK TANI SIDO LUHUR
KABUPATEN REMBANG**

Sebagai :

JUARA I

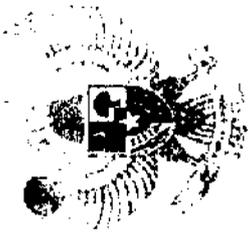
Uji Aroma Tembakau

Ungaran, 27 Oktober 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Subandono, M.P.
NIP.1948081989031006



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5 / 0014242

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 527 / 17 tanggal 3 Juli 2019 tentang Pemenang Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Diberikan kepada :

MIRA MALVIANI, SP
BPP Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang

Sebagai

JUARA I

Kategori Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan

Semarang, 3 Juli 2019



H. GAN HARFRANOWO, SH, M.IP



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 002.5 / 0014242

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 327/17 tanggal 3 Juli 2019 tentang
Pemenang Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Diberikan kepada :

SUTRISNO, SP

BPP Kec. Sedan Kab. Rembang

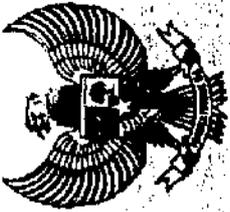
Sebagai

JUARA I

Kategori Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan

Semarang, 3 Juli 2019





GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5 / 0014242

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 527 / 17 tanggal 3 Juli 2019 tentang Pemenang Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Diberikan kepada :

MARGO MULYO

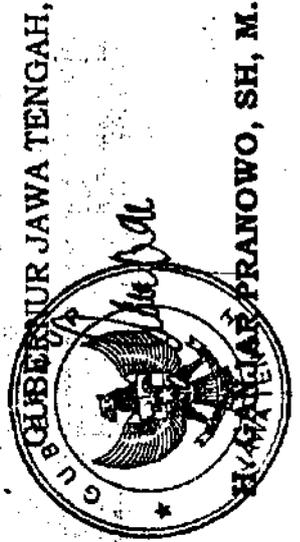
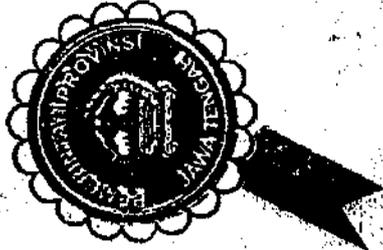
Desa Logede, Kec. Sumber Kab. Rembang

Sebagai

JUARA II

Kategori Kelompok Tani Upsus Jagung Berprestasi

Semarang, 3 Juli 2019





DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN *Jateng*
PROVINSI JAWA TENGAH

JUARA HARAPAN I PEJANTAN SAPI PO

KONTES TERNAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TH. 2019
-BULAN BAKTI PETERNAKAN TAHUN 2019-

Rembang, 25 September 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Lela Mohamad Syafriadi, MM



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN *Jateng*
PROVINSI JAWA TENGAH

JUARA HARAPAN I CALON INDUK SAPI PO

KONTES TERNAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TH. 2019

BULAN BAKTI PETERNAKAN TAHUN 2019

Kabupaten 20

KAPALA DESA : PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

